



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, perlu disusun Kebijakan Kelautan Indonesia;
- b. bahwa Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2016-2019 sebagai bagian dari Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, perlu dilanjutkan secara terpadu dan berkesinambungan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kelautan sesuai dengan target pembangunan nasional pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025;
- Mengingat** : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA TAHUN 2021-2025.**

Pasal 1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Kebijakan Kelautan Indonesia adalah pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian/lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi Poros Maritim Dunia.
2. Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.
3. Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kelautan sesuai dengan target pembangunan nasional.

Pasal 2

- (1) Rencana Aksi ditetapkan untuk 5 (lima) tahun yakni periode Tahun 2021-2025.
- (2) Rencana Aksi disusun mengacu pada:
 - a. Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia; dan
 - b. Kegiatan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (4) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Narasi dan Matriks Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025.
- (5) Program dan kegiatan kementerian/lembaga terkait pembangunan kelautan yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Aksi.

Pasal 3

- (1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

a. pedoman . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- a. pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia; dan
 - b. acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia.
- (2) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terhadap pelaksanaan kegiatan masing-masing kementerian/lembaga sesuai dengan Rencana Aksi pada bulan ke-6 (enam), ke-9 (sembilan), dan ke-12 (dua belas) pada setiap tahun.
 - (3) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Aksi.
 - (4) Berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyusun laporan pelaksanaan Rencana Aksi.

Pasal 4

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 5

- (1) Rencana Aksi dapat dilakukan penyesuaian dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyesuaian Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- (3) Penyesuaian Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi setelah mendapatkan persetujuan Presiden.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2022

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yasonna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

TAHUN 2021-2025

**A. NARASI RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
TAHUN 2021-2025**

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia. Pedoman KKI diuraikan dalam Dokumen Nasional KKI sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Pedoman tersebut dioperasionalkan melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi KKI dan ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.

Waktu pelaksanaan Rencana Aksi KKI Tahun 2016-2019 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia telah berakhir. Guna melanjutkan upaya-upaya untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, perlu ditetapkan Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025.

Visi Poros Maritim Dunia merupakan suatu visi geopolitik sebagai penegasan manifestasi tujuan nasional sekaligus momentum dalam menerapkan strategi pembangunan nasional berbasis kemaritiman. Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, penerbitan Dokumen Nasional KKI dan Rencana Aksi KKI Tahun 2016-2019 adalah beberapa dari sejumlah kebijakan kelautan strategis yang telah diterbitkan sebagai kelanjutan upaya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim.

Sesuai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Sesuai Dokumen Nasional KKI, visi Kelautan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Visi tersebut menjadi tuntutan dan kebutuhan Indonesia dalam menghadapi tantangan pembangunan kelautan sebagaimana diuraikan dalam Bab III Dokumen Nasional KKI, untuk mencapai kedaulatan Indonesia yang terkait dengan wilayah perairan, hak berdaulat, kawasan yurisdiksi, serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional sebagaimana tertuang dalam Bab II Dokumen Nasional KKI.

Guna mewujudkan visi Kelautan Indonesia perlu disusun sasaran sebagai misi dari KKI, yaitu:

1. Terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan;
2. Terbangunnya kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi kelautan yang andal;
3. Terbangunnya pertahanan dan keamanan kelautan yang tangguh;
4. Terlaksananya penegakan kedaulatan, hukum, dan keselamatan di laut;
5. Terlaksananya tata kelola kelautan yang baik;
6. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang merata;
7. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan yang berdaya saing;
8. Terbangunnya infrastruktur kelautan yang andal;
9. terselesaikannya aturan tentang tata ruang laut;
10. Terlaksananya perlindungan lingkungan laut;
11. Terlaksananya diplomasi maritim; dan
12. Terbentuknya wawasan identitas dan budaya bahari.

Sebagai kelanjutan perwujudan visi dan misi yang telah dicanangkan, Rencana Aksi KKI perlu disusun sebagai salah satu pedoman operasional bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mewujudkan visi kelautan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. KKI mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang saling terkait satu sama lain. Dalam implementasi program kelautan, terdapat banyak pelaku yang terlibat. Pengembangan kelautan perlu dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik, dan sinergis menuju terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

1.2. Tujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1.2. Tujuan dan Sasaran

Rencana Aksi KKI merupakan dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sektor kelautan sesuai dengan target pembangunan nasional. Rencana Aksi KKI disiapkan untuk mendukung tujuan dari Dokumen Nasional KKI yaitu untuk menyinergikan dan menyelaraskan seluruh program pembangunan kelautan agar lebih terarah, tepat sasaran, serta capaian hasilnya dapat diukur. Rencana Aksi KKI merupakan perwujudan kerangka rencana aksi bagian dari salah satu kaidah pelaksanaan KKI. Dalam hal ini, Rencana Aksi KKI berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang membantu menyinergikan program dan kegiatan kementerian/lembaga dalam melaksanakan pembangunan kelautan.

1.3. Ruang Lingkup

1.3.1. Pilar dan Prinsip Kebijakan Kelautan Indonesia

Berdasarkan Dokumen Nasional KKI dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, Pilar KKI terdiri atas 7 (tujuh) pilar, yaitu:

1. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut;
3. Tata Kelola dan Kelembagaan Laut;
4. Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan;
5. Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut;
6. Budaya Bahari; dan
7. Diplomasi Maritim.

Dokumen Nasional KKI juga memuat enam prinsip dasar penyusunan KKI, yaitu:

1. Wawasan Nusantara;
2. Pembangunan Berkelanjutan;
3. Ekonomi Biru;
4. Pengelolaan Terintegrasi dan Transparan;
5. Partisipasi; dan
6. Kesetaraan dan Pemerataan.

Pilar dan prinsip dasar KKI tersebut melandasi penyusunan program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Aksi KKI.

1.3.2. Matriks . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

1.3.2. Matriks Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia

Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025 dituangkan dalam bentuk matriks Rencana Aksi KKI yang berisi program dan kegiatan yang dikelompokkan berdasarkan 7 (tujuh) pilar KKI. Matriks Rencana Aksi KKI terdiri atas 8 (delapan) kolom, meliputi:

1. Program;
2. Kegiatan;
3. Sasaran;
4. Output;
5. Target per Tahun;
6. Instansi Penanggung Jawab;
7. Instansi Terkait; dan
8. Sumber Pembiayaan.

1.3.3. Program

Kolom Program di dalam matriks Rencana Aksi KKI berisi program utama dari 7 (tujuh) pilar KKI sebagaimana ditetapkan dalam Bab V Dokumen Nasional KKI.

1.3.4. Kegiatan

Kolom Kegiatan di dalam matriks Rencana Aksi KKI berisi kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga Penanggung Jawab dan Instansi Terkait.

1.3.5. Sasaran

Kolom Sasaran di dalam matriks Rencana Aksi KKI berisi penjelasan tentang keadaan yang diharapkan terwujud melalui pelaksanaan kegiatan.

1.3.6. *Output*

Kolom *Output* di dalam matriks Rencana Aksi KKI berisi penjelasan mengenai hasil dari pelaksanaan kegiatan beserta satuan ukurnya dan berfungsi sebagai indikator kinerja pelaksanaan kegiatan.

1.3.7. Target

Kolom Target di dalam matriks Rencana Aksi KKI berisi penjelasan tentang kinerja pelaksanaan kegiatan yang diharapkan tercapai di masing-masing tahun pelaksanaan kegiatan. Kolom Target terbagi menjadi 5 (lima) kolom masing-masing untuk target kegiatan di tahun 2021 sampai dengan 2025. Untuk menjaga keberlanjutan program strategis dari periode sebelumnya, sejumlah pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 dicantumkan oleh kementerian/lembaga Penanggung Jawab pada kolom target 2021.

1.3.8. Instansi . . .



• **PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

1.3.8. Instansi Penanggung Jawab

Kolom Instansi Penanggung Jawab di dalam matriks Rencana Aksi KKI berisi nama kementerian/lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan dan melaporkan kegiatan. Jumlah Instansi Penanggung Jawab di dalam Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025 secara keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) kementerian/lembaga.

1.3.9. Instansi Terkait

Kolom Instansi Terkait di dalam matriks Rencana Aksi KKI berisi nama kementerian/lembaga, atau instansi yang ikut serta dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

1.3.10. Sumber Pembiayaan

Kolom Sumber Pembiayaan di dalam matriks Rencana Aksi KKI berisi jenis sumber pembiayaan yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Gambaran Umum

2.1. Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2016-2019

Rencana Aksi KKI Tahun 2016-2019 menerjemahkan 7 (tujuh) pilar KKI kedalam 5 (lima) kluster program prioritas, yaitu: (1) Batas Maritim, Ruang Laut, dan Diplomasi Maritim; (2) Industri Maritim dan Konektivitas Laut; (3) Industri Sumber Daya Alam dan Jasa Kelautan, serta Pengelolaan Lingkungan Laut; (4) Pertahanan dan Keamanan Laut; dan (5) Budaya Bahari.

Rencana Aksi KKI Tahun 2016-2019 telah dilaksanakan oleh 36 (tiga puluh enam) kementerian/lembaga penanggungjawab bersama instansi terkait. Selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, luaran/*output* dari program dan kegiatan KKI telah mendukung pengembangan ekonomi maritim, melalui penegakan hukum di sektor maritim dan memperkuat infrastruktur pendukung dalam ekonomi maritim. Kedaulatan maritim terus ditegakkan di antaranya melalui penanganan terhadap kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Kesejahteraan di sektor maritim terus ditingkatkan di antaranya melalui pembangunan pelabuhan, penyediaan kapal, serta akses pembiayaan dan asuransi untuk nelayan.

Output . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Output dari program dan kegiatan KKI tersebut telah berkontribusi diantaranya terhadap (1) pengembangan sistem konektivitas transportasi kelautan; (2) penyederhanaan perizinan pemanfaatan ruang laut; (3) peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan untuk pariwisata bahari secara berkelanjutan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; (4) pembinaan dan pengembangan kawasan permukiman dan pedesaan; (5) penyediaan akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), lahan dan pembiayaan bagi pengembangan usaha nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam; (6) peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pengembangan industri perikanan; dan (7) pengembangan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral sesuai dengan prinsip ekonomi biru dengan memperhatikan teknologi ramah lingkungan.

Di samping pencapaian tersebut, pelaksanaan Rencana Aksi KKI Tahun 2016-2019 juga menghadapi sejumlah tantangan dan kendala, yang menyebabkan pelaksanaannya belum optimal.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi KKI Tahun 2016-2019 masih dilaksanakan dengan pendekatan luaran (*output*). Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) guna mengukur hasil (*outcome*) KKI jangka menengah 5 (lima) tahun. Hasil pengukuran IKU diharapkan berkontribusi terhadap dampak (*impact*) KKI dalam jangka panjang sampai 2045, serta mendukung strategi pembangunan ekonomi maritim, peradaban maritim, dan kekuatan maritim dalam Visi Indonesia 2045.

2.2. Pelaksanaan Kegiatan Kelautan di Tahun 2020

Tahun 2020 merupakan masa transisi antara RPJMN 2015-2019 dengan RPJMN 2020-2024. Dalam tahun yang sama, sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) kegiatan kementerian/lembaga telah memiliki target luaran (*output*) yang mendukung RPJMN 2020-2024 dan terkait dengan pembangunan kelautan Indonesia. Kegiatan tersebut secara keseluruhan dilaksanakan oleh 40 (empat puluh) kementerian/lembaga dan memiliki target luaran kegiatan yang berlanjut ke tahun 2021 hingga 2025 dan selanjutnya dimuat dalam Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025.

2.3. Isu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2.3. Isu Strategis dan Kondisi Saat Ini

2.3.1. Isu Strategis dan Kondisi Saat Ini terkait Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya kelautan menjadi isu yang krusial, apalagi jika dikaitkan dengan pengelolaan yang berkelanjutan. KKI dalam 5 (lima) tahun ke depan akan mendorong pada penerapan program pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem dan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Bersamaan dengan hal ini, secara umum, pengembangan sumber daya manusia dan penguatan inovasi dalam sektor perikanan dan kelautan masih tidak terlepas dari tantangan pembangunan kelautan saat ini. Kebutuhan untuk peningkatan nilai tambah dalam pemanfaatan beragam sumber daya kelautan berhubungan erat dengan kebutuhan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia maritim. Keduanya secara bersamaan dibutuhkan khususnya dalam upaya peningkatan hilirisasi di sektor ekonomi perikanan dan kelautan, termasuk pariwisata bahari dan ekonomi kreatif yang sarat dengan tuntutan peningkatan inovasi untuk peningkatan nilai tambah.

Meskipun demikian, masih banyak nelayan tradisional dan masyarakat pesisir dalam piramida ekonomi perikanan dan kelautan Indonesia yang berada dalam wilayah pesisir dengan angka kemiskinan tinggi. Penguatan sumber daya manusia masih terus dibutuhkan agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya nelayan kecil tradisional dan para pelaku ekonomi maritim skala kecil di kawasan terdepan dan terpencil bisa bertransformasi agar semakin berkualitas, produktif, inovatif, mandiri dan berdaya saing, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan, membangun ketahanan ekonomi, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

2.3.2. Isu Strategis dan Kondisi Saat Ini terkait Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut

Potensi sumber daya perikanan sangat potensial untuk menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah penguatan penegakan hukum dalam memberantas penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (*Illegal, Unregulated and Unreported Fishing/IUU Fishing*) sesuai ketentuan Undang-Undang

Nomor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Kawasan kegiatan *IUU Fishing* yang paling dominan dilaporkan diantaranya adalah di sekitar laut Natuna Utara, di mana aktivitas pencurian tersebut dilakukan oleh berbagai kapal dengan segala ukuran yang berasal dari negara yang memiliki perbatasan langsung dengan perairan Indonesia. Untuk itu salah satu kegiatan prioritas dan strategis nasional dalam RPJMN 2020-2024 adalah penguatan keamanan sekitar Laut Natuna yang juga menjadi salah satu fokus dalam Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025.

2.3.3. Isu Strategis dan Kondisi Saat Ini terkait Tata Kelola dan Kelembagaan Laut

Pembangunan kelautan Indonesia diselenggarakan di antaranya melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan tata kelola dan kelembagaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut meliputi rencana pembangunan sistem hukum dan tata pemerintahan serta sistem perencanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pembangunan kelautan yang efektif dan efisien. Kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut disusun melalui penataan hukum laut dalam suatu sistem hukum nasional, baik melalui aspek publik maupun aspek perdata dengan memperhatikan hukum internasional.

Kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut diperlukan guna mempertahankan sistem tata kelola kelautan nasional yang komprehensif terintegrasi, efektif, dan efisien. Hal ini diperlukan untuk menjaga sinkronisasi dan efektivitas implementasi di berbagai peraturan perundang-undangan. Penguatan tata kelola dan kelembagaan laut di tingkat nasional perlu berlanjut di antaranya guna mendukung penyelenggaraan tata ruang dan/atau rencana zonasi, dan penguatan daya saing untuk pertumbuhan industri maritim. Di tingkat regional dan internasional, tata kelola dan kelembagaan laut terus diperkuat dalam hal penanganan *IUU Fishing*, pembentukan norma hukum internasional melawan kejahatan perikanan, serta penyelarasan peraturan perundang-undangan terkait zona tambahan, landas kontinen, dan partisipasi Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional.

2.3.4. Isu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2.3.4. Isu Strategis dan Kondisi Saat Ini terkait Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan

Sebagai negara kepulauan, pembangunan nasional menghadapi 2 (dua) isu besar yang menantang, yaitu konektivitas maritim dan pemerataan pembangunan. Lambatnya pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan ekonomi, dan menjadi salah satu indikasi perekonomian negara berjalan dengan cara yang tidak efisien. Biaya logistik yang sangat tinggi memiliki dampak berantai terutama pada biaya bisnis yang sulit ditekan, sehingga menurunkan daya saing baik dari pelaku bisnis maupun komoditas. Jalur cepat transportasi laut atau tol laut menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Selama ini, pertumbuhan ekonomi hanya terpusat di Pulau Jawa sehingga distribusi muatan logistik ke wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi rendah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia, membutuhkan biaya yang tinggi. Pembangunan tol laut dilakukan untuk menyediakan jaringan angkutan laut tetap dan teratur yang menghubungkan simpul pelabuhan utama (*hub port*) dengan pelabuhan-pelabuhan pengumpannya (*feeder port*). Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan disparitas harga antara Indonesia bagian barat dan timur.

Upaya penyediaan, peningkatan kualitas, dan pemerataan infrastruktur, khususnya yang mendukung konektivitas antar wilayah dan mendukung infrastruktur dasar, masih perlu berlanjut, sehingga biaya logistik nasional bisa diturunkan agar arus barang lancar dan berdampak pada pemerataan. Upaya tersebut juga perlu ditunjang penguatan industri dan jasa kemaritiman yang terhubung dengan sistem logistik, khususnya untuk industri dan jasa yang berkontribusi dalam:

1. Meningkatkan produksi sumber daya maritim secara berkelanjutan;
2. Mewujudkan ketahanan energi;
3. Meningkatkan kemandirian industri penunjang infrastruktur, maritim dan transportasi;
4. Meningkatkan manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya pariwisata bahari dan ekonomi kreatif dengan fokus peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan; dan
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif untuk menggerakkan kegiatan penguatan tersebut.

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Dengan demikian, diharapkan pembangunan berbasis negara kepulauan di Indonesia terus terjaga dalam arah yang mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan kemaritiman yang seimbang dan dinamis.

2.3.5. Isu Strategis dan Kondisi Saat Ini terkait Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut

Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) dianugerahi berbagai potensi ekonomi, termasuk sumber daya alam dan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan ini harus bijaksana dengan memperhatikan kelestariannya agar generasi penerus dapat ikut menikmati. Untuk menjaga kelestarian dibutuhkan kebijakan komprehensif yang berdampak positif terhadap kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan kedaulatan wilayah.

Salah satu kebijakan strategis yang dapat menjamin dampak positif tersebut adalah penyelenggaraan program pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut dengan indikator capaian keberhasilan yang terukur, yaitu Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI). IKLI adalah indikator untuk menunjukkan status kesehatan ekosistem laut dalam area atau batasan geografis tertentu pada waktu (tahun). IKLI menilai kesehatan laut berdasarkan fungsi laut, sebagai:

1. Sumber keanekaragaman hayati laut;
2. Sumber pangan;
3. Sumber produk alam;
4. Penyimpan karbon;
5. Sumber mata-pencarian dan ekonomi;
6. Penyedia jasa pariwisata dan rekreasi;
7. Penyedia kesempatan berusaha dan bekerja bagi perikanan tradisional (artisanal);
8. Penyedia perlindungan pesisir;
9. Penyedia perlindungan spesies dan tempat yang ikonis; dan
10. Penyedia perairan yang bersih.

Peningkatan kesehatan Laut Indonesia menjadi kebutuhan berlanjut agar keberlanjutan sumber daya kelautan dapat menjadi penentu produktivitas perairan untuk pembangunan ekonomi maritim. Hal ini perlu ditopang kuat dengan kelangsungan dari beragam upaya:

1. Peningkatan produksi sumber daya maritim yang dipastikan berlangsung secara berkelanjutan;

2. Penjagaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

2. Penjagaan sistem penyangga kehidupan dengan meningkatkan daya dukung lingkungan dan terjaganya keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati; serta
3. Percepatan penyelesaian tata ruang dan/atau rencana zonasi dalam rangka menentukan pola pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan laut oleh berbagai pihak.

Pemerintah Indonesia membuat suatu terobosan kebijakan di bidang penataan ruang dengan mengintegrasikan tata ruang darat dan laut. Kebijakan tata ruang menjadi salah satu instrumen utama keberlanjutan kondisi ekosistem laut khususnya yang menopang ekonomi maritim. Dari satu kawasan laut misalnya ekosistem pesisir, beragam jenis ekosistem dapat ditemukan yaitu mangrove, terumbu karang, padang lamun atau ekosistem lainnya seperti pantai landau berpasir, pantai berbatu, atau estuari. Ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang adalah ekosistem khas yang mempunyai peran sosial, ekonomi, dan fungsi ekologis yang paling dominan dalam membentuk kondisi kawasan pesisir secara umum. Di samping itu, kawasan pesisir masih menjadi kawasan dengan aktivitas tertinggi dari masyarakat dengan mata pencaharian berbasis sumber daya kelautan. Kondisi atau tingkat kualitas masing-masing ekosistem berperan menggambarkan status atau kondisi perairan pesisir secara keseluruhan, serta menentukan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir sebagai tulang punggung ekonomi kelautan. KKI mendukung upaya perlindungan dan pemulihan untuk ekosistem esensial tersebut.

2.3.6. Isu Strategis dan Kondisi Saat Ini terkait Budaya Bahari

Sejarah mencatat Indonesia telah berhasil menjelajahi lintas benua serta melakukan perjalanan panjang dalam misi perdagangan dan diplomasi. Pada era kerajaan nusantara, bangsa Indonesia mengandalkan posisi strategis laut sebagai kunci perdagangan lintas negara. Untuk membangkitkan sektor maritim yang berdaya saing, perlu mengkonstruksikan kembali maritim sebagai budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Membangun kembali budaya bahari bangsa Indonesia sangat penting, karena sejak era penjajahan kolonial, budaya tersebut telah mengalami pergeseran. Negara harus memelopori lahirnya kembali budaya bahari bangsa

Indonesia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Indonesia yang pernah berjaya di masa lampau dengan membangun berbagai keunggulan di bidang kelautan antara lain pembangunan kapal armada dagang, konektivitas maritim antar pulau, meningkatkan kapasitas armada perikanan, dan pendidikan sejarah kejayaan maritim Indonesia. Kebutuhan ini menuntut adanya arah kebijakan untuk penguatan jati diri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara. Penguatan tersebut bisa dicapai di antaranya melalui peningkatan pendidikan dan literasi maritim bagi masyarakat, identifikasi dan inventarisasi nilai budaya dan sistem sosial kelautan, pembangkitan pemahaman wawasan dan budaya bahari, serta harmonisasi dan pengembangan unsur kearifan lokal ke dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang lestari.

2.3.7. Isu Strategis dan Kondisi Saat Ini terkait Diplomasi Maritim

Sejak diimplementasikannya KKI sebagai penerjemahan Visi Poros Maritim Dunia, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia terus mengalami pergeseran. Kondisi geopolitik tersebut di antaranya konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah, kompetisi proyeksi kekuatan di Samudera Hindia dan ketidakpastian kebijakan di Pasifik dan Atlantik. Indonesia juga melihat adanya berbagai inisiatif yang mengemuka dalam narasi strategis antarnegara di kawasan, seperti *“Indo-Pacific”*, *“Indian Ocean Rim”*, *“Belt and Road Initiative”*, *“Act East”*, *“Free and Open Indo Pacific”*, dan *“Mega Trading Blocs”*.

Berbagai kondisi dan inisiatif tersebut berpengaruh terhadap posisi geopolitik strategis Indonesia termasuk perairan strategis dunia yang berada dalam kedaulatan atau kawasan hak berdaulat Indonesia. Pemerintah perlu terus memastikan bahwa Indonesia tidak memihak berbagai inisiatif tersebut, memastikan implementasinya sesuai dengan hukum internasional, dan melihat kemungkinan dari manfaat positif dari gagasan-gagasan baik untuk stabilitas kawasan, termasuk kemungkinan kerja sama dan sinergi yang dibutuhkan dengan Indonesia.

Keadaan tersebut hadir bersama dengan masalah-masalah maritim di kawasan yang masih menjadi tantangan tradisional maupun nontradisional. Dalam ranah kedaulatan, tantangan tradisional datang dengan adanya potensi agresi di kawasan yang menimbulkan ancaman. Ancaman tersebut, perlu diwaspadai dengan memperkuat sistem pertahanan dan

keamanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

keamanan laut dengan postur yang proporsional sesuai dengan luas wilayah dan ancaman yang dihadapi. Rentang wilayah yang sangat luas juga menuntut Indonesia untuk melanjutkan penyelesaian batas maritim laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Selain itu, tantangan nontradisional terbentuk oleh kondisi geografis Indonesia dengan laut yang terbuka dan banyaknya akses ke dalam wilayah Indonesia, masih menimbulkan permasalahan dan tantangan khususnya di sektor perikanan dan logistik maritim seperti perbudakan di laut, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan ancaman siber. Keadaan ini bersamaan dengan dampak perubahan iklim dan pencemaran laut yang berpotensi menurunkan kesehatan sumber daya hayati laut.

Mempertimbangkan sifat multidimensi dan lintas batas dari tantangan tersebut, Indonesia perlu terus bekerjasama dengan berbagai negara dan mitra lainnya, baik di kawasan-kawasan maupun internasional, serta memperjuangkan kepentingan Indonesia melalui penguatan diplomasi maritim. Urgensi diplomasi maritim beririsan kuat dengan kepentingan Indonesia untuk menjaga perekonomian kelautan Indonesia yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan dan ekonomi biru. Kelanjutan upaya tersebut didukung melalui berbagai forum dan Kerjasama Internasional, di antaranya melalui inisiasi dan penyelenggaraan Forum Negara Kepulauan dan Pulau atau *Archipelagic and Island States (AIS) Forum*, yang merupakan inisiatif global untuk menjawab tantangan pembangunan kelautan yang menjadi persoalan bersama (*common challenges*) dalam hal pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, ketahanan terhadap perubahan iklim, pencemaran laut, manajemen bencana, dan pengembangan perikanan yang berkelanjutan.

III. Arah Kebijakan dan Strategi

Rencana Aksi KKI merupakan salah satu wujud kaidah pelaksanaan KKI yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025 disusun sebagai pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kelautan sesuai dengan target pembangunan nasional dalam upaya percepatan implementasi Poros Maritim Dunia. Program dan kegiatan dalam Rencana Aksi KKI

Tahun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Tahun 2021-2025 diselaraskan dengan Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025 mendukung pembangunan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pengelolaan sumber daya dan peningkatan nilai tambah ekonomi yang menjadi landasan terhadap sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup pangan dan pertanian, kemaritiman, kelautan dan perikanan, industri pengolahan, pariwisata bahari, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025 mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap:

- a. Pelaksanaan pembangunan wilayah pulau atau kepulauan dengan mendukung strategi pembangunan, melalui:

- 1) Pengembangan komoditas unggulan seperti perikanan tangkap di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa-Bali, perikanan budidaya di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa-Bali, serta destinasi pariwisata alam, budaya, dan sejarah di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Jawa-Bali;
- 2) Pengembangan sentra produksi perikanan di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sumatera dan industri pengolahan hasil perikanan di wilayah Maluku, Nusa Tenggara;
- 3) Penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antar wilayah antarpulau besar di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa-Bali; serta
- 4) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim di antaranya melalui penanganan abrasi pantai di daerah pesisir dan kepulauan beserta peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera Jawa-Bali;

yang seluruhnya didukung dengan upaya peningkatan pelayanan dasar dan pelaksanaan otonomi daerah.

b. Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- b. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan sebagai bagian dari kawasan strategis dan prioritas dalam pendekatan pembangunan wilayah. Upaya penurunan kesenjangan dan peningkatan pemerataan didorong di antaranya melalui percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa yang didukung, melalui:
- 1) Tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif;
 - 2) Penetapan batas desa;
 - 3) Pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/BUMDes Bersama;
 - 4) Peningkatan pelayanan dasar desa;
 - 5) Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping lokal desa; dan
 - 6) Penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025 mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap arah kebijakan dengan:
- a. Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial antara lain melalui pemberian asuransi nelayan dan perlindungan pelaut dan awak kapal perikanan;
 - b. Meningkatkan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda antara lain melalui kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan, penanggulangan kurang energi kronik ibu hamil, suplementasi gizi mikro pada balita;
 - c. Mengentaskan Kemiskinan antara lain melalui penyediaan akses IPTEK, lahan dan pembiayaan bagi pengembangan usaha nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam; dan
 - d. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing antara lain melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dibidang industri ikan hias, penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan, dan pengendalian sistem jaminan mutu produk kelautan dan perikanan.

4. Revolusi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025 mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap arah kebijakan dengan:

- a. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa antara lain melalui pengembangan ruang kreatif dan sarana kreatif di destinasi pariwisata prioritas dan lokasi *cultural heritage regeneration*, dan pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa;
- b. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat antara lain, melalui pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan, pengelolaan kenelayanan, serta penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan; dan
- c. Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia antara lain, melalui pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat termasuk di dalamnya upaya pengembangan budaya bahari dan literasi maritim, Gerakan Cinta Laut, Gerakan Indonesia Bersih, dan pengembangan sumber daya maritim.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025 mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap arah kebijakan di bidang infrastruktur ekonomi, khususnya terkait konektivitas laut yang mendukung sektor ekonomi di kawasan/kluster kelautan dan perikanan, serta jasa dan pariwisata termasuk di wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, pesisir dan kepulauan.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025 mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap arah kebijakan dengan:

- a. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim yang salah satu strateginya adalah Peningkatan Ketahanan Iklim, termasuk di dalamnya upaya Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan; dan
- b. Pembangunan Rendah Karbon terkait isu strategis penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca yang salah satu strateginya adalah rendah karbon pesisir dan laut yang dilaksanakan di antaranya melalui inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan termasuk program penanaman mangrove.

7. Memperkuat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik

Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025 mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap strategi:

- a. Pembangunan politik, hukum, pertahanan dan kemananan dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri, khususnya dalam aspek diplomasi maritim, batas negara dan keamanan laut; dan
- b. Transformasi pelayanan publik untuk kemudahan dan simplifikasi perizinan di sektor kelautan, perikanan dan kemaritiman.

IV. Program dan Kegiatan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025 pelaksanaannya diwujudkan dalam program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk mendukung 52 (lima puluh dua) dari 76 (tujuh puluh enam) program utama KKI sebagaimana tercantum dalam Bab V Dokumen Nasional KKI. Jumlah Instansi Penanggung Jawab di dalam Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025 secara keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) kementerian/lembaga. Program dan jumlah kegiatan pendukung masing-masing pilar terangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Program dan jumlah kegiatan pendukung

Program Pilar KKI Ke-1: Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Kegiatan
1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari	18
1.2. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan produk kelautan dan perikanan	17
1.3. Peningkatan perlindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik	15
1.4. Pengembangan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral sesuai dengan prinsip ekonomi biru dengan memperhatikan teknologi ramah lingkungan	2
1.6. Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, kearifan tradisional, kawasan konservasi, dan kelestarian lingkungan	9

1.7. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

1.7. Pengembangan industri bioteknologi kelautan dan biofarmakologi laut dengan pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati	2
1.8. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara seimbang dan berkelanjutan	3
1.9. Penguatan sistem data dan informasi kelautan, inventarisasi, dan evaluasi sumber daya kelautan	1
1.11. Pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan	10
1.12. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan	19
1.13. Peningkatan gizi masyarakat kelautan	2
1.14. Peningkatan perlindungan ketenagakerjaan	1
1.15. Peningkatan pendidikan dan penyadaran masyarakat kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, jenjang pendidikan	1
1.21. Peningkatan tata kelola ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta agenda riset kelautan strategis	6
Program Pilar KKI Ke-2: Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut	Jumlah Kegiatan
2.2. Peningkatan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di seluruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, serta di luar wilayah yurisdiksi sesuai hukum internasional	9
2.3. Peningkatan pembangunan kawasan perbatasan di laut dan pulau-pulau kecil terluar	2
2.5. Penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi	4
2.7. Pembangunan karakter bangsa yang berorientasi kelautan dalam upaya bela negara	5
2.8. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran	13
Program Pilar KKI Ke-3: Tata Kelola dan Kelembagaan Laut	Jumlah Kegiatan
3.1. Penataan sistem hukum nasional di bidang kelautan	5
3.2. Implementasi hukum internasional di bidang kelautan sesuai dengan kepentingan nasional	3

3.3. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

3.3. Pembangunan sistem tata kelola kelautan nasional yang baik, transparan dan bertanggung jawab	5
Program Pilar KKI Ke-4: Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan	Jumlah Kegiatan
4.1. Penyusunan dan pengembangan basis data dan informasi ekonomi kelautan	3
4.2. Penciptaan iklim investasi usaha yang kondusif dan efisien	7
4.3. Pengembangan dunia usaha di bidang kelautan nasional yang berdaya saing internasional	2
4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis	20
4.5. Optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama nelayan	16
4.6. Intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan penguatan mutu produk perikanan mulai dari proses praproduksi sampai dengan pemasaran	5
4.8. Pengembangan kerja sama ekonomi berkelanjutan dengan negara mitra strategis bidang kelautan	2
4.9. Sinergi kepentingan nasional strategis dalam menentukan kawasan pengembangan infrastruktur kelautan	3
4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional	22
4.15. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan laut	20
4.16. Pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam	12
4.18. Penyediaan kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, lahan, dan pembiayaan untuk kepentingan pengembangan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam	3
4.19. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di bidang kelautan, khususnya pada sektor perikanan, energi, dan pariwisata bahari	6
Program Pilar KKI Ke-5: Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut	Jumlah Kegiatan
5.4. Percepatan penyelesaian rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi	7

5.5. Percepatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

5.5. Penyediaan data informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik terpadu dalam kerangka kebijakan satu peta untuk penyusunan tata ruang laut	6
5.6. Penyederhanaan perizinan pengelolaan ruang laut	2
5.7. Penguatan pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil melalui manajemen terpadu dan berkelanjutan	11
5.9. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut	21
5.10. Penanggulangan bencana kelautan	3
Program Pilar KKI Ke-6: Budaya Bahari	Jumlah Kegiatan
6.1. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan	4
6.2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi nilai budaya dan sistem sosial kelautan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional	1
6.3. Membangkitkan pemahaman wawasan dan budaya bahari	6
6.4. Melakukan harmonisasi dan pengembangan unsur kearifan lokal ke dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang lestari	1
Program Pilar KKI Ke-7: Diplomasi maritim	Jumlah Kegiatan
7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral	19
7.2. Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan	8
7.3. Kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang kelautan	5
7.4. Percepatan perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga	1
7.5. Percepatan submisi penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan hukum internasional	3
7.6. Peningkatan penempatan warga negara Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional bidang kelautan	1
7.7. Pembakuan nama pulau	2

4.2. Kaidah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

4.2. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025 dilakukan mengikuti kaidah pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Bab VI Dokumen Nasional KKI.

V. Indikator Kinerja Utama Kebijakan Kelautan Indonesia

Indikator Kinerja Utama (IKU) KKI merupakan indikator hasil (*outcome*) dari pelaksanaan jangka menengah Rencana Aksi KKI yang ditetapkan untuk masing-masing pilar KKI. Target ditetapkan untuk masing-masing IKU dan berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja untuk masing-masing pilar KKI. Hasil pemantauan dan evaluasi KKI akan digunakan untuk menganalisis IKU KKI minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan untuk agregasi hasil akhir IKU KKI akan dilakukan pengukuran dan penilaian pada akhir periode. IKU untuk masing-masing pilar KKI tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama

Pilar KKI	IKU*	Nilai Dasar (Tahun Dasar)	Target 2021*	Target 2024^
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Indeks Inovasi Maritim	37,7 (2019)	38,6	41,5
	2. Indeks Ketahanan Energi Nasional	72,06 (2020)	72,46	73,03
Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut	Indeks Kedaulatan Maritim	3 (2019)	3	4
Tata Kelola dan Kelembagaan Laut	Indeks Pembangunan Hukum Kemaritiman***	>0,02 per Tahun	>0,02 per Tahun	>0,02 per Tahun
Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim (%)	6,0 (2019)	6.63	7,80

Kesejahteraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pilar KKI	IKU*	Nilai Dasar (Tahun Dasar)	Target 2021*	Target 2024^
Kesejahteraan	2. Indeks Kinerja Logistik Maritim	3,1 (2019)	3.2	3,5
	3. Nilai Tukar Nelayan	100 (2018)	103	107
Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut	Indeks Kesehatan Laut Indonesia	65 (2019)	65	67
Budaya Bahari	Indeks Literasi Maritim***	>3 per Tahun	>3 per Tahun	>3 per Tahun
Diplomasi Maritim	Indeks Kepemimpinan Maritim	≥ 3 (2019)	≥ 3	≥ 3
Keterangan: * Pengklasifikasian IKU pada masing-masing pilar bersifat fleksibel dan tidak tertutup kemungkinan beririsan dengan pilar yang lain. ** Tahun 2020 merupakan masa transisi antara RPJMN 2015-2019 dengan RPJMN 2020-2024. *** IKU ini untuk pertama kalinya diukur pada Rencana Aksi KKI 2021-2025 sehingga tidak ada nilai dasar, nilai indeks menyatakan pertumbuhan per tahun. ^ Target IKU di tahun 2024 merupakan ketetapan target di periode akhir RPJMN 2020-2024 dan digunakan sebagai pewali untuk target indikatif IKU di tahun 2025.				

VI. Matriks . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

VI. Matriks Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025

MATRIKS PILAR KKI KE-1: PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari												
1	1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari	Penyusunan SNI Ikan Hias dalam rangka Penerapan Standar dan Sertifikasi Ikan Hias	Tersusunnya SNI Ikan Hias	Jumlah SNI Ikan Hias yang ditetapkan (kumulatif)	5 Dokumen (2021) 2 Dokumen (2020)	7 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	14 Dokumen	BSN	KKP, BRIN, Perguruan Tinggi, dan Swasta	APBN (AP1) dan/atau Sumber lain yang sah
2	1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari	Penerapan dan sertifikasi cara budidaya ikan hias yang baik di Sentra Produksi Ikan Hias dalam rangka Penerapan Standar dan Sertifikasi Ikan Hias	Terlaksananya penerapan dan sertifikasi cara budidaya ikan hias yang baik di Sentra Produksi Ikan Hias	Jumlah unit sentra produksi ikan hias yang dibimbing: 50 unit sentra produksi ikan hias (kumulatif)	5 Unit	10 Unit	20 Unit	30 Unit	50 Unit	BSN	KKP, Kemendagri, Kemenkeu, Pemda, dan Swasta	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

1.1. Pengelolaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
3	1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari	Pengembangan UMKM bidang Ikan Hias	Tersedianya analisis pasar untuk pengembangan UMKM ikan hias	Dokumen analisis pasar (<i>market intelligence & market brief</i>) hias	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Kemendag	Kemenko Marves, Kemenko Ekon, KKP, Kemlu, dan Swasta	APBN (AP1) dan/atau Sumber lain yang sah
4	1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari	Promosi Ikan Hias Indonesia	Terselenggaranya promosi ikan hias Indonesia	Kegiatan pameran ikan hias internasional	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kemendag	Kemenko Marves, KKP, Kemenparekraf, Kemlu, BRIN, Pemda, dan Swasta	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
5	1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari	Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Peragaan Ikan Hias	Terlaksananya Gerakan Nasional Peragaan Ikan Hias Indonesia	Dilaksanakannya Gerakan Nasional Peragaan Ikan Hias oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda	√	√	√	√	√	Kemenko Marves	Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda	APBN (AP1) dan/atau APBD

1.1. Pengelolaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
6	1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari	Pengembangan Usaha Mikro bidang Ikan Hias	Terfasilitasi-nya Usaha Mikro Ikan Hias untuk mengakses pembiayaan baik perbankan/ nonperbankan	Jumlah Usaha Mikro Ikan Hias yang terfasilitasi akses pembiayaan	-	10 Usaha Mikro	10 Usaha Mikro	10 Usaha Mikro	10 Usaha Mikro	KemenkopUKM	BUMN dan Swasta	APBN (AP1) dan/atau Sumber lain yang sah
7	1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari	Pembangunan /re rehabilitasi Sarana dan Prasarana di Sentra Produksi Ikan Hias	Tersedianya sarana, prasarana, input produksi dan manajemen kesehatan dan lingkungan (penggunaan probiotik, vaksin, pemantauan/ monev hama penyakit ikan karantina) di sentra ikan hias serta sentra pakan	34 Lokasi Sentra ikan hias dan sentra pakan alami (kumulatif)	5 Lokasi	15 Lokasi	25 Lokasi	34 Lokasi	34 Lokasi	KKP	KemenPUPR, KLHK, BRIN, Pemda, Perguruan Tinggi, dan Swasta	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

alami . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
			alami									
8	1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari	Penerapan dan sertifikasi cara karantina ikan hias yang baik pada eksportir ikan hias dalam rangka Penerapan Standar dan Sertifikasi Ikan Hias	Terlaksananya penerapan dan sertifikasi cara karantina ikan hias yang baik pada eksportir ikan hias	50 eksportir ikan hias (kumulatif)	20 Eksportir	30 Eksportir	40 Eksportir	50 Eksportir	50 Eksportir	KKP	Pemda dan Swasta	APBN (AP1), APBD, Sumber lain yang sah
9	1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari	Pemantauan dan Operasi Armada	Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah kapal pengawas yang di bangun (unit)	4 (2 lanjutan dan 2 baru)	3 (baru) 2 (lanjutan)	3 (baru)	3 (baru)	3 (baru)	KKP	BRIN	APBN (AP1)

1.1. Pengelolaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
10	1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari	Pemantauan dan Operasi Armada	Terselenggaranya operasi armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Hari Operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan merusak sumber daya KP di WPPNRI (hari operasi)	122 Hari (2021) 105 Hari (2020)	180 Hari	180 Hari	180 Hari	180 Hari	KKP	Kemhan, TNI, Polri, dan Bakamla	APBN (AP1)
11	1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari	Pemberantasan praktik penangkapan ikan secara destruktif	Meningkatnya pengawasan terhadap pelaku usaha dalam rangka pemberantasan praktik penangkapan ikan secara destruktif menuju perikanan lestari	Jumlah Pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan <i>destructive fishing</i> (pelaku usaha)	360 Pelaku Usaha (2021) 270 Pelaku Usaha (2020)	410 Pelaku Usaha	510 Pelaku Usaha	585 Pelaku Usaha	650 Pelaku Usaha	KKP	Kemenko Marves, Kemenhub, Kemenkeu, Bakamla, dan Polri	APBN (AP1)

1.1. Pengelolaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
12	1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari	Pengendalian penangkapan ikan	Pembaharuan perkembangan data perizinan kapal perikanan di pusat dan daerah yang terintegrasi	Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat dan daerah	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	KKP	Pemda	APBN (AP1) dan/atau APBD
13	1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari	Penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan	Tersedianya Data dan Informasi stok ikan (<i>stock assessment</i>)	Kajian Stok ikan pada 11 wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)	11 WPPNRI	-	-	-	-	KKP	BRIN dan Perguruan Tinggi	APBN (AP1) dan/atau Sumber lain yang sah
14	1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari	Pengelolaan sumber daya ikan	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan	Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan (kumulatif)	70%	80%	90%	100%	100%	KKP	Pemda	APBN (AP1) dan/atau APBD

1.1. Pengelolaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
15	1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari	Pengelolaan sumber daya ikan	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang terkelola sumber daya ikannya	Jumlah ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya (WPPNRI)	8 (WPPNRI)	8 (WPPNRI)	8 (WPPNRI)	8 (WPPNRI)	8 (WPPNRI)	KKP	Kemenko Marves, Kemenko Polhukam, Kemenko Ekon, dan Pemda	APBN (AP1) dan/atau APBD
16	1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari	Pengelolaan sumber daya ikan	Bertambahnya jumlah kapal perikanan yang menerapkan <i>logbook</i> penangkapan ikan (LBPI)	Jumlah kapal perikanan yang menerapkan <i>logbook</i> penangkapan ikan (Unit)	15.000 Kapal (2021) 6.000 Kapal (2020)	10.000 Kapal	12.000 Kapal	14.000 Kapal	14.000 Kapal	KKP	Pemda	APBN (AP1) dan/atau APBD
17	1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari	Pengelolaan produksi dan usaha budidaya ikan hias	Tersedianya model usaha ikan hias	Jumlah sarana budidaya ikan hias sebanyak 350 paket model usaha ikan hias (kumulatif)	150 Paket (2021) 50 Paket (2020)	250 Paket	300 Paket	350 Paket	350 Paket	KKP	Kemendag	APBN (AP1)

1.1. Pengelolaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
18	1.1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari	Pemetaan Penyebaran Lokasi dan Potensi Ikan Hias, Korall Hias dan Tanaman Air Hias	Tersedianya Peta Potensi Ikan Hias, Korall Hias dan Tanaman air hias	Peta potensi sebanyak 125 jenis (kumulatif)	50 Peta (2021) 25 Peta (2020)	75 Peta	100 Peta	125 Peta	125 Peta	BRIN	KKP, KLHK, Pemda, Perguruan Tinggi, dan Swasta	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
1.2. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan produk kelautan dan perikanan												
19	1.2. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan produk kelautan dan perikanan	Pengembangan kemasan bahan pangan aktif berbasis kitosan	Diperolehnya prototipe kemasan bahan pangan aktif berbasis kitosan	Prototipe Kemasan Bahan Pangan Aktif Berbasis Kitosan <i>Packaging</i>	Metode Pembuatan <i>Antimicrobial Drip Absorber</i> Berbasis Kitosan yang telah dioptimasi	Prototipe <i>Antimicrobial Drip Absorber</i> Berbasis Kitosan yang telah dikarakterisasi	Prototipe <i>Antimicrobial Drip Absorber</i> Berbasis Kitosan yang telah diuji	Prototipe <i>Active Packaging</i> Material berupa <i>Antimicrobial Drip Absorber</i> Berbasis Kitosan	-	BRIN	KKP	APBN (AP1)
20	1.2. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar	Pengendalian sistem pengantinaan ikan dan sistem jaminan mutu	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sistem pengantinaan	Persentase sampel makanan hasil kelautan dan perikanan yang diperiksa dan	86%	87%	88%	89%	90%	BPOM	Kemenperin	APBN (AP1)

dan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	dan keselamatan produk kelautandan perikanan		an ikan, mutu, dan keamanan hayati ikan	memenuhi syarat								
21	1.2. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan produk kelautandan perikanan	Pengendalian sistem pengantinaan ikan dan sistem jaminan mutu	Meningkatnya Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem ketertelusuran	Persentase sarana Produksi Makanan hasil kelautan dan perikanan yang diperiksa dan memenuhi ketentuan	62%	64%	66%	68%	70%	BPOM	KKP	APBN (AP1)
22	1.2. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan produk kelautan dan perikanan	Pengendalian sistem pengantinaan ikan dan sistem jaminan mutu	Meningkatnya Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor	Sampel pangan fortifikasi (Garam) yang memenuhi syarat	79%	80%	81%	82%	83%	BPOM	KKP	APBN (AP1)

1.2. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
23	1.2. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan produk kelautan dan perikanan	Penerapan sistem ketertelusuran pada unit penanganan dan/atau pengolahan ikan	Terselenggaranya registrasi pangan olahan hasil laut dan perikanan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Jumlah keputusan registrasi pangan olahan hasil laut dan perikanan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	1.050 (Produk Dalam Negeri dan Impor)	1.050 (Produk Dalam Negeri dan Impor)	1.050 (Produk Dalam Negeri dan Impor)	1.050 (Produk Dalam Negeri dan Impor)	1.050 (Produk Dalam Negeri dan Impor)	BPOM	KKP	APBN (AP1)
24	1.2. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan produk kelautan dan perikanan	Penyediaan Teknologi Garam Industri Terintegrasi	Terwujudnya swasembada garam dengan teknologi peningkatan kualitas garam rakyat menjadi garam industri dan farmasi, serta meningkatkan produksi garam nasional dengan teknologi tanpa	1. Jumlah <i>Pilot Plant</i> Garam Terintegrasi 2. Jumlah alih teknologi 3. Jumlah pemanfaatan teknologi/ lisensi	1: Mini Pilot Plant Garam Industri <i>Chlor Alkali Plant</i> dari <i>Rejected Brine</i> PLTU kapasitas 750 ton/tahun 2: Alih teknologi pemurnian garam rakyat 3: Engingeering Design Pabrik Garam dari <i>Rejected Brine</i> PLTU (2021)1:	1: Optimasi <i>Pilot Project</i> Garam PLTU 2: Alih teknologi 3: Pendampingan pembangunan pabrik garam tanpa lahan oleh investor	1: Pendampingan pembangunan Pabrik Garam Farmasi 1: Pembangunan <i>pilot plant bittern</i> menjadi bahan baku obat dan farmasi	3: Pendampingan kloning pabrik garam dari <i>rejected brine</i> PLTU	1: Difusi Teknologi Garam Terintegrasi dalam rangka menjaga daya saing dan kemandirian/ swasembada garam nasional 1: Menyiapkan SNI produk garam industri dan regulasi yang	BRIN	KemenPPN/ Bappenas, KKP, Kemenperin, Kemenkeu, Pemda, dan BUMN	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

lahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*	
					2021	2022	2023	2024	2025				
			lahan (memanfaatkan <i>rejected brine</i> PLTU)		Optimasi <i>Pilot Plant</i> Pemurnian Garam Rakyat Menjadi Garam Industri Aneka Pangan dan Pertambangan 2: Studi kelayakan pabrik garam dari <i>rejected brine</i> PLTU 3: <i>Engineering design</i> proses bitern menjadi bahan baku obat dan farmasi (2020)					dibutuhkan			
25	1.2. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan	Penguatan kapasitas usahakoperasi sektor perikanan melalui kemitraan	Pemanfaatan teknologi hidrolisat protein ikan menjadi <i>functional food</i> (produk mie, <i>cookies</i> dan	Jumlah koperasi perikanan yang mampu mengelola teknologi hidrolisat protein ikan	-	1 Koperasi	1 Koperasi	1 Koperasi	1 Koperasi	KemenkopUKM	Kemenko Marves, KKP, Kemenkes, dan BPOM	APBN (AP1)	

produk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	produk kelautan dan perikanan		Protein glutamat) untuk penanggulangan isu <i>stunting</i>									
26	1.2. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan produk kelautan dan perikanan	Penumbuhan dan pengembangan industri makanan, hasil laut, dan perikanan	Terbangunnya industri kitin, kitosan dan glukosamin berbahan baku hasil samping industri pengolahan perikanan dengan kapasitas produksi sebesar 1 ton/bulan	1 unit <i>pilot project miniplant</i> industri kitin, kitosan dan glukosamin berbahan baku hasil samping industri pengolahan perikanan dengan kapasitas produksi sebesar 1 ton/bulan		1 Unit	-	-	-	Kemenperin	KKP dan Perguruan Tinggi	APBN (AP1) dan/atau Sumber lain yang sah
27	1.2. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah,	Pembinaan dan penerapan sistem perkarantina-	Tercegahnya penyakit ikan eksotik yang masuk ke dalam wilayah	Penyakit ikan karantina yang dicegah masuk ke dalam wilayah RI	100%	100%	100%	100%	100%	KKP	Kemendag, Kementan, dan Kemenkeu	APBN (AP1)

serta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	serta standar dan keselamatan produk kelautandan perikanan	an dan keamanan hayati ikan	RI	(persentase)								
28	1.2. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan produk kelautandan perikanan	Pembinaan dan penerapan sistem perkarantina-an dan keamanan hayati ikan	Tercegahnya penyakit ikan eksotik yang masuk ke dalam wilayah RI	Sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi (lokasi)	260 (2021) 221 (2020)	260	260	260	260	KKP	-	APBN (AP1)
29	1.2. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan produk kelautan dan	Pembinaan dan penerapan sistem perkarantina-an dan keamanan hayati ikan	Terselenggara-nya sertifikasi kesehatan ikan	Ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi standar persyaratan kesehatan ikan (persentase)	98%	98%	98%	98%	98%	KKP	Kemendag	APBN (AP1)

perikanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	perikanan											
30	1.2. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan produk kelautandan perikanan	Penyelenggara-an sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	Meningkatnya ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)	Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)	2.500 produk (2021) 1.295 produk (2020)	2.600 produk	2.700 produk	2.800 produk	2.900 produk	KKP	Kemendag dan KemenkopUKM	APBN (AP1)
31	1.2. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan produk	Pengendalian sistem pengantinaan ikan dan sistem jaminan mutu	Terselenggaranya layanan pengendalian dan pengawasan sistem pengantinaan ikan, mutu, dan keamanan	Layanan dan pengawasan di exit/entry point perbatasan (lokasi)	42 Lokasi	43 Lokasi	44 Lokasi	45 Lokasi	46 Lokasi	KKP	Kemendag dan KemenkopUKM	APBN (AP1)

kelautan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	kelautan dan perikanan		hayati ikan									
32	1.2. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan produk kelautandan perikanan	Pengendalian sistem pengantinaan ikan dan sistem jaminan mutu	Terselenggaranya layanan pengendalian dan pengawasan sistem pengantinaan ikan, mutu, dan keamanan hayati ikan	Penjaminan mutu hasil perikanan domestik (lokasi)	80 Lokasi (2021) 47 Lokasi (2020)	84 Lokasi	86 Lokasi	88 Lokasi	90 Lokasi	KKP	-	APBN (AP1)
33	1.2. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan produk kelautandan perikanan	Pengendalian sistem pengantinaan ikan dan sistem jaminan mutu	Meningkatnya Pelaku Usaha Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor	Jumlah pelaku usaha Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor (kumulatif)	780 Pelaku usaha (2021) 416 Pelaku usaha (2020)	800 Pelaku usaha	805 Pelaku usaha	810 Pelaku usaha	815 Pelaku usaha	KKP	Kemendag	APBN (AP1)

1.2. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
34	1.2. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan produk kelautan dan perikanan	Pengendalian sistem pengantaraan ikan dan sistem jaminan mutu	Penambahan jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan <i>biosecurity</i>	Jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan <i>biosecurity</i> (unit)	550 Unit Usaha (2021) 420 Unit Usaha (2020)	435 Unit Usaha	440 Unit Usaha	445 Unit Usaha	450 Unit Usaha	KKP	-	APBN (AP1)
35	1.2. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan produk kelautan dan perikanan	Penerapan sistem ketertelusuran pada unit Penanganan dan/atau pengolahan Ikan	Penambahan jumlah unit penanganan dan/atau pengolahan ikan (UPI) yang menerapkan sistem ketertelusuran	Jumlah unit penanganan dan/atau pengolahan ikan (UPI) yang menerapkan sistem ketertelusuran	200 Unit (2021) 80 Unit (2020)	120 Unit	140 Unit	150 Unit	160 Unit	KKP	Kemenperin	APBN (AP1)

1.3. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*	
					2021	2022	2023	2024	2025				
1.3. Peningkatan perlindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik													
36	1.3. Peningkatan perlindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik	Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Inisiatif Segitiga Terumbu Karang, <i>The Coral Triangle Initiative</i> (CTI-CFF) Indonesia 2021-2025	Tersusunnya RAN CTI-CFF Indonesia 2021 - 2025	Dokumen RAN CTI-CFF Indonesia 2021 - 2025	- (2021) 1 Dokumen (2020)	-	-	-	-	-	Kemenko Marves	BRIN, Kemenparekraf, Kemenhub, Perguruan Tinggi, KKP, dan BIG	APBN (AP6)
37	1.3. Peningkatan perlindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik *	Penyusunan rencana aksi nasional konservasi pada 10 jenis ikan terancam punah dan/atau endemik prioritas	Tersusunnya rencana aksi nasional konservasi pada 10 jenis ikan terancam punah dan/atau endemik prioritas	Dokumen rencana aksi nasional konservasi per tahun	2 Dokumen (2021) 2 Dokumen (2020)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	KKP	Kemenko Marves, KLHK, BRIN, dan Kementan	APBN (AP6)

1.3. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
38	1.3. Peningkatan perlindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik *	Rehabilitasi terumbu karang di lokasi prioritas	Terlaksananya rehabilitasi terumbu karang di lokasi prioritas	Rehabilitasi terumbu karang di 20 lokasi prioritas per tahun	20 Lokasi (2021) 20 Lokasi (2020)	20 Lokasi	20 Lokasi	20 Lokasi	20 Lokasi	KKP	Kemenko Marves, Kemenparekraf, Kemenhub, BRIN, BIG, dan Perguruan Tinggi	APBN (AP6), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

1.3. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
39	1.3. Peningkatan perlindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik	Penetapan kawasan konservasi	Kawasan konservasi	Luasan Kawasan Konservasi yang ditetapkan (Ha per tahun)	13,8 juta Ha (2021) 15,8 juta Ha (2020)	15,8 juta Ha	17,8 juta Ha	23,8 juta Ha	24,8 juta Ha	KKP	Pemda, Perguruan Tinggi, dan Swasta	APBN (AP6), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
40	1.3. Peningkatan perlindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik	Pengembangan Kerja Sama di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terbentuknya kelompok kemitraan penggerak kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan yang berkelanjutan	Jumlah konvensi dan/atau kerjasama pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan yang berkelanjutan	5 Konvensi/ kerjasama (2021) 3 Konvensi/ kerjasama (2020)	5 Konvensi/ kerjasama	5 Konvensi/ kerjasama	5 Konvensi/ kerjasama	5 Konvensi/ kerjasama	KKP	KLHK, Kemenparekraf, Kemenhub, Pemda, Perguruan Tinggi, dan Swasta	APBN (AP6), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

1.3. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
41	1.3. Peningkatan perlindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik	Pengembangan Kerja Sama di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terbentuknya kelompok kemitraan penggerak kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan yang berkelanjutan	Jumlah kelompok penggerak kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan secara berkelanjutan (Kelompok)	20 Kelompok (2021) 10 Kelompok (2020)	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	KKP	-	APBN (AP6)
42	1.3. Peningkatan perlindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik	Pengelolaan keanekaragaman hayati perairan secara berkelanjutan	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dan/atau dilestarikan secara (Jenis)	16 Jenis (2021) 6 Jenis (2020)	14 Jenis	18 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	KKP	Pemda, Perguruan Tinggi, dan Swasta	APBN (AP6), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

1.3. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
43	1.3. Peningkatan perlindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik	Pengelolaan kawasan konservasi yang efektif	Kawasan konservasi yang dikelola secara efektif	Luas kawasan konservasi yang dikelola secara efektif (Kumulatif) (Ha)	12,5 juta Ha (2021) 10 juta Ha (2020)	13,8 juta Ha	15,8 juta Ha	17,8 juta Ha	23,8 juta Ha	KKP	Kemenparekraf, Kemenhub, KemenPUPR, dan Pemda	APBN (AP1) dan/atau APBD
44	1.3. Peningkatan perlindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik	Pengendalian ikan introduksi yang bersifat <i>invasive</i>	Terkendalinya ikan introduksi yang bersifat <i>invasive</i>	Wilayah Kab/Kota yang teridentifikasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif (Lokasi) (Kumulatif)	96 Lokasi	98 Lokasi	100 Lokasi	102 Lokasi	102 Lokasi	KKP	KLHK, BRIN, Pemda, Perguruan Tinggi, dan Swasta	APBN (AP4), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

1.3. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
45	1.3. Peningkatan perlindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik	Rehabilitasi hutan mangrove/ pantai	Meningkatnya ekosistem Laut Pesisir yang terdegradasi	Luas rehabilitasi hutan mangrove/ pantai (Hektar)	84.250 Ha (2021) 1.000 Ha (2020)	1.250 Ha	1.250 Ha	1.250 Ha	-	KLHK	-	APBN (AP6)
46	1.3. Peningkatan perlindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik	Penyusunan Regulasi Pencegahan Pencurian Sumber Daya Hayati Indonesia (<i>Biopiracy</i>)	Tersusunnya Regulasi Pencegahan Pencurian Sumber Daya Hayati Indonesia (<i>Biopiracy</i>)	Regulasi Pencegahan Pencurian Sumber Daya Hayati Indonesia (<i>Biopiracy</i>)	-	1 Dokumen	-	-	-	KLHK	Kemenko Marves, KKP, Kementan, dan BRIN	APBN (AP6)

1.3. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
47	1.3. Peningkatan perlindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik	Pengukuran pemulihan ekosistem terumbu karang akibat fenomena dan perubahan iklim	Terlaksana pemantauan terumbu karang guna tersedianya data pemulihan terumbu karang akibat pemutihan karang	Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) konservasi dan rehabilitasi terumbu karang	Monitoring dan penilaian indeks resiliensi terumbu karang di wilayah terdampak pemutihan karang (Samudera Hindia, Laut Cina Selatan, dan Pasifik) (2021) Baseline Studi resiliensi di wilayah terdampak pemutihan karang (Samudera Hindia, Laut Cina Selatan, dan Pasifik) dan Identifikasi indikator	Monitoring dan penilaian indeks resiliensi terumbu karang di wilayah terdampak pemutihan karang (Samudera Hindia, Laut Cina Selatan, dan Pasifik)	Pemodelan Dinamik resiliensi terumbu karang dan desain rencana aksi pemulihan terumbu karang	Penyusunan naskah kebijakan dan naskah rencana aksi nasional (RAN) pemulihan terumbu karang	Penyusunan naskah kebijakan dan naskah rencana aksi nasional (RAN) pemulihan terumbu karang	BRIN	KKP, KLHK, BRIN, dan Perguruan Tinggi	APBN (AP6)

Resiliensi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
					Resiliensi (2020)							
48	1.3. Peningkatan perlindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik	Peningkatan ekosistem Laut Pesisir yang terdegradasi	Tersedianya Karya Tulis Ilmiah dan naskah rekomendasi terkait Pelestarian, Restorasi, dan pemanfaatn keberlanjutan dan ekosistem Perairan	Karya Tulis Ilmiah (KTI) Internasional terindeks global dan naskah rekomendasi terkait Pelestarian, Restorasi, dan pemanfaatan keberlanjutan dan ekosistem Perairan	1. Kegiatan exsitu: penelitian teknologi konservasi biota laut skala laboratorium, dan pengembangan eduwisata konservasi wilayah pesisir. 2. Konservasi insitu: <i>restocking</i> jenis biota laut komersial, transplantasi koral dan lamun, replantasi/ reforestasi mangrove,	1. Kegiatan exsitu: penelitian teknologi konservasi biota laut skala laboratorium, dan pengembangan eduwisata konservasi wilayah pesisir. 2. Konservasi insitu: <i>restocking</i> jenis biota laut komersial, transplantasi koral dan lamun, replantasi/ reforestasi	1. Kegiatan exsitu: penelitian teknologi konservasi biota laut skala laboratorium, dan pengembangan eduwisata konservasi wilayah pesisir. 2. Konservasi insitu: <i>restocking</i> jenis biota laut komersial, transplantasi koral dan lamun, replantasi/ reforestasi mangrove, serta metode- metode lain	1. Kegiatan exsitu: penelitian teknologi konservasi biota laut skala laboratorium, dan pengembangan eduwisata konservasi wilayah pesisir. 2. Konservasi insitu: <i>restocking</i> jenis biota laut komersial, transplantasi koral dan lamun, replantasi/ reforestasi mangrove, serta metode- metode lain	1. Kegiatan exsitu: penelitian teknologi konservasi biota laut skala laboratorium, dan pengembangan eduwisata konservasi wilayah pesisir. 2. Konservasi insitu: <i>restocking</i> jenis biota laut komersial, transplantasi koral dan lamun, replantasi/ reforestasi mangrove, serta metode- metode lain	BRIN	KKP, KLHK, BRIN, dan Perguruan Tinggi	APBN (AP6)

serta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
					serta metode-metode lain yang sesuai. 3.Studi populasi dan/atau eksploitasi serta penanda genetik (DNA marker) biota lautterancam punah	mangrove, serta metode-metode lain yang sesuai. 3.Studi populasi dan/atau eksploitasi serta penanda genetik (DNA marker) biota lautterancam punah	yang sesuai. 3.Studi populasi dan/atau eksploitasi serta penanda genetik (DNA marker) biota lautterancam punah	yang sesuai. 3.Studi populasi dan/atau eksploitasi serta penanda genetik (DNA marker) biota lautterancam punah	yang sesuai. 3.Studi populasi dan/atau eksploitasi serta penanda genetik (DNA marker) biota lautterancam punah			
49	1.3. Peningkatan perlindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetic	Penyusunan Peta Status Kesehatan Terumbu Karang Indonesia	Tersusunnya Peta Status Kesehatan Terumbu Karang Indonesia	1 Peta Status Kesehatan Terumbu Karang Indonesia per tahun	1 Peta	1 Peta	1 Peta	1 Peta	1 Peta	BRIN	Kemenko Marves, KKP, Kemenparekraf, Kemenhub, BIG, dan Perguruan Tinggi	APBN (AP6)

1.4. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
1.4. Pengembangan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral sesuai dengan prinsip ekonomi biru dengan memperhatikan teknologi ramah lingkungan												
50	1.4. Pengembangan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral sesuai dengan prinsip ekonomi biru dengan memperhatikan teknologi ramah lingkungan	Studi Kelayakan Pembangunan PLTN Skala Komersial	Tersedianya rekomendasi kajian sistem energi nuklir sebagai data dukung pengambilan kebijakan dibidang energi	Dokumen Studi Kelayakan PLTN di Kalimantan Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	BRIN	Kemenko Marves, KemenESDM, dan KLHK	APBN (AP1)
51	1.4. Pengembangan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral sesuai dengan prinsip ekonomi biru dengan memperhatikan teknologi	Pengembangan Teknik AAN untuk Litbang Produk Kemaritiman dan Olahannya di Daerah Kasus <i>Stunting</i>	Tersedianya data riset kandungan mineral pada produk kemaritiman dan olahannya di daerah kasus <i>stunting</i> dengan teknik analisis aktivasi	Rekomendasi Kebijakan untuk Produk Kemaritiman dan Olahannya di Daerah Kasus <i>Stunting</i>	1 Dokumen (2021) 1 Dokumen (2020)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	BRIN	Kemenko Marves dan KKP	APBN (AP1)

ramah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	ramah lingkungan		neutron (AAN)									
1.6. Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, kearifan tradisional, kawasan konservasi, dan kelestarian lingkungan												
52	1.6. Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, kearifan tradisional, kawasan konservasi, dan kelestarian lingkungan	Penyediaan sarana dan prasarana laut guna mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	Terpenuhinya sarana prasarana laut Basarnas guna mendukung keselamatan transportasi dan kenyamanan wisatawan	1. Pemenuhan sarana SAR laut berupa Rescue Boat Kelas 1 2. Pemenuhan sarana SAR laut berupa Rescue Boat Kelas 2 3. Pemenuhan Sarana SAR laut berupa Rigid Inflatable Boat (RIB)	1: 1 2: 6 3: 12 4: 8	1: - 2: 6 (berlanjut) 3: 6 4: 4	1: - 2: 6 (selesai) 3: 15 4: 15	1: - 2: 6 3: 15 4: 15	1: - 2: 6 3: 15 4: 15	Basarnas	KemenPPN/ Bappenas dan Kemenkeu	APBN (AP1)

kelas 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
				kelas 1 4. Pemenuhan sarana SAR laut berupa <i>Rigid Inflatable Boat</i> (RIB) kelas 2								
53	1.6. Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, kearifan tradisional, kawasan konservasi, dan kelestarian lingkungan	Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (DP Prioritas: Lombok Mandalika, Morotai, Wakatobi, Labuan Bajo, Raja Ampat, Manado Likupang) + 2 DPP baru	Terselenggaranya perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III untuk mendukung 10 Destinasi Pariwisata Prioritas	Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (DP Prioritas: Lombok-Mandalika, Morotai, Wakatobi, Labuan Bajo, Raja Ampat, Manado Likupang) + 2 DPP baru (DPP)	8 Lokasi (2021) 8 Lokasi (2020)	8 Lokasi	-	-	-	Kemenparekraf	KKP, KemenPUPR, Kemenhub, KLHK, dan Pemda	APBN (AP1) dan/atau APBD

1.6. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
54	1.6. Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, kearifan tradisional, kawasan konservasi, dan kelestarian lingkungan	Pengembangan destinasi wisata alam dan buatan	Meningkatnya kualitas daya tarik wisata alam dan buatan di destinasi pariwisata	Pengembangan daya tarik wisata bahari dengan kriteria: 1. wisata pantai; 2. wisata bentang laut; dan 3. wisata bawah laut	- (2021) 1 Lokasi (2020)	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	Kememparekraf	KKP, KemenPUPR, Kemenhub, KLHK, dan Pemda	APBN (AP1) dan/atau APBD
55	1.6. Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, kearifan	Pemetaan produk pariwisata bahari yang berkelanjutan	Tersedianya basis data dan informasi tentang produk pariwisata bahari yang dapat dipasarkan	Jumlah dokumen pemetaan produk pariwisata bahari	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Kememparekraf	Kemenko Marves, KKP, Kemenhub, KemenPUPR, KLHK, dan Swasta	APBN (AP1)

tradisional . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	tradisional, kawasan konservasi, dan kelestarian lingkungan											
56	1.6. Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, kearifan tradisional, kawasan konservasi, dan kelestarian lingkungan	Penyusunan pola perjalanan produk pariwisata bahari	Mendukung 3 Destinasi Super Prioritas: Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado Likupang	Jumlah dokumen pola perjalanan produk pariwisata bahari	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	Kemenparekraf	Kemenko Marves, KKP, Kemenhub, KemenPUPR, KLHK, BRIN, dan Swasta	APBN (AP1) dan/atau Sumber lain yang sah
57	1.6. Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan	Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui MoU dengan 3 Destinasi	Meningkatkan jumlah MoU di 3 DSP; Lombok Mandalika, Labuan Bajo, Manado Likupang	Jumlah MoU Kemenparekraf dengan Pemprov, Pemda, dan Pelaku Industri	3 Dokumen (2021) 3 Dokumen (2020)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Kemenparekraf	-	APBN (AP1)

dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, kearifan tradisional, kawasan konservasi, dan kelestarian lingkungan	Super Prioritas (DSP) dan Asosiasi/Komunitas di 3 DSP		Pariwisata dan Ekonomi Kreatif								
58	1.6. Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, kearifan tradisional, kawasan konservasi, dan kelestarian lingkungan	Penataan dan pengelolaan jasa kelautan	Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam)	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan)	14 Kawasan	16 Kawasan	18 Kawasan	20 Kawasan	20 Kawasan	KKP	Kemenparekraf, Kemenhub, KemenPUPR, Kemendikbudristek, Pemda dan Swasta	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

1.6. Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
59	1.6. Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, kearifan tradisional, kawasan konservasi, dan kelestarian lingkungan	Pengembangan Ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi (Bahari: TN Wakatobi, TN Bunaken, TN Takabonerate)	Berkembangnya wisata alam bahari pada kawasan konservasi	Jumlah destinasi wisata alam bahari (Unit)	3 Unit (2021) 3 Unit (2020)	3 Unit	3 Unit	3 Unit	-	KLHK	KKP	APBN (AP1)
60	1.6. Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan dengan memperhatikan	Pengembangan 3 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP): Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang	Terbangunnya Desa Wisata Terpadu dalam rangka destinasi pariwisata prioritas nasional	Koordinasi Penyiapan Desa Wisata Terpadu	√	√	√	√	√	Kemenko Marves	Kemenparekraf, KKP, KLHK, Keminvest/BKPM, KmendesPDT, Pemda, dan Swasta	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber yang sah lainnya

kepentingan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	kepentingan masyarakat lokal, kearifan tradisional, kawasan konservasi, dan kelestarian lingkungan											
1.7. Pengembangan industri bioteknologi kelautan dan biofarmakologi laut dengan pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati												
61	1.7 Pengembangan industri bioteknologi kelautan dan biofarmakologi laut dengan pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati	Pengembangan Produk Teknologi Pangan Inovatif Berbasis Mikro Alga Laut Strain Indonesia (MALSAI)	Terselenggaranya Prioritas Riset Nasional terkait Pengembangan Produk Teknologi Pangan Inovatif Berbasis Mikro Alga Laut Strain Indonesia (MALSAI)	Persentase Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko terutama yang bersumber dari laut dan perikanan	58%	68%	90%	100%	100%	BPOM	Kemenperin	APBN (AP1)

1.7. Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
62	1.7 Pengembangan industri bioteknologi kelautan dan biofarmakologi laut dengan pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati	Pengembangan Produk Teknologi Pangan Inovatif Berbasis Mikro Alga Laut Strain Indonesia (MALSAI)	Tersedianya Prototype Produk Teknologi Pangan Inovatif Berbasis Mikro Alga Laut Strain Indonesia (MALSAI) sebagai bagian dari Prioritas Riset Nasional	Prototype Produk Pangan Inovatif Berbasis Mikro Alga Laut Strain Indonesia (MALSAI)	1 Prototype Produk Per Tahun	1 Prototype Produk Per Tahun	1 Prototype Produk Per Tahun	1 Prototype Produk Per Tahun	1 Prototype Produk Per Tahun	BRIN	Kemendikbud-ristek, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, dan Swasta	APBN (AP1) dan/atau Sumber lain yang sah
1.8. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara seimbang dan berkelanjutan												
63	1.8. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara seimbang dan berkelanjutan	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu	Berkembangnya Industri Garam Spesifikasi Industri untuk mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	Rekomendasi Kebijakan Penumbuhan Industri Garam Spesifikasi Industri	1 Rekomendasi Kebijakan (2021) 1 Rekomendasi Kebijakan (2020)	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	Kemenperin	Kemenko Marves, Kemenko Ekon, Kemendag, KKP, BPS, BPOM, BRIN, dan BSN	APBN (AP1)

1.8. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
64	1.8. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara seimbang dan berkelanjutan	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah (Lokasi: Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara)	Pengembangan produksi pala di wilayah adat di kepulauan	Kawasan Pala (Ha)	175 Ha (2021) 600 Ha (2020)	200 Ha	200 Ha	200 Ha	200 Ha	Kementan	Pemda	APBN (AP2) dan/atau APBD
65	1.8. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara seimbang dan berkelanjutan	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah (Lokasi: Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)	Pengembangan produksi lada di wilayah adat di kepulauan	Kawasan Lada (Ha)	125 Ha (2021) 225 Ha (2020)	-	100 Ha	100 Ha	100 Ha	Kementan	Pemda	APBN (AP2) dan/atau APBD

1.9. Penguatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
1.9. Penguatan sistem data dan informasi kelautan, inventarisasi, dan evaluasi sumber daya kelautan												
66	1.9. Penguatan sistem data dan informasi kelautan, inventarisasi, dan evaluasi sumberdaya kelautan	Pengelolaan Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya satu data dan tersedianya data produksi kelautan dan perikanan	Terkelolanya Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan (Kegiatan pertahun)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	KKP	BPS dan Kemenkominfo	APBN (AP1)
1.11. Pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan												
67	1.11. Pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan	Pelaksanaan pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (SAR)	Terpenuhinya potensi SAR yang terlatih	Jumlah potensi SAR yang mengikuti pelatihan (orang)	5.000 Orang	5000 Orang	10.000 Orang	10.000 Orang	10.000 Orang	Basarnas	Pemda, TNI, Polri, dan Swasta	APBN (AP6) dan/atau Sumber lain yang sah
68	1.11 Pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di	Peningkatan Kompetensi SDM Industri Perkapalan	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) industri perkapalan	Meningkatnya Kompetensi 1450 orang Lokasi: Kota Cikarang Kota	240 Orang (2021) 120 Orang (2020)	240 Orang	270 Orang	270 Orang	310 Orang	Kemenperin	Kemenhub, BRIN, dan BUMN	APBN (AP1) dan/atau Sumber lain yang sah

bidang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	bidang kelautan			Surabaya								
69	1.11 Pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan	Sertifikasi awak kapal perikanan	Meningkatnya sertifikasi awak kapal perikanan berdasarkan keahlian dan keterampilan	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (kumulatif) (orang)	12.000 Orang	13.000 Orang	14.000 Orang	15.000 Orang	15.000 Orang	KKP	Kemnaker, Kemenhub, dan Pemda	APBN (AP3) dan/atau APBD
70	1.11 Pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan	Penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan	Terselenggaranya pendidikan kelautan dan perikanan	Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	8.308 Orang (2021) 8.171 Orang (2020)	8.535 Orang	9.727 Orang	10.428 Orang	10.428 Orang	KKP	Kemendikbud-ristek	APBN (AP3)
71	1.11. Pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang	Pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan	Terselenggaranya pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan	Jumlah masyarakat kelautan perikanan yang dilatih (Orang)	15.000 Orang (2021) 10.000 Orang (2020)	25.000 Orang	50.000 Orang	58.000 Orang	58.000 Orang	KKP	Pemda	APBN (AP3) dan/atau APBD

kelautan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	kelautan											
72	1.11 Pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan	Pengelolaan kenelayanan	Kelembagaan usaha nelayan yang meningkat kapasitasnya	Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (kumulatif) (Kelompok)	2.400 Kelompok	2.550 Kelompok	2.750 Kelompok	3.000 Kelompok	3.000 Kelompok	KKP	BRIN dan Pemda	APBN (AP1) dan/atau APBD
73	1.11. Pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan	Penumbuhan wirausaha KP	Penguatan Jaminan Usaha Serta Korporasi Petani dan Nelayan	Jumlah wirausaha hasil KP yang ditumbuhkan (wirausaha)	200 Wirausaha (2021) 200 Wirausaha (2020)	200 Wirausaha	200 Wirausaha	200 Wirausaha	200 Wirausaha	KKP	KemenkopUKM	APBN (AP1)
74	1.11. Pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang	Peningkatan kapasitas lembaga usaha KP	Penguatan Jaminan Usaha Serta Korporasi Petani dan Nelayan	Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	30 Lembaga usaha (2021) 20 Lembaga usaha (2020)	35 Lembaga usaha	40 Lembaga usaha	45 Lembaga usaha	45 Lembaga usaha	KKP	KemenkopUKM	APBN (AP1)

kelautan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	kelautan			usaha)								
75	1.11. Pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan	Pelatihan Internasional / Regional/ Nasional untuk monitoring terumbu karang dan ekosistem laut dan pesisir	Terlaksananya training Internasional/ Regional/ Nasional tentang sequestrasi Karbon pada lamun.	Tersedianya Ahli Bidang Sekuestrasi Karbon pada Lamun dan Ahli Bidang Monitoring terumbu karang dan ekosistem laut.	30 Ahli Bidang Sekuestrasi Karbon pada Lamun (Internasional/ Regional Training); 50 Ahli Bidang Monitoring terumbu karang dan ekosistem laut (Nasional Training)	30 Ahli Bidang Sekuestrasi Karbon pada Lamun (Internasional/ Regional Training); 50 Ahli Bidang Monitoring terumbu karang dan ekosistem laut (Nasional Training)	30 Ahli Bidang Sekuestrasi Karbon pada Lamun (Internasional/ Regional Training); 50 Ahli Bidang Monitoring terumbu karang dan ekosistem laut (Nasional Training)	30 Ahli Bidang Sekuestrasi Karbon pada Lamun (Internasional/ Regional Training); 50 Ahli Bidang Monitoring terumbu karang dan ekosistem laut (Nasional Training)	30 Ahli Bidang Sekuestrasi Karbon pada Lamun (Internasional/ Regional Training); 50 Ahli Bidang Monitoring terumbu karang dan ekosistem laut (Nasional Training)	BRIN	Swasta	APBN (AP3)
76	1.12. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan	Penguatan sistem peringatan dini bencana	Terselenggaranya pemasangan sistem peringatan dini bencana	Jumlah sistem peringatan dini yang terpasang	2 Unit (2021) 2 Unit (2020)	2 Unit	2 Unit	2 Unit	-	BNPB	Pemda	APBN (AP6) dan/atau APBD

sistem . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	sistem informasi kelautan											
1.12. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan												
77	1.12. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan	Melaksanakan penguatan ketangguhan masyarakat	Terlaksananya kegiatan penguatan desa tangguh bencana	Jumlah kegiatan penguatan desa tangguh bencana	3 kegiatan (2021) 3 kegiatan (2020)	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	-	BNPB	Kemkenko Marves dan Pemda	APBN (AP6) dan/atau APBD
78	1.12. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan	Melaksanakan kegiatan mitigasi non struktural	Terlaksananya penguatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menerapkan SPAB	2 Satuan Pendidikan (2021) 2 Satuan Pendidikan (2020)	2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	-	BNPB	Pemda	APBN (AP6) dan/atau APBD

1.12. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
79	1.12. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan	Penyediaan infrastruktur dasar ketenagalistrikan di pulau-pulau kecil	Pembangunan pembangkit skala kecil di pulau-pulau kecil terluar	Tersedianya pasokan listrik di pulau-pulau kecil terluar	1. PLTD Hybrid Desa Rahangiar, P. Nuhu Yut (P. Kei Besar), Kab. Maluku Tenggara, Prov. Maluku; 2. PLTD Hybrid Desa Elat/ Rahareng, P. Nuhu Yut (P. Kei Besar), Kab. Maluku Tenggara, Prov. Maluku; 3. PLTD Hybrid Desa Arnau, P. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Prov. Maluku;	1. PLTS Hybrid 320 kWp Desa Rerean, P. Nuhu Yut (P. Kei Besar), Kab. Maluku Tenggara, Prov. Maluku; 2. PLTS Hybrid 250 kWp Desa Ustutun/ Liran, P. Liran, Kab. Maluku Barat Daya, Prov. Maluku; 3. PLTS Hybrid 240 kWp Desa Latalola Besar, P. Masela,	1. PLTD Hybrid Desa Tamangil Nuhuyanat, P. Nuhu Yut (P. Kei Besar), Kab. Maluku Tenggara, Prov. Maluku; 2. PLTD Hybrid Desa Hoko, P. Nuhu Yut (P. Kei Besar), Kab. Maluku Tenggara, Prov. Maluku; 3. PLTD Hybrid Desa Ngurko, P. Nuhu Yut (P. Kei Besar), Kab. Maluku Tenggara, Prov.	1. PLTD Hybrid Desa Esulit, P. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Prov. Maluku; 2. PLTD Hybrid Desa Klishatu, P. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Prov. Maluku; 3. PLTD Hybrid Desa Karbubu, P. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Prov. Maluku.	-	KemenESDM	Kemendagri, Kemenperin, KemendesPDTT, BUMN, dan Swasta	APBN (AP2) dan/atau Sumber lain yang sah

4. PLTD . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*					
					2021	2022	2023	2024	2025								
					4. PLTD Hybrid Desa Arwala, P. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Prov. Maluku;	Kab. Maluku Barat Daya, Prov. Maluku;	4. PLTS Hybrid 170 kWp Desa Arwala, P. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Prov. Maluku;	5. PLTD Hybrid Desa Ilwaki, P. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Prov. Maluku;	5. PLTS Hybrid 200 kWp Desa Eray, P. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Prov. Maluku;	6. PLTD Hybrid Desa Latalola Besar, P. Masela,	6. Extend Grid, Desa Kawio, P. Sangihe,						

Kab. . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
					Kab. Maluku Barat Daya, Prov. Maluku.	Prov. Sulut; 7. Extend Grid, Desa Marore, P. Marore, Kab. Sangihe, Prov. Sulut.						
80	1.12. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan	Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi	Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana Geologi	Jumlah Sistem Mitigasi Bencana Geologi yang Dikembangkan (Lokasi)	17 Lokasi	17 Lokasi	17 Lokasi	17 Lokasi	-	KemenESDM	KemenPPN/ Bappenas, KemenPUPR, KKP, KLHK, KemenATR/BPN, BNPB, BIG, BRIN, Kemenperin, Kementan, BRGM, Perguruan Tinggi, dan Swasta	APBN (AP6) dan/atau Sumber lain yang sah
81	1.12. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi,	Diklat pemberdayaan masyarakat (khusus nelayan)	Terselenggaranya <i>Basic Safety Training</i> (BST) bagi Nelayan	Jumlah Lulusan (orang)	1.695 (orang) (2021) 17.550 (orang) (2020)	28.710 (orang)	28.650 (orang)	28.885 (orang)	28.800 (orang)	Kemenhub	Pemda	APBN (AP3)

riset . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan											
82	1.12. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan	Program penyediaan akses IPTEK, lahan, dan pembiayaan bagi pengembangan usaha nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam	Jumlah teknologi yang dikembangkan	Teknologi yang dikembangkan	Kegiatan Penelitian Insentif Riset Nasional (SBKU): 2 Teknologi yang Dikembangkan (Teknologi Garam, Teknologi Ikan Fufu) Kegiatan Penelitian Flagship Riset Nasional: 4 teknologi: (Kapal Harbour Tugboat (Kapal Tunda Bahan Bakar Ganda); Kapal Mini LNG (Kapal Pengangkut Gas Alam Cair);	-	-	-	-	BRIN	-	APBN (AP1)

Wahana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
					Wahana Angkut Alpo; Pengolahan Makanan Hasil Laut) Program Pengembangan Teknologi Industri: 16 teknologi Prototipe Teknologi untuk masyarakat: 3 teknologi (dari 55 prototipe, 3 diantaranya terkait pengelolaan perikanan)							
83	1.12. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem	Pengembangan Produk Inovasi yang mendukung Pengembangan Industri Strategis Perikanan	Berkembangnya inovasi teknologi pengolahan perikanan	Inovasi teknologi pengolahan perikanan	Kegiatan Penelitian Insentif Riset Nasional (SBKU): 2 inovasi teknologi pengolahan perikanan	-	-	-	-	BRIN	Kemenperin	APBN (AP1)

informasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*	
					2021	2022	2023	2024	2025				
	informasi kelautan				Kegiatan Penelitian Flagship Riset Nasional: 4 inovasi teknologi: (Kapal Harbour Tugboat (Kapal Tunda Bahan Bakar Ganda); Kapal Mini LNG (Kapal Pengangkut Gas Alam Cair); Wahana Angkut Alpo; Pengolahan Makanan Hasil Laut) Program Pengembangan Teknologi Industri: 16 inovasi teknologi Prototipe Teknologi untuk								

masyarakat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
					masyarakat: 3 teknologi (dari 55 prototipe, 3 diantaranya terkait pengolahan perikanan)							
84	1.12. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan	Penelitian dan pengembangan iptek kelautan dan perikanan	Tersedianya teknologi hasil riset kelautan dan perikanan	Jumlah teknologi hasil riset kelautan dan perikanan	25 Produk (2021) 29 Produk (2020)	-	-	-	-	KKP	KKP	APBN (AP3)
85	1.12. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi	Utilitas dan Pemetaan Kebutuhan Bahan Baku UPI	Meningkatnya utilitas Unit Pengolah Ikan (UPI) dalam rangka bina mutu produk perikanan	Presentase Utilitas UPI (persen)	66%	67%	68%	70%	70%	KKP	Kemenperin	APBN (AP1)

kelautan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	kelautan											
86	1.12. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan	Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan peningkatan infrastruktur pengawasan	Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah satelit LAPAN yang digunakan untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	-	Sistem Informasi Posisi Kapal	A4 dan Sistem Informasi Posisi Kapal	A4, A5, dan Sistem Informasi Posisi Kapal	-	BRIN	Kemenko Marves, KKP, dan Bakamla	APBN (AP1)
87	1.12. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan	Penyediaan peta distribusi dan produk pendukung tata kelola budidaya perikanan	Tersedianya Informasi Tematik Budidaya Perikanan	Jumlah informasi tematik Potensi budidaya perikanan (rumput laut dan kerapu) berbasis penginderaan jauh	Rumput Laut (15 Provinsi), Kerapu (31 Provinsi)	Rumput Laut (16 Provinsi), Kerapu (31 Provinsi)	Rumput Laut (16 Provinsi), Kerapu (31 Provinsi)	Rumput Laut (16 Provinsi), Kerapu (31 Provinsi)	Rumput Laut (16 Provinsi), Kerapu (31 Provinsi)	BRIN	Kemenko Marves, KKP, dan BIG	APBN (AP1)

1.12. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
88	1.12. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan	Penyediaan Informasi cuaca dan musim untuk pengelolaan garam (PSTA)	Tersedianya Informasi Tematik cuaca dan musim untuk pengelolaan garam (PSTA)	Prediksi cuaca dan musim untuk pengelolaan garam (PSTA)	-	-	-	1 lokasi dengan validasi lapangan	1 lokasi dengan validasi lapangan	BRIN	Kemenko Marves, KKP, dan BUMN	APBN (AP1)
89	1.12. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan	Diseminasi teknologi Penerbangan dan Antariksa untuk pemanfaatan potensi daerah	Meningkatnya kemampuan Pemda dalam pemanfaatan data penginderaan jauh	Jumlah Pemda yang mengikuti bimtek pengolahan data citra satelit penginderaan jauh	-	3 Pemda	3 Pemda	3 Pemda	3 Pemda	BRIN	KKP, BIG, dan Pemda	APBN (AP3) dan/atau Sumber lain yang sah
90	1.12. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan	Penyediaan informasi tematik terumbu karang	Tersedianya informasi tematik terumbu karang berbasis penginderaan	Jumlah informasi tematik terkait kondisi terumbu karang berbasis	12 Pulau Terkecil Terluar	24 Pulau Terkecil Terluar	36 Pulau Terkecil Terluar	48 Pulau Terkecil Terluar	60 Pulau Terkecil Terluar	BRIN	KKP dan BIG	APBN (AP6)

pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	pengembangan sistem informasi kelautan		jauh	penginderaan jauh								
91	1.12. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan	Penyediaan informasi kondisi perairan laut dalam	Tersedianya informasi kondisi perairan laut dalam berbasis penginderaan jauh dan model numerik	1. Informasi kondisi perairan Laut Dalam untuk perikanan tangkap tuna berbasis penginderaan jauh 2. Informasi prediksi kondisi laut berbasis model numerik (SST, arus, gelombang tinggi, klorofil-a	2 Informasi SST dan Klorofil; 2 Informasi prediksi SST dan klorofil-a di wilayah Indonesia dengan resolusi waktu 3 hari mendatang dan resolusi spasial 15 kilometer	2 Informasi SST dan Klorofil; 3 Informasi prediksi SST dan klorofil-a di wilayah Indonesia dengan resolusi waktu 3 hari mendatang dan resolusi spasial 5 kilometer	2 Informasi SST dan Klorofil; 4 Informasi prediksi: SST, arus, klorofil-a dan gelombang tinggi di wilayah Indonesia dengan resolusi waktu 5 hari mendatang dan resolusi spasial 5 kilometer	2 Informasi SST dan Klorofil; 4 Informasi prediksi: SST, arus, klorofil-a, dan gelombang tinggi di wilayah Indonesia dengan resolusi waktu 5 hari mendatang dan resolusi spasial 5 kilometer	2 Informasi SST dan Klorofil 5 Informasi prediksi SST, arus, klorofil-a, gelombang tinggi, dan salinitas di wilayah Indonesia dengan resolusi waktu 7 hari mendatang dan resolusi spasial 5 kilometer	BRIN	Kemenko Marves, KKP, dan BRIN	APBN (AP1)

1.12. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
92	1.12. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan	Pengembangan dan Penguatan Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS)	Penguatan sistem peringatan dini bencana (PN 6)	Jumlah InaBuoy (13) Jumlah InaCBT (7) Jumlah InaCAT (3) Jumlah InaTOC 1	1. Pemasangan dan Operasional InaBuoy di 11 lokasi 2. Pembuatan 4 Set InaBuoy (sebagai cadangan) 3. Penggelaran dan Operasional InaCBT di 2 lokasi; Labuan Bajo dan Rokatenda. 4. Peningkatan kapasitas operasional InaCAT di Perairan Utara Bali 5. Revisi DED InaCBT Selat Makasar 6. Operasional	1. Pemasangan InaBuoy di 2 lokasi 2. Operasional InaBuoy di 13 lokasi 3. Operasional 2 InaCBT Labuhan Bajo dan Rokatenda 4. Pra Penggelaran Selat Makassar. 5. FS, DTS, DED InaCBT Banda Naira 6. Operasional Perairan	1. Operasional dan Perawatan InaBuoy di 13 lokasi 2. Operasional 2 InaCBT Labuhan Bajo dan Rokatenda 3. Penggelaran InaCBT Selat Makassar 4. Operasional InaCAT di Perairan Selat Sunda 5. Pra Penggelaran InaCBT Banda Naira 6. FS, DTS, dan DED InaCBT Sipora 7. DTS dan Pra AdvancedCB	1. Operasional dan Perawatan InaBuoy di 13 lokasi 2. Operasional dan perawatan InaCBT di 3 lokasi 3. Operasional dan perawatan InaCAT di 3 lokasi (Perairan Bali, Palu, Selat Sunda) 4. Penggelaran InaCBT Sipora 5. Proposal Pendanaan Internasional DED Advanced CBT (Krui Pelabuhan Ratu Cilacap) -Bluebook Bappenas	1. Operasional dan Perawatan InaBuoy di 13 lokasi 2. Operasional dan perawatan InaCBT di 4 lokasi 3. Operasional dan perawatan InaCAT di 3 lokasi (Perairan Bali, Palu, Selat Sunda) 4. Penggelaran InaCBT Sipora 5. Proposal Pendanaan Internasional DED Advanced CBT (Krui Pelabuhan Ratu Cilacap) -Bluebook Bappenas	BRIN	KemenPPN/ Bappenas, KKP, Kemenhub, KLHK, BMKG, BIG, TNI, BNPB, Bakamla, BUMN, dan Pemda	APBN (AP6) dan/atau Sumber lain yang sah

InaTOC . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
					InaTOC	Palu 7.Operasi- onal InaTOC 8.FS Advanced CBT (Krui Pelabuhan Ratu Cilacap)	T (Krui, Pelabuhan Ratu, Cilacap)	Ratu, Cilacap).				
93	1.12. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan	Desain Pembangun- an Berdaya Saing dan Inklusif bagi Petani dan Nelayan Kecil	Prioritas Riset Nasional Pengembang- an Sosial Ekonomi Inklusif dan Pembangun- an Maritim	Tersedianya <i>Policy Paper</i>	1 <i>Policy Paper</i> Per- Tahun	1 <i>Policy Paper</i> Per- Tahun	1 <i>Policy Paper</i> per-Tahun	1 <i>Policy Paper</i> per-Tahun	1 <i>Policy Paper</i> per-Tahun	BRIN	Kemenko Marves, KKP, dan Kemendagri	APBN (AP1)
94	1.12. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan	Pendidikan dan Pelatihan SDM di lingkungan KorPolairudB aharkam	Meningkat- kan kemajuan SDM di lingkungan KorPolairud Baharkam	Jumlah anggota kor Polairud yang melaksanakan pendidikan Ahli Nautika (ANT) dan Ahli	309 personel	357 personel	405 personel	453 personel	501 personel	Polri	Kemenuh	APBN (AP3)

pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	pengembangan sistem informasi kelautan	Polri di bidang kelautan	Polri di bidang kelautan	Tehnika (ATT)								
95	1.12. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan	Sertifikasi Penyidik Polair	Meningkatkan profesionalisme penyidik Polair	Jumlah penyidik Polair yang memiliki sertifikasi bertambah	50 personel	50 personel	50 personel	50 personel	50 personel	Polri	-	APBN (AP3)
1.13. Peningkatan gizi masyarakat kelautan												
96	1.13. Peningkatan gizi masyarakat kelautan	1. Pelaksanaan dukungan percepatan terhadap: Penanggulangan Kurang Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil;	Terlaksananya Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan <i>Stunting</i> (khususnya di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau	1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK); 2. Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan	1: Penanggulangan KEK pada ibu hamil hingga prevalensi turun menjadi 14,5% 2: Persentase kabupaten/kota dengan	1: Penanggulangan KEK pada ibu hamil hingga prevalensi turun menjadi 13,0% 2: Persentase kabupaten/kota dengan	1: Penanggulangan KEK pada ibu hamil hingga prevalensi turun menjadi 11,5% 2: Persentase kabupaten/kota dengan	1: Penanggulangan KEK pada ibu hamil hingga prevalensi turun menjadi 10,0% 2: Persentase kabupaten/kota dengan	1: Penanggulangan KEK pada ibu hamil hingga prevalensi turun menjadi 8,5% 2: Persentase kabupaten/kota dengan	Kemenkes	KKP dan BPS	APBN (AP3)

Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
		Penyediaan obat gizi Suplementasi gizi mikro pada balita 2. Pelaksanaan surveilans gizi di kabupaten/ kota	Kecil)	obat gizi; 3. Jumlah balita yang mendapatkan suplementasi zat gizi mikro (taburia); 4. Persentase kabupaten/ kota yang melaksanakan surveilans gizi.	ketersediaan obat gizi: 100% 3: Suplementasi zat gizi mikro (taburia) pada 140.000 balita 4: Pelaksanaan surveilans gizi di kabupaten/ kota sebesar 70% dari seluruh kabupaten/ kota yang ada	kota dengan ketersediaan obat gizi: 100% 3: Suplementasi zat gizi mikro (taburia) pada 190.000 Balita 4: Pelaksanaan surveilans gizi di kabupaten/ kota sebesar 90% dari seluruh kabupaten/ kota yang ada	ketersediaan obat gizi: 100% 3: Suplementasi zat gizi mikro (taburia) pada 240.000 Balita 4: Pelaksanaan surveilans gizi di kabupaten/ kota sebesar 100% dari seluruh kabupaten/ kota yang ada	ketersediaan obat gizi: 100% 3: Suplementasi zat gizi mikro (taburia) pada 290.000 Balita 4: Pelaksanaan surveilans gizi di kabupaten/ kota sebesar 100% dari seluruh kabupaten/ kota yang ada	ketersediaan obat gizi: 100% 3: Suplementasi zat gizi mikro (taburia) pada 340.000 Balita 4: Pelaksanaan surveilans gizi di kabupaten/ kota sebesar 100% dari seluruh kabupaten/ kota yang ada			
97	1.13. Peningkatan gizi masyarakat kelautan	Terpenuhinya kebutuhan Dasar Keluarga Miskin dan rentan melalui	Mendukung pelaksanaan RPJMN terkait (1) <i>Major Project</i> (MP) Integrasi	Jumlah Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pangan	12.638.150 Keluarga (2021) 16.717.016 Keluarga (2020)	12.638.150 Keluarga	12.638.150 Keluarga	12.638.150 Keluarga	-	Kemensos	Kemenko PMK, KemenPPN/ Bappenas, dan Kemenkeu	APBN (AP3)

program . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 77 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
		program sembako	Bansos menuju skema perlindungan sosial menyeluruh; dan (2) PP (Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, (KP) bantuan Sosial dan Subsidi tepat sasaran	melalui program sembako. Target lokasi berdasarkan Jumlah PKM padaprovinci yang disebutkan dalam Kepres Nomor 6 tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Terpencil terluar di antaranya: Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Papua,								

Maluku . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
				Maluku, Nusa Tenggara, Timur Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh								
1.14. Peningkatan perlindungan ketenagakerjaan												
98	1.14. Peningkatan perlindungan ketenagakerjaan	Perlindungan nelayan dengan asuransi	Tersalurkan-nya bantuan premi asuransi nelayan	Jumlah bantuan premi asuransi nelayan yang tersalurkan (Orang)	120.000 Orang	120.000 Orang	120.000 Orang	120.000 Orang	120.000 Orang	KKP	Kemenaker	APBN (AP1)

1.15. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
1.15. Peningkatan pendidikan dan penyadaran masyarakat kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, jenjang pendidikan												
99	1.15. Peningkatan pendidikan dan penyadaran masyarakat kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, jenjang pendidikan	Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Terlaksananya kampanye Gemarikan untuk mendukung Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan <i>Stunting</i>	Jumlah lokasi promosi Gemarikan (Provinsi)	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	KKP	-	APBN (AP1)
1.21. Peningkatan tata kelola ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta agenda riset kelautan strategis												
100	1.21. Peningkatan tata kelola ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta agenda riset kelautan strategis	Inovasi Teknologi Alat Angkut Maritim	Infrastruktur Kelautan (AP 3)	1. 3 (tiga) Produk Inovasi Teknologi Industri Perkapalan (Wahana Angkut Maritim): Inovasi teknologi <i>Harbour Tug</i> ; Inovasi Teknologi Kapal Mini	L1: Tersertifikasi DED Wahana ALPO (2021) L2: Kinerja hidrodinamika Kapal Angkut LNG, Kapal Dual <i>Fuel Harbour Tug</i> , Wahana Angkut ALPO; L2: <i>Approval</i>	L1: Tersertifikasi DED <i>Harbour Tug dual fuel</i>	L0: Inovasi <i>Converter Kit Harbour Tug Dula</i> FuelInovasi Tanki Kapal Mini LNG L1: Tersertifikasi DED Kapal Mini LNG	-	-	BRIN	KemenESDM, Kemenhub, Kemenperin, BUMN, Perguruan Tinggi, dan Swasta	APBN (AP3) dan/atau Sumber lain yang sah

LNG . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
				LNG; Inovasi Teknologi Wahana Angkut ALPO	<i>Design Keyplan Drawing Wahana ALPO (2020)</i>							
101	1.21. Peningkatan tata kelola ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta agenda riset kelautan strategis	<i>Clearing Technology Inovasi Tanggul Laut</i> untuk mendukung Program National <i>Capital Integrated Coastal Development (NCICD)</i>	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	Jumlah <i>Clearing Technology Inovasi Tanggul Laut</i> untuk mendukung Program National <i>Capital Integrated Coastal Development (NCICD)</i>	Survei Hidro-oseanografi, Hasil Pemodelan Numerik Hidrodinamika Muara Cisadane, Uji Model Fisik dan Kliring Desain Alternatif Struktur Tanggul (2021) Hasil Pemodelan Numerik Hidrodinamika Teluk Jakarta dan Kliring Desain	Prototipe Demplot untuk Uji Lapangan dan Data awal uji lapangan	Hasil Uji Lapangan dan Desain Detil Alternatif Desain Tanggul Laut	Rekomendasi Desain Alternatif Struktur Tanggul Waduk Laut untuk NCICD	-	BRIN	KemenPPN/ Bappenas, KemenPUPR, dan Kemenhub	APBN (AP6)

Awal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
					Awal Struktur Tanggul (2020)							
102	1.21. Peningkatan tata kelola ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta agenda riset kelautan strategis	Penilaian Lingkungan Laut Nasional (<i>National Ocean Assessment/NOA</i>)	Terlaksananya Penilaian Lingkungan Laut Nasional (<i>National Ocean Assessment/NOA</i>) untuk memperkuat landasan ilmiah pengambilan kebijakan bidang kemaritiman dan sebagai kontribusi Indonesia dalam <i>World Ocean Assessment ke-3</i> .	Terbentuknya <i>pool of expert</i> , penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kajian status lingkungan laut termasuk aspek sosial ekonomi dan dukungan dalam pelaporan Penilaian Lingkungan Laut secara regional maupun global (<i>World Ocean Assesment, 3rd cycle</i>)	√	√	√	√	√	Kemenko Marves	KKP, BMKG, BNPB, dan BRIN	APBN (AP1)

1.21. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
103	1.21. Peningkatan tata kelola ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta agenda riset kelautan strategis	Penyusunan Studi Kasus Kebijakan Kelautan	Peningkatan Kualitas proses penyusunan kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	Kumpulan Studi Kasus Kebijakan Kelautan	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	LAN	Kemenko Marves	APBN (AP4)
104	1.21. Peningkatan tata kelola ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta agenda riset kelautan	Pengukuran indeks Kualitas Kebijakan Kemaritiman dan Investasi	Peningkatan Kualitas proses penyusunan kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	Dokumen IKK bidang kemaritiman dan investasi rekomendasi Kebijakan dan peningkatan kualitas kebijakan bidang kemaritiman dan investasi	1 Laporan	-	1 Laporan	-	-	LAN	Kemenko Marves, KemenESDM, KKP, Kemenhub, Kemenparekraf, KemenPUPR, KLHK, dan Keminvest/BKPM	APBN (AP1)

strategis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	strategis											
105	1.21. Peningkatan tata kelola ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta agenda riset kelautan strategis	Penguatan sistem peringatan dini bencana	Lokasi Riset Interdisiplin Indonesia <i>Early Warning System</i> (InaTEWS)	Jumlah Lokasi Riset Interdisiplin Indonesia <i>Early Warning System</i> (lokasi)	3 Lokasi (2021) 3 Lokasi (2020)	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	BRIN	BMKG, BRIN, TNI, BIG, dan BNPB	APBN (AP6)

MATRIKS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

MATRIKS PILAR KKI KE-2: PERTAHANAN, KEAMANAN, PENEGAKAN HUKUM, DAN KESELAMATAN DI LAUT

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
2.2. Peningkatan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di seluruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, serta di luar wilayah yurisdiksi sesuai hukum internasional												
1	2.2. Peningkatan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di seluruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, serta di luar wilayah yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional	Peningkatan operasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia	1. Operasi keamanan dan Keselamatan Laut 2. Operasi Laut Bersama Terkoordinasi Bilateral 3. Menurunnya Kasus Kejahatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia	1. Jumlah Hari Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut 2. Jumlah Kegiatan Operasi Laut Bersama Terkoordinasi Bilateral 3. Angka Kasus Pelanggaran Hukum dan Gangguan Keamanan di Laut	1: 90 2: 6 3: 265 (2021) 1: 16 2: 5 3: 285 (2020)	1: 90 2: 6 3: 246	1: 90 2: 6 3: 224	1: 90 2: 6 3: 202	-	Bakamla	Kemhan, KKP, Kemenhub, Kemenkeu, Kemenkumham, BRIN, BNN, BSSN, Basarnas, TNI, dan Polri	APBN (AP7)

2.2. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
2	2.2. Peningkatan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di seluruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, serta di luar wilayah yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional	Pelatihan Personel Keamanan Laut terkait Keamanan Nuklir	Meningkatnya Kapabilitas Teknis Personel Keamanan Laut	Jumlah Pelatihan yang dilaporkan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Bapeten	Kemenkeu, Kemenkes, Kemenhub, TNI, Polri, Bakamla, BIN, BNPT, BUMN, dan Swasta	APBN (AP7) dan/atau Sumber lain yang sah
3	2.2. Peningkatan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di seluruh wilayah perairan dan wilayah	Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran penempatan G to G	Meningkatnya penempatan Awak Kapal Perikanan Migran Skema G to G	Jumlah penempatan Awak Kapal Perikanan Migran Skema G to G (Orang)	1.000 Orang (2021) 1.000 Orang (2020)	1.200 Orang	1.300 Orang	1.400 Orang	1.500 Orang	BP2MI	Kemlu, Kemenaker, Kemenhub, KKP, dan Swasta	APBN (AP7) dan/atau Sumber lain yang sah

yurisdiksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	yurisdiksi, serta di luar wilayah yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional											
4	2.2. Peningkatan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di seluruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, serta di luar wilayah yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional	Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran	Meningkatnya pelayanan penempatan Awak Kapal Perikanan Migran	Jumlah penempatan Awak Kapal Perikanan Migran (Orang)	2.000 Orang (2021) 2.000 Orang (2020)	2.200 Orang	2.300 Orang	2.400 Orang	2.500 Orang	BP2MI	Kemlu, Kemenaker, Kemenhub, KKP, Kemendag, dan Swasta	APBN (AP7) dan/atau Sumber lain yang sah

2.2. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
5	2.2. Peningkatan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di seluruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, serta di luar wilayah yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional	Meningkatkan fungsi Pusinformar dengan melengkapi sarana dan prasarana utama dan pendukungnya serta membangun Sarpras TNI terintegrasi di Natuna	Terciptanya peningkatan kemampuan dan kinerja dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan menjaga keamanan wilayah yurisdiksi nasional	1. Persentase perkembangan pembangunan sarana dan prasarana Pusinfomar 2. Persentase perkembangan pembangunan sarana dan prasarana TNI terintegrasi di Natuna	1: 50% 2: 30 %	1: 75% 2: 50%	1: 90% 2: 70%	1: 95% 2: 90%	1: 100% 2: 100%	Kemhan	TNI, Kemenko Marves, Kemlu, KKP, KKP, Kemenkeu, Bakamla, Polri, dan Swasta	APBN (AP7) dan/atau Sumber lain yang sah
6	2.2. Peningkatan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di seluruh wilayah perairan dan wilayah	Penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketahanan maritim yang melibatkan Pokmaswas secara terpadu	Jumlah kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP (kelompok)	1.050 Kelompok (2021) 965 Kelompok (2020)	1.100 Kelompok	1.150 Kelompok	1.200 Kelompok	1.250 Kelompok	KKP	Kemenko Marves dan BNPP	APBN (AP3)

yurisdiksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	yurisdiksi, serta di luar wilayah yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional											
7	2.2. Peningkatan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di seluruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, serta di luar wilayah yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional	Penyediaan data satelit Lapan dalam mendukung pemantauan wilayah perairan Indonesia	Tersedianya data <i>Automatic Identification System</i> (AIS) seluruh wilayah perairan Indonesia	Data AIS satelit Lapan yang digunakan untuk mendukung pemantauan wilayah perairan Indonesia (Jumlah data AIS)	-	-	1 Dataset AIS	1 Dataset AIS	1 Dataset AIS	BRIN	Kemenko Marves, KKP, Kemenhub, dan Bakamla	APBN (AP7)

2.2. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
8	2.2. Peningkatan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di seluruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, serta di luar wilayah yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional	Patroli Wilayah Perbatasan Perairan	Terwujudnya situasi wilayah perairan yang aman dan kondusif; menurunnya gangguan kamtibmas di wilayah perbatasan perairan (Perbatasan dengan Malaysia, Singapore, Vietnam, Philipina, Timor Leste)	Jumlah Jam Patroli di wilayah perbatasan perairan	366 Jam	380 Jam	394 Jam	408 Jam	422 Jam	Polri	Kemhan, KKP, Kemenhub, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, KLHK, Kemlu, KemenESDM, KemenBUMN, BNN, TNI, Bakamla, Kejaksaan, dan BMKG	APBN (AP7)

2.2. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
9	2.2. Peningkatan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di seluruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, serta di luar wilayah yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional	Patroli Selat Malaka	Terjaganya Kamtibmas wilayah perairan di selat Malaka khususnya terkait ALKI 1	Jumlah jam patroli di wilayah selat Malaka	1.088 Jam	1.123 Jam	1.158 Jam	1.193 Jam	1.228 Jam	Polri	Kemhan, KKP, Kemenhub, Kemenkeu, Kemlu, Kemenkumham, TNI, Bakamla, Kejaksaan, dan BMKG	APBN (AP7)
2.3. Peningkatan pembangunan kawasan perbatasan di laut dan pulau-pulau kecil terluar												
10	2.3. Peningkatan pembangunan kawasan perbatasan di laut dan pulau-pulau kecil terluar	Survei Identifikasi/ Inventarisasi Pilar Titik Referensi (TR) Batas Negara Wilayah Laut	Penegasan Batas Wilayah Negara Untuk Menegakkan Kedaulatan NKRI	Jumlah Peta Batas Negara yang dihasilkan	410.000 Km ² (Luas Pulau Kecil: 2033 Km ² ; Luas Landas Kontinen 407,967 Km ²)	3.800 Km ² (Luas Pulau Kecil: 1400 Km ² ; Luas Landas Kontinen 2400 Km ²)	3.700 Km ² (Luas Pulau Kecil: 500 Km ² ; Luas Landas Kontinen 500 Km ²)	3.800 Km ² (Luas Pulau Kecil: 1000 Km ² Luas Landas Kontinen 1000 Km ²)	100.000 Km ²	BIG	Kemhan, Kemlu, BNPP, dan TNI	APBN (AP7)

2.3. Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
11	2.3. Peningkatan pembangunan kawasan perbatasan di laut dan pulau-pulau kecil terluar	Survei Identifikasi/ Inven arisasi Pilar Titik Referensi (TR) Batas Negara Wilayah Laut	Penegasan Batas Wilayah Negara Untuk Menegakkan Kedaulatan NKRI	Terpeliharanya Titik Referensi (TR) Batas Negara Wilayah Laut	P. Mangkai, Kab. Kep Anambas, Kepri; P. Senoa, Kab. Kep Natuna, Riau; P. Kawaluso, Kab. Kep Sangihe, Sulut (2021) Tokong Nanas, Kab. Kep Anambas, Kepri; P. Karang, Kab. Kep. Aru, Maluku (2020)	P. Kawio, Kab. Kep Sangihe, Sulut; P. Marampit, Kab. Kep Talaud, Sulut; P. Jiew, Kab. Halteng, prov. Malut	P. Simelucut, Kab. Simeuleu, Aceh; P. Selaut Besar, Kab. Simeuleu, Aceh; P. Rusa, Kab. Aceh Besar, Aceh	P. Fani, Kab. Raja Ampat, Papua Barat; P. Budd, Kab. Raja Ampat, Papua Ampat; P. Batu Kecil, Kab. Pesisir barat, Lampung	-	BNPP	Kemhan, Kemlu, TNI, dan BIG	APBN (AP7)
2.5. Penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi												
12	2.5. Penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi	Meningkatnya penanganan perkara tindak pidana perikanan	Tercapainya penanganan perkara tindak pidana perikanan sesuai regulasi yang berlaku	Rekapitulasi data perkara <i>illegal fishing</i> di seluruh Indonesia	Rekapitulasi tiap triwulan	Rekapitulasi tiap triwulan	Rekapitulasi tiap triwulan	Rekapitulasi tiap triwulan	Rekapitulasi tiap triwulan	Kejaksaan	Kemhan, KKP, Kemenkumham, TNI, dan Polri	APBN (AP7)

2.5. Penegakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
13	2.5. Penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi	Peningkatan operasi penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi nasional	Tegaknya kedaulatan negara, terjaganya keutuhan wilayah NKRI, dan terlindunginya keselamatan bangsa Indonesia di wilayah laut NKRI	1. Persentase pelanggaran wilayah laut yang ditangani TNI Angkatan Laut 2. Persentase tingkat kepatuhan pengguna laut	1: 100 % 2: 98%	1:100 % 2: 99%	1: 100%2: 100%	1: 100%2: 100%	1: 100%2: 100%	Kemhan	TNI, KKP, Kemenkeu, Kemenhub, Bakamla, dan Polri	APBN (AP7)
14	2.5. Penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi	Penyelesaian Tindak Pidana di laut	Terselesaikannya segala bentuk kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan yang berimplikasi terhadap kontijensi	Jumlah Kasus Keamanan Laut yang ditangani	119 kasus	131 kasus	144 kasus	158 kasus	173 kasus	Polri	Kemhan, Kemenhub, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, KLHK, Kemlu, KemenESDM, KemenBUMN, KKP, TNI, Bakamla, dan Kejaksaan	APBN (AP7)

2.5. Penegakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
15	2.5. Penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi	Penyelesaian Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	Terselesaikannya segala bentuk Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	Jumlah Kasus <i>Illegal Fishing</i> yang ditangani	156 kasus	159 kasus	164 kasus	166 kasus	169 kasus	Polri	Kemhan, Kemenhub, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, KLHK, Kemlu, KemenESDM, KemenBUMN, KKP, TNI, Bakamla, dan Kejaksaan	APBN (AP7)
2.7. Pembangunan karakter bangsa yang berorientasi kelautan dalam upaya bela negara												
16	2.7. Pembangunan karakter bangsa yang berorientasi kelautan dalam upaya bela negara	Pembentukan dan Pembinaan Jaringan masyarakat pesisir untuk mencegah dan meredam konflik	Menurunnya potensi konflik di wilayah pesisir dan laut	Jumlah wilayah yang dikunjungi, berdasarkan Zona. (Zona 1 Wilayah Jawa; Zona 2 Wilayah Sumatera; Zona 3 Wilayah Bali NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara; Zona 4 Wilayah Kalimantan	Zona 1 (2 lokasi) Zona 2 (2 lokasi) Zona 3 (2 lokasi) Zona 4 (2 lokasi)	Zona 1 (2 lokasi) Zona 2 (2 lokasi) Zona 3 (2 lokasi) Zona 4 (2 lokasi)	Zona 1 (2 lokasi) Zona 2 (2 lokasi) Zona 3 (2 lokasi) Zona 4 (2 lokasi)	Zona 1 (2 lokasi) Zona 2 (2 lokasi) Zona 3 (2 lokasi) Zona 4 (2 lokasi)	Zona 1 (2 lokasi) Zona 2 (2 lokasi) Zona 3 (2 lokasi) Zona 4 (2 lokasi)	Polri	Kemenkeu, KKP, Kemenhub, KLHK, dan Pemda	APBN (AP7) dan/atau APBD

dan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
				dan Sulawesi)								
17	2.7. Pembangunan karakter bangsa yang berorientasi kelautan dalam upaya bela negara	Pembinaan dan penyuluhan pada pengguna jasa perairan	Terjalannya kemitraan antara pengguna jasa perairan dan Polri	Jumlah kegiatan untuk menjalin kemitraan dengan pengguna jasa perairan	240 kegiatan	245 kegiatan	250 kegiatan	255 kegiatan	260 kegiatan	Polri	Kemenhub, KKP, Kemenkeu, KemenESDM, BMKG, dan Pemda	APBN (AP7) dan/atau APBD
18	2.7. Pembangunan karakter bangsa yang berorientasi kelautan dalam upaya bela negara	Pemolisian masyarakat pesisir dan perairan (<i>Community Policing</i>)	Terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat pesisir dan perairan	Jumlah kegiatan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat pesisir dan perairan	50 kegiatan	50 kegiatan	50 kegiatan	50 kegiatan	50 kegiatan	Polri	Kemenhub, KKP, Kemenkeu, BMKG, dan Pemda	APBN (AP7) dan/atau APBD
19	2.7. Pembangunan karakter bangsa yang berorientasi kelautan dalam upaya bela negara	Sambang Nusa (Prioritas pada pulau-pulau kecil terluar yang berpenghuni)	Terbangunnya kepercayaan masyarakat pesisir terhadap Polri di pulau-pulau kecil terluar	Jumlah wilayah yang dikunjungi Sambang Nusa	3 Wilayah	4 Wilayah	4 Wilayah	5 Wilayah	7 Wilayah	Polri	Kemhan, Kemenhub, KKP, Kemenkeu, Kemenkes, BMKG, TNI, dan Pemda	APBN (AP7) dan/atau APBD

sesuai . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 95 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
			sesuai Keppres Nomor 6 Tahun 2017									
20	2.7. Pembangunan karakterbangsa yang berorientasi kelautan dalam upaya bela negara	Pembentukan Relawan Penjaga Laut Nusantara (RAPALA)	Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat pesisir dan membentuk jejaring formasi Bakamla dalam membantu menjaga keamanan dan keselamatan di laut	Jumlah Kabupaten/ Kota yang dibentuk kemitraannya : Karimun, Bali, Aceh, Tarakan, Ambon, Manado, Batam, Bangka, Kupang, Merauke, Tual, Asahan, Kep.Seribu, Palau, Jampena, Biak, Nias, Karimun Jawa, Enggano, Buton	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	Bakamla	KKP, Kemenhub, Kemenkeu, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, BNN, dan Pemda	APBN (AP7) dan/atau APBD

2.8. Meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
2.8. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran												
21	2.8. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran	Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan di Laut	Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan di Laut secara Aman, Andal, dan Efektif	Persentase korban yang terevakuasi pada pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan di Laut	100%	100%	100%	100%	100%	Basarnas	Kemenhub, TNI, Polri, Kemenkeu, Bakamla, dan Swasta	APBN (AP1) dan/atau Sumber lain yang sah
22	2.8. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran	Layanan Informasi meteorologi maritim (<i>Strengthening of Marine Meteorology</i>)	Meningkatnya Layanan Informasi Meteorologi Maritim yang berkualitas	Jumlah pelabuhan yang memperoleh informasi meteorologi maritim (pelabuhan) 100 pelabuhan selama 2020 - 2024 (pelabuhan)	20 Pelabuhan (2021) 20 Pelabuhan (2020)	20 Pelabuhan	20 Pelabuhan	20 Pelabuhan	20 Pelabuhan	BMKG	Kemenko Marves, Kemenhub, KKP, dan Pemda	APBN (AP6) dan/atau APBD

2.8. Meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
23	2.8. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran	Layanan Peringatan Dini Cuaca dengan <i>Scaling Up Weather Capacity II</i>	Meningkatnya Layanan Informasi Meteorologi Publik yang Berkualitas	Jumlah lokasi destinasi wisata super prioritas yang memperoleh informasi peringatan dini cuaca	8 Lokasi (2021) 8 Lokasi (2020)	24 Lokasi	34 Lokasi	34 Lokasi	-	BMKG	KKP, Kemenhub, dan Pemda	APBN (AP6) dan/atau APBD
24	2.8. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran	Survey dan pemetaan seluruh wilayah perairan Indonesia serta <i>updating</i> peta laut nasional secara berkala	Terselenggaranya Survei Hidrografi dan Oceanografi untuk mewujudkan peta laut yang <i>up to date</i> dan mencakup seluruh perairan Indonesia.	1. Presentase peta laut yang <i>up to date</i> yang dibuat dan diperbarui 2. Persentase luas wilayah perairan Indonesia (pedalaman, kepulauan dan teritorial) yang telah diperbarui melalui Surta Hidro-	1: 100 % 2: 5 % 3: 33 %	1: 100 % 2: 6 % 3: 48 %	1: 100 % 2: 6 % 3: 64 %	1: 100 % 2: 8 % 3: 100 %	1: 100 % 2: 9 % 3: 21 %	Kemhan	TNI, Kemenhub, dan BIG	APBN (AP7)

oseano- . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
				oseano-grafi 3. Persentase luas wilayah perairan Indonesia yang diperbarui selama interval lima tahun.								
25	2.8. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran	Penerapan sistem <i>e-ticketing</i> di pelabuhan	Menghilangkan praktek <i>overloading</i> kapal penumpang akibat tidak terkendalinya pemuatan penumpang	Jumlah pelabuhan yang menerapkan sistem <i>e-ticketing</i> pelabuhan (kumulatif)	- (2021) 86 Pelabuhan (2020)	-	-	-	-	Kemenhub	Kemenko Marves, Kemenkumham, KKP, KLHK, Polri, BIN, dan Pemda	APBN (AP7) dan/atau APBD
26	2.8. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran	Pengembangan dan Penerapan <i>Traffict Separation Scheme</i> (TSS) di Selat Sunda	Meningkatnya keselamatan pelayaran di perairan sempit dan berbahaya	Pengembangan dan Penerapan <i>Traffict Separation Scheme</i> (TSS) di ALKI 1 dan	Laporan hasil monitoring implementasi TSS (2021) Laporan hasil penetapan TSS	-	-	-	-	Kemenhub	Kemenko Marves, KKP, Kemenkeu, Kemenkumham, Kementan, KLHK, Kemhan,	APBN (AP7)

dan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
		dan Selat Lombok dan Kawasan Baru Lainnya		ALKI 2	(2020)						TNI, BMKG, dan Bakamla	
27	2.8. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran	Penetapan alur pelayaran	Meningkatnya jumlah alur pelayaran yang ditetapkan	Jumlah alur yang telah ditetapkan (lokasi)	55 lokasi	50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi	Kemenhub	Kemenko Marves, Kemenhub, KKP, Kemenkeu, Kemenkumham, Kementan, KLHK, Kemhan, TNI, BMKG, dan Bakamla	APBN (AP7)
28	2.8. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran	Pendalaman alur pelabuhan sesuai standar internasional	Menurunnya kepadatan jumlah kapal yang melintas di 28 Pelabuhan Utama	Persentase pencapaian standar kinerja pelayanan pelabuhan	82%	83%	84%	85%	85%	Kemenhub	BUMN dan Pemda	APBN (AP7) dan/atau Sumber lain yang sah
29	2.8. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran	Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Bertambahnya unit sarana bantu untuk penguatan kenavigasian	Jumlah sarana bantu navigasi pelayaran yang	62 Unit (2021) 62 Unit (2020)	62 Unit	62 Unit	62 Unit	62 Unit	Kemenhub	Pemda	APBN (AP7) dan/atau APBD

laut . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
			laut	terbangun (unit)								
30	2.8. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran	Pembangunan AIS Base Station	Terbangunnya AIS Base Station untuk perkuatan monitoring di laut	Jumlah AIS Base Station yang terbangun	5 AIS Base Station	5 AIS Base Station	5 AIS Base Station	5 AIS Base Station	5 AIS Base Station	Kemenhub	Pemda	APBN (AP7)
31	2.8. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran	Meningkatkan keamanan, keselamatan pelayaran dan multiplier effect bagi ekonomi di Kawasan Indonesia Barat: Selat Malaka ke arah selatan, pembuatan alur pelayaran baru dan pendalaman alur sesuai standar internasional berikut tergelarnya	1. Mencairkan kepadatan jumlah kapal yang melintas di Selat Phillips dan Selat Malaka yang sempit dan amat berbahaya 2. Menjadi multiplier effect bagi ekonomi di pantai timur Sumatera sehingga arus pergerakan	1. Meminimalisir terjadinya kecelakaan fatal dan pencemaran laut di Selat Malaka 2. Pendalaman alur laut yang ada, pembuatan alur laut baru sampai kedalaman 22m Low Water Spring (LWS), area manuver dan area lego	1. ✓ 2. ✓ 3. ✓	1. ✓ 2. ✓ 3. ✓	1. ✓ 2. ✓ 3. ✓	1. ✓ 2. ✓ 3. ✓	1. ✓ 2. ✓ 3. ✓	Kemenhub	Kemenko Marves, Kemenhub, KKP, Kemenkeu, Kemenkumham, Kementan, KLHK, Kemhan, TNI, Polri, BMKG, Bakamla, Pemda, dan BUMN	APBN, APBD dan/atau Sumber lain yang sah

traffic . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 101 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
		<i>traffic separation scheme (TSS)</i> berdasarkan regulasi <i>International Maritime Organization (IMO)</i>	komoditi dari dalam negeri dan dari mancanegara dapat tersebar dengan aman dan lancar 3. Menata keselamatan bernavigasi di Selat Malaka sampai ke utara Selat Bangka dan sebaliknya 4. Pendalaman alur, pembuatan alur laut baru, area manuver, area lego jangkar serta manajemen alur dengan sistem perambuan	jangkar di sekitar pelabuhan/ alur laut 3. Lintas laut di alur ini pada poros: Pulau Karimun Kecil, Pulau Kundur, Selat Durian, laut sekitar Kabupaten Palalawan, Indragiri Hilir, sampai di utara Selat Bangka atau sebaliknya 4. Membuat pelabuhan baru di seputar titik belok di Selat Phillips di Pulau Karimun	4. ✓	4. ✓	4. ✓	4. ✓	4. ✓			
					5. ✓	5. ✓	5. ✓	5. ✓	5. ✓			

sesuai . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 102 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUN G JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
			sesuai standar internasional	<p>Kecil agar menjadi titik timbun sebar berbagai komoditas dari dan ke pasar domestik atau mancanegara</p> <p>5. Membuat satu pelabuhan baru di Provinsi Riau (Kabupaten Palalawan atau Kabupaten Indragiri Hilir) yang berlaut dalam sehingga menaikkan pertumbuhan ekonomi</p>								

2.8. Meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
32	2.8. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran	Pembangunan baru/lanjutan/ penyelesaian kapal kenavigasian	Terbangunnya kapal kenavigasian untuk mendukung kenavigasian laut	Jumlah kapal kenavigasian yang terbangun (Kapal)	4 Kapal (2021) 2 Kapal (2020)	7 Kapal	15 Kapal	16 Kapal	-	Kemenhub	Pemda	APBN (AP7)
33	2.8. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran	<i>National risk assessment</i> daerah-daerah rawan kecelakaan dan pencemaran (anjungan migas, kabel/pipa bawahair)	Tersedianya data tentang daerah-daerah rawan kecelakaan dan pencemaran (anjungan migas, kabel/pipa bawah air)	Data tentang daerah-daerah rawan kecelakaan dan pencemaran (anjungan migas, kabel/pipa bawah air)	√	√	√	√	√	Kemenhub	Kemenko Marves, KKP, Kemenkeu, Kemenkumham, Kementan KLHK, Kemhan, TNI, dan BMKG	APBN (AP7)
34	2.8. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran	Peningkatan keselamatan mudik pada saat hari raya	Meningkatkan keselamatan pelayaran mudik pada saat hari raya	Jumlah informasi keselamatan pelayaran berbasis DSS Sistem Embaran Maritim (SEMAR) dan <i>Satellite Based</i>	2 Unit (informasi)	2 Unit (informasi)	2 Unit (informasi)	2 Unit (informasi)	2 Unit (informasi)	Kemenhub	Kemenko Marves, KKP, Kemhan, Bakamla, TNI, BRIN, dan Pemda	APBN (AP7) dan/atau APBD

Disaster . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUN G JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
				<i>Disaster Early Warning System (SADEWA)</i>								

MATRIKS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

MATRIKS PILAR KKI KE-3: TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN DI LAUT

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
3.1. Penataan sistem hukum nasional di bidang kelautan												
1	3.1. Penataan sistem hukum nasional di bidang kelautan	Sinkronisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah lingkup urusan kelautan dan perikanan	Terlaksananya sinkronisasi RZWP3K dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah daerah yang sinkron antara RZWP3K dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	10 Provinsi (2021) 5 Provinsi (2020)	20 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi	-	Kemendagri	KKP dan KemenATR/BPN	APBN (AP2)
2	3.1. Penataan sistem hukum nasional di bidang kelautan	Penyiapan data <i>One Single Submission</i> (OSS) UMKM bidang kelautan dan perikanan	Tersedianya data OSS Usaha Mikro Kecil bidang Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen data OSS Usaha Mikro Kecil Bidang Kelautan dan Perikanan (dokumen)	1 Dokumen (Sistem OSS dapat memberikan data terkait UMKM bidang kelautan dan perikanan)	1 Dokumen (Sistem OSS dapat memberikan data terkait UMKM bidang kelautan dan perikanan)	1 Dokumen (Sistem OSS dapat memberikan data terkait UMKM bidang kelautan dan perikanan)	1 Dokumen (Sistem OSS dapat memberikan data terkait UMKM bidang kelautan dan perikanan)	1 Dokumen (Sistem OSS dapat memberikan data terkait UMKM bidang kelautan dan perikanan)	Keminvest/BKPM	KemenkopUKM	APBN (AP1)

3.1. Penataan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
3	3.1. Penataan sistem hukum nasional di bidang kelautan	Koordinasi Kebijakan Penanganan Melawan <i>Illegal Fishing</i>	Menurunnya Kasus <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Perairan Indonesia	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Penanganan Melawan <i>Illegal Fishing</i>	√	√	√	√	√	Kemenko Marves	Kemenkeu, TNI, Polri, dan Bakamla	APBN (AP7)
4	3.1. Penataan sistem hukum nasional di bidang kelautan	Percepatan penyusunan aturan turunan implementasi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016. Pengesahan <i>Maritime Labour Convention, 2006</i> (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)	Tersusunnya aturan turunan implementasi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016. Pengesahan <i>Maritime Labour Convention, 2006</i> (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)	1 Dokumen	√	√	√	√	√	Kemenko Marves	Kemhub, Kemnaker, Kemlu, Kemenkumham, KKP, Kemenkes, BP2MI, dan Swasta	APBN (AP7) dan/atau Sumber lain yang sah

3.1. Penataan . . .

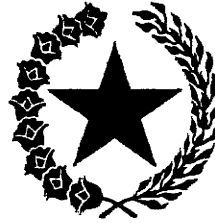


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
5	3.1. Penataan sistem hukum nasional di bidang kelautan	Percepatan Penyusunan RPerpres RPerpres Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan	Tersusunnya RPerpres Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan	1 Dokumen	√	√	√	√	√	Kemenko Marves	Kemhub, Kemnaker, Kemlu, Kemenkumham, KKP, Kemenkes, BP2MI, dan Swasta	APBN (AP7) dan/atau Sumber lain yang sah
3.2. Implementasi hukum internasional di bidang kelautan sesuai dengan kepentingan nasional												
6	3.2. Implementasi hukum internasional di bidang kelautan sesuai dengan kepentingan nasional	Penyusunan regulasi terkait Partisipasi Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional	Terbitnya Peraturan Presiden terkait Partisipasi Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional	1 Dokumen	√	-	-	-	-	KemenESDM	Kemenko Marves, Kemensetneg, KKP, Kemlu, Kemendagri, KLHK, BIG, TNI dan Setkab	APBN (AP7)

3.2. Implementasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
7	3.2. Implementasi hukum internasional di bidang kelautan sesuai dengan kepentingan nasional	Penyusunan UU Zona tambahan	Percepatan Penyusunan UU Zona tambahan	Pengesahan RUU Zona tambahan	√	√	√	√	-	Kemenko Marves	KKP, Kemkumham, Kemensetneg, Kemlu, KemenESDM, Kemhan, Kemenkeu, Kemenkes, TNI, dan Bakamla	APBN (AP7)
8	3.2. Implementasi hukum internasional di bidang kelautan sesuai dengan kepentingan nasional	Penyusunan UU Landas Kontinen	Percepatan penyusunan UU Landas Kontinen	Pengesahan RUU Landas Kontinen	√	√	√	-	-	KKP	Kemenko Marves, Kemkumham, Kemensetneg, Kemlu, KemESDM, Kemhan, dan Bakamla	APBN (AP7)

3.3. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
3.3. Pembangunan sistem tata kelola kelautan nasional yang baik, transparan dan bertanggung jawab												
9	3.3 Pembangunan sistem tata kelola kelautan nasional yang baik, transparan, dan bertanggung jawab	Perencanaan Tata Ruang Nasional	Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas	1. Jumlah rekomendasi peninjauan kembali RTR Pulau/ Kepulauan (Tahunan) 2. Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan presiden RTR Pulau/ Kepulauan (Tahunan) 3. Jumlah dokumen harmonisasi rancangan peraturan presiden RTR Pulau/ Kepulauan (Tahunan)	1: 2 Rekomendasi PK 2: - 3: 1 Dokumen Harmonisasi RPerpres (2021) 1: - 2: 1 Matek dan RPerpres Revisi 3: 1 Dokumen Harmonisasi RPerpres (2020)	1: 1 Rekomendasi PK 2: 2 Matek dan RPerpres Revisi 3: -	1: 2 Rekomendasi PK 2: 1 Matek dan RPerpres Revisi 3: 2 Dokumen Harmonisasi RPerpres	1: - 2: 2 Matek dan RPerpres Revisi 3: 1 Dokumen Harmonisasi RPerpres	1: - 2: 2 Matek dan RPerpres Revisi 3: 1 Dokumen Harmonisasi RPerpres	KemenATR/BPN	Kemenkumham, Kemensetneg, KKP, Pemda, dan Swasta	APBN (AP2), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

3.3. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
10	3.3. Pembangunan sistem tata kelola kelautan nasional yang baik, transparan, dan bertanggung jawab	Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	Tersedianya rencana tata ruang daerah yang berkualitas	Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RRTR/RDTR Kabupaten/ Kota (Tahunan)	400 Matek dan Raperda RDTR Kab/Kota	400 Matek dan Raperda RDTR Kab/Kota	400 Matek dan Raperda RDTR Kab/Kota	400 Matek dan Raperda RDTR Kab/Kota	400 Matek dan Raperda RDTR Kab/Kota	KemenATR/BPN	Pemda, KKP, dan Swasta	APBN (AP2), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
11	3.3. Pembangunan sistem tata kelola kelautan nasional yang baik, transparan, dan bertanggung jawab	Penyusunan RPP Industri Maritim	Tersusunnya RPP Industri Maritim	RPP Industri Maritim	-	√	-	-	-	Kemenperin	Kemenko Marves, Kemenhub, KKP, Kemenkeu, KLHK, Kemenkumham, Kemensetneg, BRIN, dan BUMN	APBN (AP1)
12	3.3. Pembangunan sistem tata kelola kelautan nasional yang baik, transparan,	Penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Klasifikasi Galangan Kapal	Terstandarisasinya klasifikasi galangan kapal dalam rangka peningkatan daya saing	Tersusunnya Peraturan Menteri Perindustrian tentang Klasifikasi Galangan Kapal	-	√	-	-	-	Kemenperin	Kemenko Marves, Kemenhub, KKP, Kemenkumham, dan BRIN	APBN (AP1)

dan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	dan bertanggung jawab											
13	3.3. Pembangunan sistem tata kelola kelautan nasional yang baik, transparan, dan bertanggung jawab	Penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standarisasi Desain Kapal	Tersusunnya Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standarisasi Desain Kapal	Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standarisasi Desain Kapal	-	-	√	-	-	Kemenperin	Kemenhub, Kemenkumham, Setkab, BUMN, dan BRIN	APBN (AP1)

MATRIKS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

MATRIKS PILAR KKI KE-4: EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR KELAUTAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
4.1. Penyusunan dan pengembangan basis data dan informasi ekonomi kelautan												
1	4.1. Penyusunan dan pengembangan basis data dan informasi ekonomi kelautan	Pelaksanaan Integrasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya sistem KKP yang telah terintegrasi dengan sistem OSS	Jumlah Inventarisasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Integrasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Pusat dan Daerah (K/L/D)	1 (satu) K/L (Sistem OSS telah terintegrasi dengan KKP)	1 (satu) K/L (Sistem OSS telah terintegrasi dengan KKP)	1 (satu) K/L (Sistem OSS telah terintegrasi dengan KKP)	1 (satu) K/L (Sistem OSS telah terintegrasi dengan KKP)	1 (satu) K/L (Sistem OSS telah terintegrasi dengan KKP)	Keminvest/ BKPM	KKP dan Pemda	APBN (AP1) dan/atau APBD
2	4.1. Penyusunan dan pengembangan basis data dan informasi ekonomi kelautan	Pengembangan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penyesuaian sistem dengan regulasi/kebijakan terbaru	Jumlah Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (paket)	1 (satu) Paket (Sistem OSS telah terintegrasi dengan KKP)	1 (satu) Paket (Sistem OSS telah terintegrasi dengan KKP)	1 (satu) Paket (Sistem OSS telah terintegrasi dengan KKP)	1 (satu) Paket (Sistem OSS telah terintegrasi dengan KKP)	1 (satu) Paket (Sistem OSS telah terintegrasi dengan KKP)	Keminvest/ BKPM	KKP dan Pemda	APBN (AP1) dan/atau APBD

4.1. Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
3	4.1. Penyusunan dan pengembangan basis data dan informasi ekonomi kelautan	Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi	Tersedianya Dokumen Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Keanekaragaman Hayati Tinggi	Jumlah Data Perencanaan dan Penataan Kawasan Konservasi (Kawasan Konservasi)	3 Kawasan Konservasi	5 Kawasan Konservasi	7 Kawasan Konservasi	8 Kawasan Konservasi	-	KLHK	KKP dan Pemda	APBN (AP1) dan/atau APBD
4.2. Penciptaan iklim investasi usaha yang kondusif dan efisien												
4	4.2. Penciptaan iklim investasi usaha yang kondusif dan efisien	Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah I	Meningkatnya realisasi penanaman modal di Wilayah I (Sumatera)	Perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah I (perusahaan)	√	√	√	√	√	Keminvest/ BKPM	Pemda dan Swasta	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
5	4.2. Penciptaan iklim investasi usaha yang kondusif dan efisien	Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah II	Meningkatnya realisasi penanaman modal di Wilayah II (Kalimantan, DKI Jakarta,	Perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah II	√	√	√	√	√	Keminvest/ BKPM	Pemda dan Swasta	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

dan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
			dan D.I. Yogyakarta)	(perusahaan)								
6	4.2. Penciptaan iklim investasi usaha yang kondusif dan efisien	Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah III	Meningkatnya realisasi penanaman modal di Wilayah III (Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi)	Perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah III (perusahaan)	√	√	√	√	√	Keminvest/ BKPM	Pemda dan Swasta	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
7	4.2. Penciptaan iklim investasi usaha yang kondusif dan efisien	Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah IV	Meningkatnya realisasi penanaman modal di Wilayah IV (Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat)	Perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di wilayah IV (perusahaan)	√	√	√	√	√	Keminvest/ BKPM	Pemda dan Swasta	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
8	4.2. Penciptaan iklim investasi usaha yang kondusif dan	Penyusunan <i>Investment Project Ready to Offer</i> (IPRO)	Tersedianya dokumen IPRO yang mencakup	Profil proyek <i>Investment Project Ready to Offer</i> (IPRO)	√	√	√	√	√	Keminvest/ BKPM	KKP, Kemenperin, Kemendag, Kemenkop-	APBN (AP1) dan/atau APBD

efisien . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	efisien	di bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	data potensi dan peluang pengembangan investasi rumput laut terintegrasi di Kabupaten Sumbawa Barat yang komprehensif	di bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya (profil proyek)							UKM, dan Pemda	
9	4.2. Penciptaan iklim investasi usaha yang kondusif dan efisien	Pemasaran Investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional	Meningkatnya jumlah rencana investasi di sektor dan kawasan ekonomi prioritas	Jumlah Rencana Investasi melalui Kegiatan Pemasaran Investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) (rencana investasi)	Rp 25,85 Triliun (2021) Rp 16,25 Triliun (2020)	Rp 42 Triliun	Rp 50 Triliun	Rp 55 Triliun	-	Keminvest/ BKPM	Kemenko Marves, Keminvest/ BKPM, KKP, KemenESDM, dan Kemenpare- kraf	APBN (AP1)

4.2. Penciptaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 116 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
10	4.2. Penciptaan iklim investasi usaha yang kondusif dan efisien	Sertifikasi hak atas tanah nelayan yang difasilitasi sertifikasinya	Terlaksananya fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan	Jumlah fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan (SeHAT) (bidang)	15.000 (2021) 2.500 (2020)	15.000	15.000	15.000	15.000	KKP	KemenATR/BPN	APBN (AP7)
4.3. Pengembangan dunia usaha di bidang kelautan nasional yang berdaya saing internasional												
11	4.3. Pengembangan dunia usaha di bidang kelautan nasional yang berdaya saing internasional	Korporasi serta perkuatan kapasitas usaha Koperasi Petani Garam melalui kemitraan dalam rangka percepatan penyerapan garam rakyat dari hulu ke hilir dalam mewujudkan transformasi ekonomi	Terjalannya korporasi dan kemitraan koperasi petanigaram dalam rangka penyerapan garam rakyat	Jumlah Koperasi yang terjalin dalam Korporasi Koperasi Garam serta melakukan kemitraan dalam ekosistem terpadu	-	2 Koperasi	2 Koperasi	2 Koperasi	2 Koperasi	KemenkopUKM	KKP, BPOM, Kemenko Marves, Kemenperin, Pemda, dan Swasta	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

4.3. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
12	4.3. Pengembangan dunia usaha di bidang kelautan nasional yang berdaya saing internasional	Fasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasi bagi pelaku usaha	Terfasilitasinya kemudahan berusaha dan berinvestasi bagi pelaku usaha dalam mendukung Penguatan Jaminan Usaha Serta Korporasi Petani dan Nelayan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan berusaha dan berinvestasi (pelaku usaha)	1.620 Pelaku usaha (2021) 1.510 Pelaku usaha (2020)	1.730 Pelaku usaha	1.840 Pelaku usaha	1.950 Pelaku usaha	1.950 Pelaku usaha	KKP	Kemenkop-UKM	APBN (AP3)
4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis												
13	4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-	Pengembangan Bandara HAS Hanandjoedin di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung dan Bandara Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Terselenggaranya Pengembangan Bandara HAS Hanandjoedin di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung dan Bandara Lombok di Provinsi Nusa	Bandara yang dikembangkan (lokasi)	1. Bandara HAS Hanandjoedin: <i>Leveling Runway</i> 2. Bandar Lombok: <i>Perpanjangan Runway</i> dan	1. Bandara HAS Hanandjoedin: - 2. Bandara Lombok: <i>Pembangunan Waving Gallery</i> dan <i>Perluasan</i>	1. Bandara HAS Hanandjoedi: <i>Pembangunan Gedung Operasional Bandara</i> 2. Bandara Lombok: <i>Pengem-</i>	1. Bandara HAS Hanandjoedi: <i>Pembangunan Gedung Terminal, Pembangunan gedung dan</i>	1. Bandara HAS Hanandjoedi: <i>Pengadaan Kendaraan Operasional</i> 2. Bandara Lombok: -	KemenBUMN	Kemenhub, BUMN, dan Pemda	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

pulau . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis		Tenggara Barat untuk mendukung 10 Destinasi Pariwisata Prioritas		Pembangunan Fasilitas Penunjangnya serta Peningkatan Daya Dukung <i>Runway</i> Perluasan terminal Pengembangan fasilitas kargo Pengembangan Fasilitas Sisi Udara Tahap I: Perluasan Apron Barat dan Perbaikan Fasilitas Penunjang	Parkir Penumpang (Gedung Anjungan, Pelataran Parkir Motor, Parkir Minibus dan Roda 4 wisata)	bangan Fasilitas Sisi Udara Tahap II: Pembuatan <i>Rapid Exit Taxiway</i> dan <i>Paralel Taxiway</i>	fasilitas penunjang Bandara, perluasan Apron, Penambahan Lampu <i>Flood Light</i> , Pengadaan Dan Pemasangan UPS 160 KVA 2. Bandara Lombok: -				
14	4.4. Pembangunan kawasan	Pembangunan Jalur KA Makassar -	Terbangunnya jalur Kereta Api Makassar-	Panjang Jalur Kereta Api	34,2 Km (selesai) (2021)	47,3 Km (selesai)	-	-	-	Kemhub	KemenATR/BPN, KLHK, dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

ekonomi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis	Pare Pare	Pare Pare (dalam rangka mendukung Pelabuhan Garongkong)	dibangun (123,7 km)	42,2 Km (selesai) (2020)							
15	4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis	Penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur	Penguatan sentra IKM yang direvitalisasi	3 sentra	2 Sentra (Kab. Kep. Anambas Kab. Seruyan)	1 Sentra (Kab. Kepulauan Selayar)	-	-	-	Kemenperin	KKP dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

4.4. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
16	4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis	Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar	Penambahan debit air baku untuk mendukung akses Air Minum Perpipaan (10 juta Sambungan Rumah)	Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m ³ /detik)	0,2 m ³ /detik (2021) 0,2 m ³ /detik (2020)	-	0,3 m ³ /detik	0,2 m ³ /detik	-	KemenPUPR	Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD
17	4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil,	Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Penambahan debit air baku untuk mendukung akses Air Minum Perpipaan (10 juta Sambungan Rumah)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m ³ /detik)	4,2 m ³ /detik (2021) 0,5 m ³ /detik (2020)	4,1 m ³ /detik	5,1 m ³ /detik	3,7 m ³ /detik	-	KemenPUPR	Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

pulau . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis											
18	4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis	Penyediaan air baku di Kawasan Pantai Utara Pulau Jawa	Penambahan debit air baku untuk mendukung akses Air Minum Perpipaan (10 juta Sambungan Rumah)	Tambahan debit air baku di kawasan Pantai Utara Pulau Jawa (m ³ /detik)	1,98 m ³ /detik	0,47 m ³ /detik	-	-	-	KemenPUPR	Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD
19	4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan	Pembangunan Jalan <i>Bypass</i> Bandara Internasional Lombok-	Terbangunnya jalan untuk mendukung 10 Destinasi Pariwisata	Panjang jalan yang dibangun (km)	9,9 Km (2021) 7,5 Km (2020)	-	-	-	-	KemenPUPR	Kemenparekraf dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

secara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis	Mandalika	Prioritas									
20	4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan	Pembangunan Jalan Akses KSPN Labuan Bajo	Terbangunnya jalan untuk mendukung 10 Destinasi Pariwisata Prioritas	Panjang jalan yang dibangun (km)	10 Km (2021) 5,5 Km (2020)	8,6 Km	10 Km	10 Km	-	KemenPUPR	Kemenparekraf dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

perairan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	perairan laut Indonesia secara realistis											
21	4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis	Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Morotai	Terbangunnya jalan untuk mendukung jalan trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Panjang jalan yang dibangun (km)	16,8 Km (2021) 14 Km (2020)	8,7 Km	9,7 Km	-	-	KemenPUPR	Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD
22	4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan	Pembangunan Jembatan Sumsel - Bangka (Potensi)	Terbangunnya jalan untuk mendukung 10 Destinasi Pariwisata Prioritas	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1 Lokasi	-	KemenPUPR	Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

prinsip . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis											
23	4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis	Pembangunan Jembatan Muna-Buton (Potensi)	Terbangunnya jalan untuk mendukung 10 Destinasi Pariwisata Prioritas	Jembatan yang dibangun (lokasi)	-	-	1 Lokasi	-	-	KemenPUPR	KemenATR/BPN, Kemenparekraf, dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

4.4. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
24	4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis	Pembangunan Jalan Trans Papua	Terbangunnya jalan untuk mendukung Jalan Trans Papua Merauke-Sorong	Panjang jalan yang dibangun (km)	72 Km (2021) 38 Km (2020)	78 Km	55 Km	62 Km	-	KemenPUPR	KemenATR/BPN dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD
25	4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru	Pembangunan Jalan Trans Papua Barat	Terbangunnya jalan untuk mendukung Jalan Trans Papua Merauke-Sorong	Panjang jalan yang dibangun (km)	76,5 Km (2021) 56,8 Km (2020)	71,8 Km	72,2 Km	70,8 Km	-	KemenPUPR	KemenATR/BPN dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

di wilayah . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 126 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis											
26	4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis	Pembangunan Jembatan di Jalan Trans Papua	Terbangunnya jembatan untuk mendukung Jalan Trans Papua Merauke-Sorong	Panjang jembatan jalan yang dibangun (m)	3.230 m (2021) 3.140 m (2020)	2.680 m	2.325 m	2.389 m	-	KemenPUPR	KemenATR/BPN dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

4.4. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
27	4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis	Pembangunan Jembatan di Jalan Trans Papua Barat	Terbangunnya jembatan untuk mendukung Jalan Trans Papua Merauke-Sorong	Panjang jembatan jalan yang dibangun (m)	967,4 m (2021) 887,4 m (2020)	967,4 m	887,4 m	887,4 m	-	KemenPUPR	KemenATR/BPN dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD
28	4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan	Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera	Terbangunnya Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	-	2 Km	23 Km	23 Km	-	KemenPUPR	KemenATR/BPN dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

menggunakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis											
29	4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil,	Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak (Dukungan APBN)	Terbangunnya jalan tol untuk mendukung Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	2 Km	4 Km	4 Km	-	-	KemenPUPR	KemenATR/ BPN dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

pulau . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis											
30	4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis	Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP)	Tersedianya air baku di kawasan strategis untuk meningkatkan Akses Air Minum Perpipaan (10 juta Sambungan Rumah)	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik) Lokasi: KI Batang dan KEK Kendal	0,58 m3/detik	0,64 m3/detik	0,7 m3/detik	0,72 m3/detik	-	KemenPUPR	Pemda dan Swasta	APBN (AP5), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
31	4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan	Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan	Kawasan yang dibangun/ dikembangkan sarana prasarana	Jumlah kawasan yang dibangun sarana prasarana	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	KKP	Kemenko Marves, Kemenko Ekon, KemenPUPR,	APBN (AP1), APBD, Sumber lain yang sah

secara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis		untuk sentra ekonomi garam	sentra ekonomi garam							BRIN, Kemenperin, Kemendag, Pemda, BIG, BUMN, dan Swasta	
32	4.4. Pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut	Akselerasi Produksi Tambak Udang	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	Rekomendasi kebijakan akselerasi produksi tambak udang	√	√	√	√	√	Kemenko Marves	KKP, Keminvest/BKPM, KemenPUPR, Pemda, dan swasta	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	Indonesia secara realistis											
4.5. Optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama nelayan												
33	4.5. Optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama nelayan	Pengembangan Bandara oleh Kementerian Perhubungan: (1) Bandara Babo di Prov. Papua Barat; dan Bandara Pitu-Morotai di Papua Barat (2) Bandara Bintuni di Prov. Maluku Utara; bandara Sibisa di Prov. Papua Barat (3) Bandara Pitu-Morotai di Maluku Utara (4) Bandara Sibisa di Prov. Sumatera Utara; bandara Silangit di Maluku Utara; bandara Sibisa di Prov. Sumatera Utara (5) Bandara Matahora - Wakatobi di Prov. Sulawesi Tenggara (7)	Meningkatnya fasilitas dan infrastruktur bandara Babo dan Bintuni di Prov. Papua Barat; dan bandara Pitu-Morotai di Maluku Utara; bandara Sibisa dan bandara Silangit di Prov. Sumatera Utara; bandara Matahora di Prov. Sulawesi Tenggara; bandara H AS Hanandjoeddin di Propinsi Bangka Belitung; bandara Tanjung Harapan di	Bandara mendukung prioritas yang dikembangkan (Lokasi)	(1) Bandara Babo: 1 (Selesai) (2) Bandara Bintuni: 1 (3) Bandara Pitu-Morotai: 1 (berlanjut) (4) Bandara Siibisa: 1 (selesai) (5) Bandara Silangit: 2 (selesai) (6) Bandara Matahora: 1 (berlanjut) (7) Bandara Hanandjoeddin : 2 (berlanjut) (8) Bandara Tj. Harapan: 1 (Selesai) (9) Bandara Mutiara: 1	(6) Bandara Matahora :1 (berlanjut) (7) Bandara Hanandjoeddin: 2 (berlanjut) (9) Bandara Mutiara: 1 (berlanjut)	(6) Bandara Matahora :1 (berlanjut) (7) Bandara Hanandjoeddin: 2 (berlanjut) (9) Bandara Mutiara: 1 (selesai)	(6) Bandara Matahora :1 (selesai) Bandara Hanandjoeddin : 2 (berlanjut)	(7) Bandara Hanandjoeddin : 2 (selesai)	Kemenhub	Pemda dan BUMN	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

Bandara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
		Bandara H AS Hanandjoeddin Prov. Bangka Belitung (8) Bandara Tanjung Harapan Prov. Kalimantan Utara (9) Bandara Mutiara Sis Al Jufri di Prov Sulawesi Tengah (10) Bandara Bersujud di Prov. Kalimantan Selatan	Prov. Kalimantan Utara; bandara Mutiara Sis Al Jufri di Prov Sulawesi Tengah; bandara Bersujud di Prov. Kalimantan Selatan untuk mendukung aksesibilitas ke kawasan industri prioritas dan pariwisata		(berlanjut) 1. Bandara Bersujud: 1 (Selesai)							
34	4.5. Optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan,	Pembangunan Bandara: Bandara Weda di Prov. Maluku Utara Bandara Kayong Utara di Prov. Kalimantan Barat Bandara Perairan Raja	Terbangunnya bandara baru untuk mendukung kawasan industri prioritas yang dikembangkan serta terbangunnya bandara	(1) Bandara baru yang dibangun untuk mendukung kawasan industri prioritas yang dikembangkan (lokasi) Bandara perairan	(1) Bandara Weda: 1 (berlanjut) (3) Bandara di Raja Ampat: 1 (berlanjut) (5) Bandara di Pulau Bawah: 1 (selesai)	(3) (1) Bandara Weda: 1 (berlanjut) Bandara di Raja Ampat: 1 (selesai) (4) Bandara di Gili Iyang: 1	Bandara Weda: 1 (berlanjut) Bandara Kayong: 1 (berlanjut) (4) Bandara di Gili Iyang: 1 (selesai) (6) Bandara di Pulau	(6) Bandara Weda: 1 (berlanjut) Bandara Kayong: 1 (berlanjut) Bandara di Pulau Senua: 1 (selesai) Bandara di	Bandara Weda: 1 (selesai) Bandara Kayong: 1 (selesai) (7) Bandara di Pulau Widi: 1 (selesai)	Kemenhub	Pemda dan BUMN	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

terutama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	terutama nelayan	Ampat di Prov. Papua Barat Bandara Perairan Gili Iyang di Prov. Jawa Timur Bandara Perairan Pulau Bawah di Prov. Kepulauan Riau Bandara Perairan Pulau Senua di Prov. Kepulauan Riau Bandara Perairan Pulau Widi Prov. Maluku Utara	perairan guna mendukung aksesibilitas ke destinasi pariwisata	yang dibangun (Lokasi)		(berlanjut)	Senua: 1 (berlanjut)	Pulau Widi: 1 (berlanjut)				
35	4.5. Optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha	Pemberian Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	Terfasilitasi-nya sertifikat NIK bagi koperasi di bidang kelautan dan perikanan	Jumlah sertifikasi NIK bagi koperasi di bidang kelautan dan perikanan	-	100 Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	100 Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	100 Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	100 Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	KemenkopUKM	KKP, Kemenperin, Kemenhub, dan Pemda	APBN (AP3) dan/atau APBD

kelautan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	kelautan, terutama nelayan											
36	4.5. Optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama nelayan	Klasifikasi dan sertifikasi galangan kapal skala menengah ke bawah (non baja)	Terklasifikasinya dan tersertifikasinya galangan kapal skala menengah ke bawah (non baja) untuk mendukung revitalisasi galangan kapal nasional	20 Galangan Kapal Lokasi: Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan	-	-	-	10 Galangan Kapal	10 Galangan Kapal	Kemenperin	KemenBUMN, KKP, dan BUMN	APBN (AP3) dan/atau Sumber lain yang sah
37	4.5. Optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan,	Standardisasi dan sertifikasi komponen kapal	Terstandarisasinya dan tersertifikasinya komponen kapal untuk mendukung revitalisasi galangan kapal nasional	6 komponen kapal	-	-	2 Komponen Kapal	2 Komponen Kapal	2 Komponen Kapal	Kemenperin	KKP dan BUMN	APBN (AP3) dan/atau Sumber lain yang sah

terutama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	terutama nelayan											
38	4.5. Optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama nelayan	Peningkatan Produk bersertifikasi TKDN untuk komponen pembuatan kapal	Meningkatnya Produk bersertifikasi TKDN untuk komponen pembuatan kapal untuk mendukung revitalisasi galangan kapal nasional	100 Produk Dalam Negeri bersertifikasi TKDN	25 Produk	25 Produk	25 Produk	25 Produk	-	Kemenperin	Kemenkeu, Kemendag, KemenBUMN, KKP, dan BUMN	APBN (AP3) dan/atau Sumber lain yang sah
39	4.5. Optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama	Pembangunan jaringan irigasi untuk tambak rakyat	Terlaksananya Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	Luas irigasi tambak rakyat yang dibangun (Hektar) (Lokasi prioritas: Pantura, Lampung, Sulsel, NTB, dan Kab.	1.193 Ha (2021) 229 Ha (2020)	1.193 Ha	1.193 Ha	1.193 Ha	-	KemenPUPR	KKP dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

nelayan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	nelayan			Luwu Timur)								
40	4.5. Optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama nelayan	Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP)	Tersedianya air baku di Kawasan Strategis KI/KEK Sei Mangkei, KI Bintan Aerospace, KI/KEK Galang Batang, KI Ketapang, KI Sadai, KI Surya Borneo, KI Teluk Weda, KI Teluk Bintuni, KI/KEK Palu	Tambahan debit air baku di kawasan strategis KI/KEK Sei Mangkei, KI Bintan Aerospace, KI/KEK Galang Batang, KI Ketapang, KI Sadai, KI Surya Borneo, KI Teluk Weda, KI Teluk Bintuni, KI/KEK Palu (m3/detik)	0,2 m3/detik	0,3 m3/detik	-	-	-	KemenPUPR	Pemda, BUMN, dan Swasta	APBN (AP5), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
41	4.5. Optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha	Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP)	Tersedianya air baku untuk mendukung 10 Destinasi Pariwisata Prioritas	Tambahan debit air baku di kawasan strategis DPP Danau Toba dan sekitarnya, Borobudur	0,1 m3/detik	0,2 m3/detik	-	-	-	KemenPUPR	Pemda, BUMN, dan Swasta	APBN (AP5), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

dan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	dan pelaku usaha kelautan, terutama nelayan			dan sekitarnya, Lombok, Labuan Bajo, Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru, Morotai (m3/detik)								
42	4.5. Optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama nelayan	Pembangunan Jalan akses KI Weda	Terbangunnya jalan dalam rangka mendukung pengembangan 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	25 Km	-	KemenPUPR	KemenATR/BPN dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

4.5. Optimalisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
43	4.5. Optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama nelayan	Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan sertifikasi awak kapal perikanan	Terlaksananya pembangunan kapal perikanan bantuan pemerintah ukuran < 30GT	Terbangunnya 350 unit kapal bantuan pemerintah ukuran < 30GT	50 Unit kapal	70 Unit kapal	90 Unit kapal	110 Unit kapal	110 Unit kapal	KKP	Kemenkop-UKM, Kemenperin, Kemenhub, dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD
44	4.5. Optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama nelayan	Pengelolaan pelabuhan perikanan	Peningkatan fasilitas dan pelayanan pelabuhan perikanan	Jumlah pelabuhan perikanan yang diusulkan penetapan kelasnya (lokasi)	25 Lokasi (2021) 8 Lokasi (2020)	30 Lokasi	35 Lokasi	40 Lokasi	40 Lokasi	KKP	Kemenhub, BUMN, dan Pemda	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

4.5. Optimalisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
45	4.5. Optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama nelayan	Pengelolaan pelabuhan perikanan	Operasional pelabuhan perikanan Unit Pelaksana Teknis Terpadu (UPT) pusat dan pelabuhan perikanan perintis	24 pelabuhan perikanan (kumulatif)	24 Lokasi	24 Lokasi	24 Lokasi	24 Lokasi	24 Lokasi	KKP	Kemenhub, BUMN, dan Pemda	APBN (AP3), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
46	4.5. Optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama nelayan	Pengelolaan sistem perbenihan ikan	Kawasan kebun bibit rumput laut yang dibangun Catatan: Lokus merujuk Perpres 13/2019 tentang Road Map Rumput Laut*	150 paket kebun bibit rumput laut (kumulatif)	100 Paket	120 Paket	140 Paket	150 Paket	150 Paket	KKP	Kemenperin	APBN (AP3)

4.5. Optimalisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
47	4.5. Optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama nelayan	Pengelolaan sistem perbenihan ikan	Bantuan Benih Ikan Laut	Jumlah benih ikan air laut yang didistribusikan ke masyarakat (ekor)	8.300.000 (2021) 8.277.000 (2020)	8.500.000	8.700.000	8.900.000	8.900.000	KKP	BRIN	APBN (AP1)
48	4.5. Optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama nelayan	Ragam Baru Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah di Lokasi yang Dibina	Meningkatnya ragam produk olahan bernilai tambah	Jumlah Ragam Baru Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah di Lokasi yang Dibina (ragam)	28 Ragam (2021) 28 Ragam (2020)	28 Ragam	28 Ragam	28 Ragam	28 Ragam	KKP	Kemenperin dan Kemendag	APBN (AP3)

4.6. Intensifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
4.6. Intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan penguatan mutu produk perikanan mulai dari proses praproduksi sampai dengan pemasaran												
49	4.6. Intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan penguatan mutu produk perikanan mulai dari proses praproduksi sampai dengan pemasaran	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Produk unggulan yang difasilitasi pemasarannya	1. Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan produk dan kualitas SDM (kegiatan) promosi produk dalam negeri melalui media massa (kegiatan) 2. Melaksanakan pemasaran <i>online</i> dan/atau <i>offline</i> (kegiatan)	1: 5 Kegiatan 2: 1 Kegiatan 3:1 Kegiatan	1: 6 Kegiatan 2:1 Kegiatan 3:1 Kegiatan	1: 7 Kegiatan 2:1 Kegiatan 3:1 Kegiatan	1: 8 Kegiatan 2:1 Kegiatan 3:1 Kegiatan	1: 8 Kegiatan 2:1 Kegiatan 3:1 Kegiatan	Kemendag	KKP, Kemenperin, dan Pemda	APBN (AP1)
50	4.6. Intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan penguatan	Pengembangan Produk Ekspor	Produk Potensial Ekspor yang berkualitas	1. Pelaksanaan identifikasi produk (kegiatan)	1: 1 Kegiatan 2: - 3: -	1: - 2: 1 Kegiatan 3: -	1: - 2: 1 Kegiatan 3: -	1: - 2: - 3: 1 Kegiatan	1: - 2: - 3: -	Kemendag	KKP dan Kemenperin	APBN (AP1)

mutu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	mutu produk perikanan mulai dari proses praproduksi sampai dengan pemasaran			2. Pelaksanaan pengembangan produk ekspor (kegiatan) 3. Fasilitasi pelaku usaha (kegiatan)								
51	4.6. Intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan penguatan mutu produk perikanan mulai dari proses praproduksi sampai dengan pemasaran	Keikutsertaan dalam promosi skala internasional	Meningkatnya nilai potensi transaksi melalui promosi skala internasional untuk meningkatkan nilai ekspor perikanan	Nilai potensi transaksi dari promosi skala internasional (USD juta per tahun)	275 juta USD (2021) 250 juta USD (2020)	300 juta USD	325 juta USD	350 juta USD	350 juta USD	KKP	Kemenperin	APBN (AP1)

4.6. Intensifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
52	4.6. Intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan penguatan mutu produk perikanan mulai dari proses praproduksi sampai dengan pemasaran	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk Unit Pengolahan Ikan	Meningkatnya volume produk olahan hasil kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan bagi unit pengolahan ikan (dokumen) (sertifikat)	2.500 Sertifikat (2021) 2.250 Sertifikat (2020)	2.750 Sertifikat	3.000 Sertifikat	3.250 Sertifikat	3.250 Sertifikat	KKP	Kemenkop-UKM	APBN (AP1)
53	4.6. Intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan penguatan mutu produk perikanan mulai dari proses praproduksi sampai dengan pemasaran	Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan	Produksi garam yang meningkat	Produksi Garam (juta Ton)	1,09 juta Ton (2021) 2 juta Ton (Target PK level 1) (2020)	1,5 juta Ton	1,7 juta Ton	2 juta Ton	2 juta Ton	KKP	Kemenperin, Kemendag, BMKG, BPS, dan Pemda	APBN (AP1) dan/atau APBD

4.8. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
4.8. Pengembangan kerja sama ekonomi berkelanjutan dengan negara mitra strategis bidang kelautan												
54	4.8. Pengembangan kerja sama ekonomi berkelanjutan dengan negara mitra strategis bidang kelautan	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan	Persentase penanganan kasus di negara tujuan ekspor (%)	100%	100%	100%	100%	100%	Kemendag	Kemlu, KKP, dan KLHK	APBN (AP1)
55	4.8. Pengembangan kerja sama ekonomi berkelanjutan dengan negara mitra strategis bidang kelautan	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait kerja sama ekonomi internasional (<i>Preferential Trade Agreement (PTA) / Free Trade Agreement (FTA) / Comprehensive Partnership</i>)	7 Dokumen (2021) 6 Dokumen (2020)	4 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	-	Kemenko Ekon	KKP, Kemendag, Keminvest/BKPM, KemenPUPR, dan Kemenperin	APBN (AP1)

Agreement . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
				Agreement (CEPA, bilateral, multilateral) yang disepakati								
4.9. Sinergi kepentingan nasional strategis dalam menentukan kawasan pengembangan infrastruktur kelautan												
56	4.9. Sinergi kepentingan nasional strategis dalam menentukan kawasan pengembangan infrastruktur elautan	Pembangunan Pusat Pertumbuhan Industri dan Maritim	Terbangunnya dan Pengembangan Kawasan Industri Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan/ Sentra Industri	Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing	1 KEK	-	1 KEK	-	-	Kemenko Ekon	Kemenperin, KemenPUPR, Kemenhub, KKP, dan Pemda	APBN (AP1) dan/atau APBD
57	4.9. Sinergi kepentingan nasional strategis dalam	Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan Dalam	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Tata	Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan	(80% dari 4 KSE rawan bencana) (2021) (75% dari 2	(80% dari 6 KSE rawan bencana)	(85% dari 8 KSE rawan bencana)	(90% dari 8 KSE rawan bencana)	-	Kemenko Ekon	BNPB, KemenPUPR, KemenKop-UKM, dan KKP	APBN (AP1)

menentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	menentukan kawasan pengembangan infrastruktur kelautan	Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana, dalam rangka Koordinasi Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Ruang Yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana	KSE rawan bencana dan 2 lokasi pemulihan ekonomi pasca bencana) (2020)							
58	4.9. Sinergi kepentingan nasional strategis dalam menentukan	Penyelesaian Sinkronisasi Peta dan Penyelesaian Tumpang Tindih	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Yang	Persentase Percepatan Penyelesaian Sinkronisasi Peta dan Penyelesaian	80% dari 34 Provinsi (2021) (80% dari 14 Provinsi) (2020)	85% dari 34 Provinsi	85% dari 34 Provinsi	90% dari 34 Provinsi	-	Kemenko Ekon	KKP, KemenATR/BPN, Kemendagri, Keminvest/BKPM, dan	APBN (AP1) dan/atau APBD

kawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	kawasan pengembangan infrastruktur kelautan	Pemanfaatan Lahan dalam rangka Koordinasi Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Berkualitas dan Berkelanjutan	Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan							Pemda	
4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional												
59	4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional	Pengembangan <i>Inland Waterways</i> sebagai Bagian Pengembangan Sistem Logistik Perkotaan Jabodetabek (Dukungan APBN)	Terbangunnya <i>Inland Waterways</i> di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	Jumlah kanal yang dikembangkan sebagai alur angkutan (paket)	-	Penyusunan <i>Final Bussines Case</i> (FBC) (mulai)	Tahap Pelelangan 1 (berlanjut)	Pelebaran dan Pendalaman Kanal 1 (berlanjut)	Pelebaran dan Pendalaman Kanal 1 (selesai)	Kemenhub	KemenPUPR	APBN (AP5)

4.10. Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
60	4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional	Pengembangan <i>Inland Waterways</i> sebagai Bagian Pengembangan Sistem Logistik Perkotaan Jabodetabek (Dukungan KPBU)	Terbangunnya <i>Inland Waterways</i> di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	Jumlah prasarana transportasi Jabodetabek yang dikembangkan (paket)	-	-	-	Pembebasan Lahan Pembangunan Terminal Cikarang Bekasi Laut (CBL)	Pembangunan Terminal CBL1 (selesai)	Kemenhub	KemenPUPR, Pemda, dan BUMN	APBN (AP5), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
61	4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional	Penerapan layanan kepelabuhan online melalui Inaportnet (<i>Indonesia Port Network</i>)	Tersedianya <i>online Inaportnet</i>	Penerapan <i>online Inaportnet</i> di pelabuhan penumpang	22 Pelabuhan (2021) 20 Pelabuhan (2020)	23 Pelabuhan	20 Pelabuhan	20 Pelabuhan	20 Pelabuhan	Kemenhub	Kemenko Marves, KKP, Kemenkeu, Kemenkumham, Kementan, KLHK, dan BMKG	APBN (AP1)
62	4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional	Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut	Terkelolanya rute penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan	Jumlah rute penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dalam rangka pelaksanaan	30 Trayek	30 Trayek	30 Trayek	30 Trayek	30 Trayek	Kemenhub	Kementan dan Kemendag	APBN (AP1)

barang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
			barang dalam rangka pelaksanaan tol laut	tol laut sebanyak 26 trayek (kumulatif)								
63	4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional	Pelayanan angkutan laut perintis	Meningkatnya pelayanan transportasi laut di perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah nonkomersial lainnya	Jumlah trayek sebanyak 118 Trayek/tahun	118 Trayek/tahun	118 Trayek/tahun	118 Trayek/tahun	118 Trayek/tahun	118 Trayek/tahun	Kemenhub	Pemda	APBN (AP1) dan/atau APBD
64	4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional	Pengembangan <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	Terbangunnya sistem kolaborasi logistik dalam rangka efisiensi waktu dan biaya logistik	Platform Kolaborasi NLE	1. Terlaksananya piloting SSm Pengangkutan mulai dari warta kapal Terlaksananya sistem pembayaran tunggal dan transparan oleh semua operator Terminal Peti Kemas	Terlaksananya piloting SSm Pengangkutan mulai dari penunjukan keagenan kapal	Penerapan SSm pengangkutan laut secara nasional	Terlaksananya penataan atau zonasi Terminal Peti Kemas	-	Kemenkeu	Kemenko Ekon, Kemenhub, Kemendag, Kemenperin, Kemendagri, KKP, Kementan, Kemenkes, Keminvest/ BKPM, dan KemenBUMN	APBN (AP1)

Terlaksananya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBLAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
				Terlaksananya sistem pengoperasian tunggal operator Terminal Peti kemas (2021) 2. Penerapan SSm Kepabeanan dan Karantina NSPK oleh K/L yang terkait dengan pemberitahuan keberangkatan dan kedatangan kapal melalui sistem SSm pengangkutan Terlaksananya uji coba <i>manifest domestic</i> Terlaksananya uji coba penyampaian warta kapal, manifest								

kepabeanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 151 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBILAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
				kepabeanan, izin karantina kesehatan, dan manifest domestik antarpulau Terlaksananya uji coba layanan permintaan, pembayaran, sampai penyerahan (layanan D/O) 3. Terlaksana- nya layanan D/O secara <i>online</i> melalui platform kolaborasi Tersedianya dashboard jadwal dan ketersediaan tempat di kapal serta fitur pemesanan tempat di kapal pada platform kolaborasi								

2020 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
					(2020)							
65	4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional	Pembangunan Jalan Akses KI Bintuni (Bintuni - Susumuk)	Terbangunnya jalan dalam rangka mendukung pengembangan 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Panjang jalan yang dibangun (Km)	-	10 Km	15 Km	-	-	KemenPUPR	KemenATR/ BPN dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD
66	4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional	Pembangunan Jalan Sp.3 Moyana - Wanoma (Keterangan: Termasuk dalam ruas Trans Papua)	Terbangunnya jalan dalam rangka mendukung pengembangan 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (Km)	-	√	-	-	-	KemenPUPR	KemenATR/ BPN dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD
67	4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional	Pembangunan Jalan Akses KI Madura	Terbangunnya jalan dalam rangka mendukung pengembangan 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Panjang jalan yang dibangun (Km)	-	-	-	5 Km	-	KemenPUPR	KemenATR/ BPN dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

4.10. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
68	4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional	Pembangunan Jalan Akses KI Ketapang	Terbangunnya jalan dalam rangka mendukung pengembangan 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Panjang jalan yang dibangun (Km)	-	-	-	12 Km	-	KemenPUPR	KemenATR/ BPN dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD
69	4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional	Pembangunan Jalan Akses KIPI Tanah Kuning	Terbangunnya jalan dalam rangka mendukung pengembangan 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Panjang jalan yang dibangun (Km)	-	-	12,5 Km	12,5 Km	-	KemenPUPR	KemenATR/ BPN dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD
70	4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional	Pembangunan Jalan akses KI Sadai	Terbangunnya jalan dalam rangka mendukung pengembangan 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Panjang jalan yang dibangun (Km)	2 Km	3,9 Km	1 Km	-	-	KemenPUPR	KemenATR/ BPN dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

4.10. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
71	4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional	Pembangunan Jalan lintas Bintan	Terbangunnya jalan dalam rangka mendukung pengembangan 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Panjang jalan yang dibangun (Km)	-	-	25 Km	-	-	KemenPUPR	KemenATR/ BPN dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD
72	4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional	Pembangunan Jalan Akses KEK Galang Batang I	Terbangunnya jalan dalam rangka mendukung pengembangan 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Panjang jalan yang dibangun (Km)	1,8 Km	-	-	-	-	KemenPUPR	KemenATR/ BPN dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD
73	4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional	Pembangunan Jalan Trans Papua	Terbangunnya jalan dalam rangka mendukung pengembangan 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Panjang jalan yang dibangun (Km)	109,5 Km (2021) 109,5 Km (2020)	89,5 Km	89,5 Km	89,5 Km	-	KemenPUPR	KemenATR/ BPN dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

4.10. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
74	4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional	Pembangunan Jalan Trans Papua Barat	Terbangunnya jalan dalam rangka mendukung pengembangan 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Panjang jalan yang dibangun (Km)	109,5 Km (2021) 109,5 Km (2020)	89,5 Km	89,5 Km	89,5 Km	-	KemenPUPR	KemenATR/ BPN dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD
75	4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional	Pembangunan Jalan Akses KI Surya Borneo	Terbangunnya jalan dalam rangka mendukung pengembangan 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Panjang jalan yang dibangun (Km)	-	-	-	1 Km	-	KemenPUPR	KemenATR/ BPN dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD
76	4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional	Pembangunan Jalan Akses KI Jorong	Terbangunnya jalan dalam rangka mendukung pengembangan 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Panjang jalan yang dibangun (Km)	-	-	-	6 Km	-	KemenPUPR	KemenATR/ BPN dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

4.10. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
77	4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional	Pembangunan Jalan Akses KI Batu Licin	Terbangunnya jalan dalam rangka mendukung pengembangan 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Panjang jalan yang dibangun (Km)	-	-	-	6 Km	-	KemenPUPR	KemenATR/ BPN dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD
78	4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional	Pembangunan Jalan Akses KI Seimangke	Terbangunnya jalan dalam rangka mendukung pengembangan 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Panjang jalan yang dibangun (Km)	-	-	-	10 Km	-	KemenPUPR	KemenATR/ BPN dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD
79	4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional	Pembangunan Jalan akses KI Tanjung Enim	Terbangunnya jalan dalam rangka mendukung pengembangan 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Panjang jalan yang dibangun (Km)	3 Km	4 Km	4,3 Km	-	-	KemenPUPR	KemenATR/ BPN dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

4.10. Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
80	4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional	Pembangunan Jalan Akses KSPN Danau Toba	Terbangunnya jalan dalam rangka mendukung pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi	Panjang jalan yang dibangun (Km)	- (2021) 5 Km (2020)	-	-	-	-	KemenPUPR	KemenATR/ BPN dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

4.15. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
4.15. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan laut												
81	4.10. Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional	Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung di Prov. Sumatera Utara	Meningkatnya fasilitas pelabuhan guna mendukung aksesibilitas ke kawasan industri dan destinasi pariwisata: 1 Kawasan Industri Kuala Tanjung dan Sei. Mangkei Destinasi pariwisata prioritas Danau Toba Jaringan pelabuhan utama	Terselenggaranya standarisasi dan pengelolaan Pelabuhan Kuala Tanjung	Mulai beroperasi BNCT Fase 2 Optimalisasi Kinerja Terminal <i>Multipurpose</i> Kuala Tanjung	1. Mulai Lanjutan Pembangunan BNCT Fase 1 Optimalisasi Kinerja Terminal <i>Multipurpose</i> Kuala Tanjung	Pembangunan BNCT Fase 1 Optimalisasi Kinerja Terminal <i>Multipurpose</i> Kuala Tanjung	Pembangunan BNCT Fase 1 (selesai) Optimalisasi Kinerja Terminal <i>Multipurpose</i> Kuala Tanjung	BNCT Fase 1 dan 2 beroperasi seluruhnya Mulai pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung Tahap II	KemenBUMN	KemenBUMN, Kemenhub, Pemda, dan BUMN	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
82	4.15. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur	Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing Provinsi Kalimantan Barat	Menyediakan fasilitas Pelabuhan dalam rangka peningkatan konektivitas,	Tersedianya fasilitas Pelabuhan baru berskala internasional dengan	Pembangunan Terminal Kijing Tahap Inisial	Beroperasinya Terminal Kijing Tahap Inisial; Pembangunan Terminal Kijing	Pembangunan Terminal Kijing Tahap 1	Beroperasinya Seluruh Tahapan Inisial dan Tahap 1	Beroperasinya Seluruh Tahapan Inisial dan Tahap 1	KemenBUMN	Kemenhub, Pemda, dan BUMN	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	pelabuhan laut	(Pengembangan Pelabuhan laut oleh BUMN)	efisiensi biaya logistik, pengembangan infrastruktur kemaritiman, dan mendukung pengembangan kawasan industri dan wilayah lainnya di Kalimantan Barat	kedalaman -15 <i>Mean low water spring</i> (mLWS) dan kapasitas 1.95 juta <i>Twentyfoot Equivalin Units</i> (TEUs) dan 28.18 juta Ton		Tahap 1						
83	4.15. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan laut	Pembangunan <i>dry port</i> Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Provinsi Jawa Tengah	Terbangunnya <i>dry port</i> untuk mendukung KIT Batang di Provinsi Jawa Tengah	Penambahan <i>dry port</i> untuk mendukung KIT Batang di Provinsi Jawa Tengah dengan kapasitas 1,5 juta TEUs	-	<i>Dry port</i> KIT Batang - Pembangunan dan Pengoperasian Area Konsolidasi seluas 8 Ha	<i>Dry port</i> KIT Batang - Pembangunan dan Pengoperasian Area Konsolidasi seluas 8 Ha	<i>Dry port</i> KIT Batang - Pembangunan dan Pengoperasian Area Konsolidasi seluas 8 Ha	<i>Dry port</i> KIT Batang - Pembangunan dan Pengoperasian Area Konsolidasi seluas 43 Ha	KemenBUMN	Kemenhub, Pemda, dan BUMN	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

4.15. Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
84	4.15. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan laut	Pengembangan Pelabuhan Terminal Gilimas di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Meningkatnya fasilitas pelabuhan dalam rangka peningkatan konektivitas, efisiensi biaya logistik, pengembangan infrastruktur kemaritiman, dan mendukung pengembangan kawasan industri dan wilayah lainnya di Nusa Tenggara Barat	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan pelabuhan (lokasi)	Terminal Gilimas, Provinsi NTB - Pembangunan Terminal Petikemas (2021) Terminal Gilimas, Provinsi NTB - Pengoperasian Terminal Penumpang (2020)	Terminal Gilimas, Provinsi NTB - Pengoperasian Terminal Petikemas	-	-	Peningkatan kinerja Terminal Petikemas dengan penambahan alat Bongkar Muat	KemenBUMN	Kemenhub, Pemda, dan BUMN	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
85	4.15. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan laut	Terminal Manyar di Provinsi Jawa Timur	Meningkatnya fasilitas pelabuhan guna mendukung aksesibilitas ke Kawasan Industri Jawa <i>Integrated</i>	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan pelabuhan (lokasi)	-	Terminal Manyar di Provinsi Jawa Timur - Proses Pembangunan Dermaga	Terminal Manyar di Provinsi Jawa Timur - Proses Pembangunan Dermaga	Terminal Manyar di Provinsi Jawa Timur - Proses Pembangunan Dermaga	Peningkatan kinerja dengan penambahan alat bongkar muat di dermaga	KemenBUMN	Kemenhub, Pemda, dan BUMN	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

Industrial . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
			<i>Industrial Port Estate</i> di Provinsi Jawa Timur									
86	4.15. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan laut	<i>Bali Maritime Tourism Hub</i> (BMTH) di Provinsi Bali.	Meningkatnya fasilitas pelabuhan guna mendukung aksesibilitas ke Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger - Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan pelabuhan (lokasi)	<i>Bali Maritime Tourism Hub</i> (BMTH) di Provinsi Bali - Pekerjaan Pengerukan Kolam & Alur (2021) <i>Bali Maritime Tourism Hub</i> (BMTH) di Provinsi Bali - Penataan Infrastruktur Dasar Penunjang Pariwisata (2020)	<i>Bali Maritime Tourism Hub</i> (BMTH) di Provinsi Bali - Pekerjaan Pengerukan Kolam & Alur	<i>Bali Maritime Tourism Hub</i> (BMTH) di Provinsi Bali - Pembangunan <i>West Yacht Club</i>	<i>Bali Maritime Tourism Hub</i> (BMTH) di Provinsi Bali - Mulai Beroperasi	Peningkatan status Pelabuhan Benoa sebagai <i>Home Port Cruise</i>	KemenBUMN	Kemenhub, Pemda, dan BUMN	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
87	4.15. Pengembangan dan	Terminal <i>Multipurpose</i> Labuan Bajo	Meningkatnya fasilitas pelabuhan	Terselenggaranya standardisasi	Terminal <i>Multipurpose</i> Labuan Bajo di	-	-	-	Pembangunan area pendukung	KemenBUMN	Kemenhub, Pemda, dan BUMN	APBN (AP1), APBD, dan/atau

pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	pembangunan infrastruktur pelabuhan laut	di Provinsi Nusa Tenggara Timur	guna mendukung aksesibilitas ke Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	dan pengelolaan pelabuhan (lokasi)	Provinsi Nusa Tenggara Timur Mulai Beroperasi (2021) Terminal <i>Multipurpose</i> Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur – Proses Pembangunan (2020)					Pelabuhan seperti Logistik, Bisnis Perdagangan		Sumber lain yang sah
88	4.15. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan laut	1. Pengembangan Pelabuhan oleh BUMN: Pelabuhan Makassar (MNP) di Prov. Sulawesi Selatan Pelabuhan Bitung, di Prov. Sulawesi Utara Pelabuhan Sorong, di	Meningkatnya fasilitas pelabuhan guna mendukung aksesibilitas ke Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	Terselenggaranya standarisasi dan pengelolaan pelabuhan (lokasi)	(1) Pelabuhan Makassar (MNP) Lanjutan Pembangunan Tahap 1B dan 1C Pelabuhan Bitung: Lanjutan Pengadaan Alat Bongkar Muat, Elektrifikasi alat bongkar muat, lanjutan	(1) Pelabuhan Makassar (MNP): Lanjutan Pembangunan Tahap 1B dan 1C dan Pengadaan Alat Bongkar Muat Pelabuhan Sorong: Lanjutan pemasangan	(1) Pelabuhan Makassar (MNP): Lanjutan Pengadaan Alat Bongkar Muat Pelabuhan Bitung: Pembangunan Dermaga dan renovasi gedung kantor Pelabuhan	(1) Pelabuhan Makassar (MNP): Elektrifikasi alat bongkar muat Pelabuhan Bitung: Lanjutan Pembangunan Dermaga dan renovasi Pelabuhan	(1) Pelabuhan Makassar (MNP): Lanjutan Elektrifikasi alat bongkar muat Pelabuhan Bitung: Elektrifikasi alat bongkar muat Pelabuhan Sorong:	KemenBUMN	Kemenhub, Pemda, dan BUMN	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

Prov. . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
		Prov. Papua Barat			penambahan jalur FO Pelabuhan Sorong: Lanjutan Perkerasan CY, lanjutan Pengadaan Alat Bongkar Muat, pemasangan instalasi ME di CY (2021)	instalasi ME di CY	Alat Bongkar Muat	Sorong: Pembebasan lahan dan pembangunan fasilitas penunjang	Elektrifikasi alat bongkar muat			
					(1) Pelabuhan Makassar (MNP): Pembangunan Tahap 1B & 1C, Pengadaan Alat Bongkar Muat, dan Pembebasan Lahan (2020)							
89	4.15. Pengembangan dan	Rekonstruksi Pelabuhan Teluk Palu di	Mengembalikan fungsi pelayanan	Pelabuhan yang di rehabilitasi	Diselesaikannya seluruh studi	Dimulainya pekerjaan konstruksi 3	Diselesaikannya Terminal Pantoloan,	-	-	Kemenuhub	Pemda, BUMN, dan Swasta	APBN (AP1), APBD, dan/atau

pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	pembangunan infrastruktur pelabuhan laut	Prov.Sulawesi Tengah	infrastruktur pelabuhan pascabencana sebagai simpul ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah	meliputi: 1.Terminal Pantoloan; 2. Terminal Donggala; 3. Terminal Wani	perencanaan masing-masing terminal	Terminal	Donggala, dan Wani					Sumber lain yang sah
90	4.15. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan laut	Pembangunan KA akses Pelabuhan Tanjung Emas di Prov. Jawa Tengah	Terbangunnya akses jalur kereta api ke pelabuhan	KA akses Pelabuhan yang dibangun (km)	-	2 Km (selesai)	-	-	-	Kemenhub	Pemda, BUMN, dan Swasta	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
91	4.15. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan laut	Pembangunan Pelabuhan penyeberangan di Prov. Bangka Belitung: Pelabuhan Manggar Pelabuhan Tj. Kelayang (Tj. Nyato)	Terbangunnya pelabuhan penyeberangan Manggar dan Tanjung Kelayang guna mendukung aksesibilitas ke destinasi pariwisata Bangka Belitung	Pelabuhan yang dibangun (lokasi)	1. Pelabuhan Tj. Kelayang: 1 (selesai) (2021) 2. Pelabuhan Tj. Kelayang: 1 (berlanjut) (2020)	-	Pelabuhan Manggar: 1 (berlanjut)	Pelabuhan Manggar: 1 (selesai)	-	Kemenhub	Pemda, BUMN, dan Swasta	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

4.15. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
92	4.15. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan laut	Pengembangan Pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan: Pelabuhan Bau-Bau di Prov. Sulawesi Tenggara; Pelabuhan Labuan Bajo, Wanci di Prov. Sulawesi Tenggara; Pelabuhan Likupang di Prov. Sulawesi Utara; (4). Pelabuhan Labuan Bajo (Terminal Multipurpose) di Prov. NTT; (5) Pelabuhan Gili Trawangan di Prov. NTB.	Meningkatnya pelabuhan guna mendukung aksesibilitas ke destinasi pariwisata Wakatobi, Manado-Likupang, Labuan Bajo, Lombok Mandalika	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	1. Pelabuhan Labuan Bajo: 1 (Selesai) 2. Pelabuhan Gili Trawangan: 1 (selesai) 3. Pelabuhan Likupang: 1 (berlanjut)	1. Pelabuhan Bau-Bau: 1 (Selesai) 2. Pelabuhan Wanci: 1 (selesai) 3. Pelabuhan Likupang: 1 (selesai)	-	-	-	Kemenuhub	Pemda, BUMN, dan Swasta	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

4.15. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
93	4.15. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan laut	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Prov. Sulawesi Tenggara (Pelabuhan Kaledupa, Pelabuhan Siompu, Pelabuhan Kadatua, Pelabuhan Binongko, Pelabuhan Tomia)	Terbangunnya pelabuhan penyeberangan di Kaledupa, Siompu, Kadatua, Binongko, dan Tomia guna mendukung aksesibilitas ke destinasi pariwisata Wakatobi	Pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1. Pelabuhan Siompu: 1 (berlanjut) 2. Pelabuhan Kadatua: 1 (berlanjut)Pelabuhan Binongko: 1 (selesai) 3. Pelabuhan Tomia: 1 (selesai) (2021) 1. Pelabuhan Kaledupa: 1 (selesai) 2. Pelabuhan Siompu: 1 (berlanjut) 3. Pelabuhan Kadatua: 1 (berlanjut) 4. Pelabuhan Binongko: 1 (berlanjut) 5. Pelabuhan Tomia: 1 (berlanjut) (2020)	1. Pelabuhan Siompu: 1 (selesai) 2. Pelabuhan Kadatua: 1 (selesai)	-	-	-	Kemenuh	KemenATR/BPN dan Pemda	APBN (AP1) dan/atau APBD

4.15. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
94	4.15. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan laut	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Siladen di Prov. Sulawesi Utara	Terbangunnya pelabuhan penyeberangan Siladen guna mendukung aksesibilitas ke destinasi pariwisata Manado-Likupang	Pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1 Lokasi (berlanjut)	1 Lokasi (berlanjut)	Kemenuhub	KemenuATR/BPN dan Pemda	APBN (AP1) dan/atau APBD
95	4.15. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan laut	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati di Prov. Papua Barat	Terbangunnya pelabuhan penyeberangan Salawati guna mendukung aksesibilitas ke destinasi pariwisata Raja Ampat	Pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1 Lokasi (berlanjut)	1 Lokasi (berlanjut)	1 Lokasi (selesai)	-	-	Kemenuhub	Pemda, BUMN, dan Swasta	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
96	4.15. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan laut	Pengerukan alur pelayaran/ kolam pelabuhan	Terlaksananya pengerukan alur pelayaran sesuai dengan kedalaman dalam perencanaan penggunaan alur	32 lokasi pengerukan alur	5 Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi	3 Lokasi	Kemenuhub	KLHK, KKP, Pemda, dan BUMN	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

4.15. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
97	4.15. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan laut	Pembangunan dan peningkatan jalan akses menuju pelabuhan	Terbangunnya panjang jalan menuju pelabuhan jalan dan rel kereta api menuju dan ke pelabuhan harus terpadu pada sistem intermoda transportasi terutama ke dan dari kawasan industri agar dapat menurunkan <i>dwelling time</i>	25 lokasi pelabuhan Jakarta (tanjung priok/ Kalibaru), Kab. Subang (Patimban), Surabaya (Tanjung Perak) dan Gresik, Semarang (Tanjung Mas), Sumatra Utara (Belaan dan Kuala Tanjung)	√	√	√	√	-	KemenPUPR	Kemenhub, Pemda, dan Swasta	APBN (AP1), APBD dan/atau Sumber lain yang sah
98	4.15. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan laut	Pengembangan pelabuhan tol laut	Penataan pelabuhan hub sebagai <i>global transshipment port</i> di Asia Tenggara	<i>Integrated Port Network (IPN)</i>	√	√	√	√	-	KemenPUPR	Kemenhub dan BUMN	APBN (AP5) dan/atau Sumber lain yang sah

4.15. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
99	4.15. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan laut	Pembangunan Pasar Ikan Bertaraf Internasional	Terbangunnya pasar ikan bertaraf internasional	Pasar Ikan Bertaraf Internasional yang dibangun (lokasi)	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	KKP	Kemendag dan Pemda	APBN (AP1) dan/atau APBD
4.16. Pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam												
100	4.16. Pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam	Penyediaan fasilitas Air Bersih di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Ketersediaan Air Bersih di Daerah Tertinggal	Sarana air bersih yang dibangun di pulau kecil dan terluar	1 Kabupaten	1 Kabupaten	1 Kabupaten	1 Kabupaten	-	Kemendes PDTT	Pemda	APBN (AP2) dan/atau APBD
101	4.16. Pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam	Penyediaan Paket <i>Converter Kit</i> untuk Nelayan	Tersedianya paket <i>Converter Kit</i> untuk Nelayan (unit)	Jumlah paket <i>Converter Kit</i> untuk Nelayan (unit)	28.000 Unit	40.000 Unit	15.000 Unit	15.000 Unit	Belum dapat dipastikan	KemenESDM	KKP, Pemda, dan BUMN	APBN (AP2), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

mengembangkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	mengembangkan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam											
102	4.16. Pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam	Peningkatan infrastruktur kilang minyak bumi (unit)	Meningkatnya kapasitas kilang di dalam negeri	Tahapan peningkatan infrastruktur kilang minyak bumi di <i>Refinery Development Unit dan Master Plan</i> (RDMP) Cilacap	RDMP Cilacap Phase 1: Pembuatan dokumen <i>BED DHT Unit dan DHT Complex</i> (DHT, HMU, SRU) RDMP Cilacap Phase 2: Pelaksanaan pekerjaan Early Work Pengadaan lahan TNI Proses pembahasan <i>Partnership</i>	RDMP Cilacap Phase 1: Pelaksanaan Pekerjaan <i>Dual FEED Competition/ DFC (Front and Engineering Design, Site Development) dan Contract Award EPC</i>	RDMP Cilacap Phase 1: Pekerjaan <i>EPC (Engineering, Procurement, and Construction)</i> RDMP Cilacap Phase 2: Pekerjaan <i>EPC (Engineering, Procurement, and Construction)</i>	RDMP Cilacap Phase 1: Pekerjaan <i>EPC (Engineering, Procurement, and Construction)</i> RDMP Cilacap Phase 2: Pekerjaan <i>EPC (Engineering, Procurement, and Construction)</i>	RDMP Cilacap Phase 1: Pekerjaan <i>EPC (Engineering, Procurement, and Construction)</i> RDMP Cilacap Phase 2: Pekerjaan <i>EPC (Engineering, Procurement, and Construction)</i>	KemenESDM	KKP, Pemda, dan BUMN	APBN (AP5), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

4.16. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
103	4.16. Pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam	Pembangunan kapal penyebrangan perintis Kaledupa-Tomia-Binongko	Terbangunnya kapal penyebrangan perintis Kaledupa-Tomia-Binongko guna mendukung aksesibilitas ke destinasi pariwisata Wakatobi	Kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1 Unit (selesai)	-	-	-	-	Kemenhub	Kemenparekraf	APBN (AP1)
104	4.16. Pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam	Sarana dan Prasarana pemasaran yang dibangun	Terlaksananya pembangunan pasar ikan yang bersih	Jumlah pasar ikan yang dibangun (unit)	2 Unit (2021) 4 Unit (2020)	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	KKP	KemenPUPR, Pemda, dan Swasta	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

4.16. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
105	4.16. Pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam	Fasilitasi Sarana Rantai Dingin dan Pengolahan kepada UMKM	Meningkatnya volume produk olahan hasil kelautan dan perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan yang disediakan (unit)	500 Unit (2021) 400 Unit (2020)	500 Unit	500 Unit	500 Unit	500 Unit	KKP	KemenPUPR, KemenESDM, dan Pemda	APBN (AP1) dan/atau APBD
106	4.16. Pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam	Pengembangan Kluster Budidaya Udang	Terbangunnya kluster budidaya udang guna mendukung Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	Jumlah kluster budidaya udang yang terbangun sebanyak 50 lokasi (Kumulatif)	28 Lokasi (2021) 7 Lokasi (2020)	28 Lokasi	39 Lokasi	50 Lokasi	50 Lokasi	KKP	Kemendes PDPT, KemenPUPR, KLHK, Keminvest/BKPM, Pemda, dan Swasta	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

4.16. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
107	4.16. Pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam	Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tambak	Meningkatnya dan terhabilitasinya jaringan irigasi tambak udang dan bandeng	Jaringan irigasi tambak udang dan bandeng yang direhabilitasi/ditingkatkan di 4030 lokasi Pengelolaan Irigasi Kawasan Tambak (kumulatif)	55 Lokasi	20 Lokasi	25 Lokasi	30 Lokasi	30 Lokasi	KKP	Pemda	APBN (AP1) dan/atau APBD
108	4.16. Pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam	Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar	Pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (pulau)	Pesisir dan Pulau-Pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (kawasan)	10 Kawasan	11 Kawasan	22 Kawasan	22 Kawasan	22 Kawasan	KKP	KemenATR/BPN dan Pemda	APBN (AP2) dan/atau APBD
109	4.16. Pembangunan prasarana dan	Pembangunan/rehabilitasi Sarana dan	Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi	Jumlah pembangunan/rehabilitasi	41 Unit (2021)	45 Unit	49 Unit	53 Unit	53 Unit	KKP	Pemda	APBN (AP1) dan/atau

sarana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam	Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi) - Menu DAK Bidang KP	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan	Sarana dan Prasarana fasilitas pokok dan fungsional pelabuhan perikanan (unit)	37 Unit (2020)							APBD
110	4.16. Pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam	Penyediaan Sarana Prasarana Pengadaan dan Penyimpanan Ikan	Tersedianya Sarana Prasarana Pengadaan dan Penyimpanan guna mendukung Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Jumlah Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan (unit)	35 Unit (2021) 31 Unit (2020)	35 Unit	40 Unit	45 Unit	45 Unit	KKP	Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

4.16. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
111	4.16. Pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam	Penyediaan Sarana distribusi hasil perikanan	Tersedianya sarana distribusi hasil perikanan guna mendukung pengembangan Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Jumlah sarana distribusi hasil perikanan yang disediakan (unit)	41 Unit (2021) 41 Unit (2020)	41 Unit	45 Unit	50 Unit	50 Unit	KKP	Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD
4.18. Penyediaan kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, lahan, dan pembiayaan untuk kepentingan pengembangan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam												
112	4.18. Penyediaan kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, lahan, dan	Penyediaan Informasi Peluang Pasar Ekspor	Tersedianya Analisa Pasar di negara tujuan ekspor yang informatif dan kredibel	Analisa pasar di negara tujuan ekspor (kegiatan)	100%	100%	100%	100%	100%	Kemendag	Kemenko Marves, Kemenko Ekon, Kemenperin, KKP, Kemlu, dan Swasta	APBN (AP1) dan/atau Sumber lain yang sah

pembiayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	pembiayaan untuk kepentingan pengembangan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam											
113	4.18. Penyediaan kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, lahan, dan pembiayaan untuk kepentingan pengembangan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam	Akses Internet BAKTI	Tersedianya akses internet khususnya di kelautan dan daerah pesisir guna mendukung Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Paloh-Aruk, PKSN Merauke	Jumlah titik lokasi penyediaan akses internet khususnya di kelautan dan daerah pesisir	2 (PKSN Paloh-Aruk, PKSN Merauke)	-	-	-	-	Kemenkominfo	Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

4.18. Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
114	4.18. Penyediaan kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, lahan, dan pembiayaan untuk kepentingan pengembangan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam	Fasilitasi kredit perikanan tangkap untuk nelayan	Tersedianya akses pembiayaan usaha bagi nelayan yang tertata dan terintegrasi di 34 provinsi	Jumlah provinsi yang nelayannya terfasilitasi kredit perikanan tangkap (Provinsi)	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	KKP	Pemda, BUMN, dan Swasta	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
4.19. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di bidang kelautan, khususnya pada sektor perikanan, energi, dan pariwisata bahari												
115	4.19. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja sektor Kemaritiman di Daerah	Meningkatkan Kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah Pelatihan di Balai Ambon, pelatihan kemaritiman dengan	2 Angkatan	2 Angkatan	2 Angkatan	2 Angkatan	-	KemendesPDDT	Kemenko Marves, Kemenhub, dan KKP	APBN (AP2)

bidang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	bidang kelautan, khususnya pada sektor perikanan, energi, dan pariwisata bahari	Tertinggal		peserta dari pulau-pulau kecil terluar								
116	4.19. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di bidang kelautan, khususnya pada sektor perikanan, energi, dan pariwisata bahari	Pengembangan lapangan abadi wilayah kerja Masela	Meningkatnya produksi migas nasional	Persiapan produksi pada lapangan abadi wilayah kerja Masela	Persiapan dan pelaksanaan kegiatan FEED (<i>Front End Engineering Design</i>)	Persiapan dan proses persetujuan lelang kegiatan konstruksi Pembangunan Fasilitas Produksi Migas	Pelaksanaan kegiatan konstruksi Pembangunan Fasilitas Produksi Migas, EPCI (<i>Engineering, Procurement, Construction & Installation</i>)	Pelaksanaan kegiatan konstruksi Pembangunan Fasilitas Produksi Migas atau EPCI serta persiapan dan dimulainya pengeboran pengembangan	Pelaksanaan kegiatan FEED (<i>Front End Engineering Design</i>), Persetujuan AFE dan persiapan dokumen lelang konstruksi pembangunan fasilitas produksidan pengeboran	KemenESDM	SKK Migas, BUMN, dan Swasta	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
117	4.19. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi	Pengembangan lapangan Jangkrik dan Jangkrik North East (Jangkrik	Meningkatnya produksi migas nasional	Produksi migas wilayah kerja Muara Bakau dan East	<i>Drilling & Completion</i> Proyek Merakes <i>First Gas</i> Proyek	Melanjutkan produksi lapangan Jangkrik dan Merakes. <i>EPCI</i>	Melanjutkan produksi lapangan Jangkrik dan Merakes. <i>First</i>	Melanjutkan produksi lapangan Jangkrik dan Merakes. Eksek	Melanjutkan produksi lapangan Jangkrik dan Merakes.	KemenESDM	Pemda dan Swasta	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain

masyarakat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	masyarakat di bidang kelautan, khususnya pada sektor perikanan, energi, dan pariwisata bahari	Complex) wilayah kerja Muara Bakau dan Merakes wilayah kerja East Sepinggan, Kegiatan Eksplorasi Lapangan Maha WK West Ganal		Sepinggan, West Ganal	Merakes First Gas Proyek FPU Debottlenecking Pengadaan EPCI Booster Gas Compressor FPU Jangkrik Phase 2 Survey Geotechnical Pengembangan Lapangan Merakes East Reserve Certification Merakes EastPersiapan POD Merakes EastPemboran Sumur Eksplorasi WK West Ganal	Execution Booster Gas Compressor (BGC)-FPU Jangkrik Phase dan Persetujuan POD Merakes EastPersiapan dan Pelaksanaan FEED Merakes EastPengadaan EPCI Proyek Merakes EastSurvey Geophysical & Geotechnical WK West GanalStart FEED Proyek Pengembangan Lapangan Maha WK West Ganal Proses Pengadaan danStart Eksekusi	Gas Booster Gas Compressor (BGC)-FPU Jangkrik Phase 2. EPCI Execution Proyek Merakes East 3. EPCI Execution Proyek Maha	usi EPCI Proyek Merakes East.EPCI Execution Proyek Merakes East	Melanjutkan Produksi lapangan Merakes East Melanjutkan produksi lapangan Maha			yang sah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
118	4.19. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di bidang kelautan, khususnya pada sektor perikanan, energi, dan pariwisata bahari	Eksplorasi cadangan potensi migas nasional	Meningkatkan cadangan migas nasional melalui peningkatan kegiatan eksplorasi	Pemetaan potensi dan cadangan migas nasional	<i>Seismik Offshore: 2D (889 km):</i> - 461 km (WK WMO) - 428 km (KPJWEWK SE Madura)3D (678 km2): - 300 km2 (KP WKOff North X-ray) - 150 km2 (WKKangean)-228 km2 (South Natuna Sea Block B)	<i>Seismik Offshore:</i> 2D: - 3D: -	<i>Seismik Offshore: 2D: -</i> 3D (100 km2): -100 km2 (KKPWK Tarakan)	<i>Seismik Offshore: 2D: -</i> 3D: -	<i>Seismik Offshore: 2D: -</i> 3D: -	KemenESDM	KemenPPN/ Bappenas, Kemenperin, Pemda, BUMN, dan Swasta	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
119	4.19. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di bidang	Eksplorasi cadangan potensi migas nasional	Meningkatkan cadangan migas nasional melalui peningkatan kegiatan	Studi <i>Offshore</i> Gas Biogenik	Lead dan prospect sumber daya baru gas biogenik (<i>offshore oriented</i>) di	Drillable prospect beserta perhitungan keekonomian eksplorasi (<i>offshore</i>)	Analisis dan Potensi Sumber Daya Gas Biogenik Cekungan Bone (<i>offshore</i>)	-	-	KemenESDM	KemenPPN/ Bappenas, Kemenperin, Pemda, BUMN, dan Swasta	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

kelautan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	kelautan, khususnya pada sektor perikanan, energi, dan pariwisata bahari		eksplorasi		Cekungan Sumatera Tengah	<i>oriented</i>) di Cekungan Sumatera Tengah	<i>oriented</i>)					
120	4.19. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di bidang kelautan, khususnya pada sektor perikanan, energi, dan pariwisata bahari	Eksplorasi cadangan potensi migas nasional	Meningkatkan cadangan migas nasional melalui peningkatan kegiatan eksplorasi	Survey Geologi dan Geofisika (Seismik 2D dan Gaya Berat) Kelautan	Data potensi hidrokarbon Cekungan Makassar	-	Seismik 2D dan Gaya Berat Perairan Muna- Buton	Seismik 2D dan Gaya Berat Cekungan Muria Jawa Timur dan Cekungan Jawa Barat Utara Bagian Timur	Seismik 2D dan Gaya Berat Cekungan Biliton, Kalsel dan Cekungan Seram Utara, Maluku	KemenESDM	KemenPPN/ Bappenas, Kemenperin, Pemda, BUMN, dan Swasta	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

MATRIKS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

MATRIKS PILAR KKI KE-5: PENGELOLAAN RUANG LAUT DAN PELINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
5.4. Percepatan penyelesaian rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi												
1	5.4. Percepatan penyelesaian rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi	Garis Pantai Prioritas	Terselenggaranya pemetaan garis pantai	Km Garis Pantai	-	6.000 Km ²	9.000 Km ²	18.000 Km ²	8.000 Km ²	BIG	Kemenko Marves, KKP, dan TNI	APBN (AP5)

5.4. Percepatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
2	5.4. Percepatan penyelesaian rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi	Data Batimetri Prioritas	Terselenggaranya pengadaan data batimetri	Luas Kilometer (Km ²) data batimetri	1.250 Km ²	2.500 Km ²	2.500 Km ²	2.500 Km ²	2.500 Km ²	BIG	Kemenko Marves, KLHK, TNI, dan Pemda	APBN (AP7) dan/atau APBD
3	5.4. Percepatan penyelesaian rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi	Pemutakhiran peta Negara Kesatuan Republik Indonesia	Termutakhirnya peta Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia dimutakhirkan	1 Peta Wilayah NKRI	1 Peta Wilayah NKRI	1 Peta Wilayah NKRI	1 Peta Wilayah NKRI	1 Peta Wilayah NKRI	BIG	Kemenko Marves, Kemenko Polhukam, Kemlu, Kemhan, Kemendagri, KKP, dan BNPP	APBN (AP7)

5.4. Percepatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
4	5.4. Percepatan penyelesaian rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersedianya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Peraturan Pemerintah (PP)	PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	-	-	-	KemenATR/BPN	KKP, Kemensetneg, Kemenkumham, Setkab, dan Pemda	APBN (AP6) dan/atau APBD

5.4 Percepatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
5	5.4. Percepatan penyelesaian rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersedianya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	1 Peraturan Pemerintah (PP)	-	-	√	-	-	KemenATR/BPN	KKP, Kemensetneg, Kemenkumham, Setkab, dan Pemda	APBN (AP6) dan/atau APBD
6	5.4. Percepatan penyelesaian rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi	Perencanaan Ruang Laut	Tersedianya dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah, dan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah	3 RPerpres	4 RPerpres	3 RPerpres	2 RPerpres	-	KKP	Kemenko Marves, Kemenko Ekon, KemenPPN/Bappenas, KemenATR/BPN, Kemenhub, Kemenparekraf, KemenESDM, Kemhan, Kemenkumham, Kemlu, Kemensetneg, Setkab, TNI, Polri, BIG, BNPP, dan Pemda	APBN (AP6) dan/atau Pemda

5.4. Percepatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
7	5.4. Percepatan penyelesaian rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi	Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional	6 RPerpres	9 RPerpres	3 RPerpres	5 RPerpres	2 RPerpres	KemenATR/BPN	Kemenko Marves, Kemenko Ekon, KemenPPN/Bappenas, KemenATR/BPN, Kemenhub, Kemenparekraf, KemenESDM, Kemhan, Kemenkumham, Kemlu, Kemensetneg, Setkab, TNI, Polri, BIG, BNPP, dan Pemda	APBN (AP6) dan/atau Pemda

5.5. Penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
5.5. Penyediaan data informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik terpadu dalam kerangka kebijakan satu peta untuk penyusunan tata ruang laut												
8	5.5. Penyediaan data informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik terpadu dalam kerangka kebijakan satu peta untuk penyusunan tata ruang laut	Batimetri Nasional	Terselenggaranya pengelolaan data batimetri nasional	Luas Kilometer (Km ²) data batimetri	46.000 Km ²	1.250 Km ²	42.000 Km ²	2.000 Km ²	2.000 Km ²	BIG	Kemenko Marves, KemenESDM, Kemenhub, TNI, dan BRIN	APBN (AP1)

5.5. Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
9	5.5. Penyediaan data informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik terpadu dalam kerangka kebijakan satu peta untuk penyusunan tata ruang laut	Survey dan Pemetaan Tematik	Terwujudnya Sistem Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	Cakupan Luas Peta Tematik Kawasan	25.000 Ha	25.000 Ha	25.000 Ha	25.000 Ha	25.000 Ha	KemenATR/BPN	BIG dan BRIN	APBN (AP1)
10	5.5. Penyediaan data informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik terpadu dalam kerangka	Pemetaan Geologi Kelautan	Tersedianya peta informasi geospasial dalam rangka mendukung kebijakan satu peta	Peta Informasi Geospasial Tematik PKSP	7 (Perairan Sumatera)	7 (Perairan Kalimantan bagian Timur)	7 (Perairan Kalimantan bagian Tengah)	7 (Perairan Sulawesi)	7 (Perairan Maluku)	KemenESDM	Kemenko Ekon, KemenPPN/Bappenas, KKP, KLHK, KemenATR/BPN, BNPB, BIG, BRIN, BRGM, Pemda, Perguruan Tinggi, dan	APBN (AP6), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

kebijakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	kebijakan satu peta untuk penyusunan tata ruang laut										Swasta	
11	5.5. Penyediaan data informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik terpadu dalam kerangka kebijakan satu peta untuk penyusunan tata ruang laut	Pemetaan Geologi yang berkualitas dalam penelitian dan penyelidikan Air Tanah	Penanganan bencana <i>land subsidence</i> secara mitigatif dan adaptatif	Jumlah Peta Zona Kerentanan Likuifaksi	2 Peta	2 Peta	2 Peta	2 Peta	-	KemenESDM	Kemenko Ekon, KemenPPN/ Bappenas, KemenPUPR, KKP, KLHK, KemenATR/ BPN, BNPB, BIG, BRIN, BRGM, Pemda, Perguruan Tinggi, dan Swasta	APBN (AP6), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

5.5. Penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
12	5.5. Penyediaan data informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik terpadu dalam kerangka kebijakan satu peta untuk penyusunan tata ruang laut	Pemetaan Geologi yang berkualitas dalam penelitian dan penyelidikan Air Tanah	Penanganan bencana <i>land subsidence</i> secara mitigatif dan adaptatif	Jumlah Peta Penurunan Muka Tanah	2 Peta	2 Peta	2 Peta	2 Peta	-	KemenESDM	Kemenko Ekon, KemenPPN/ Bappenas, KemenPUPR, KKP, KLHK, KemenATR/ BPN, BNPB, BIG, BRIN, Kemenperin, Kementan, BRGM, Pemda, Perguruan Tinggi, dan Swasta	APBN (AP6), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
13	5.5. Penyediaan data informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik terpadu dalam kerangka kebijakan satu	Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi	Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana Geologi	Jumlah Sosialisasi dan Informasi Mitigasi Bencana Geologi (Wilayah/ Kabupaten)	29 Wilayah/ Kabupaten	29 Wilayah/ Kabupaten	29 Wilayah/ Kabupaten	29 Wilayah/ Kabupaten	-	KemenESDM	Kemenko Ekon, KemenPPN/ Bappenas, KemenPUPR, KKP, KLHK, KemenATR/ BPN, BNPB, BIG, BRIN, Kemenperin, Kementan, BRGM, Pemda,	APBN (AP6), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

peta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 190 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*	
					2021	2022	2023	2024	2025				
	peta untuk penyusunan tata ruang laut										Perguruan Tinggi, dan Swasta		
5.6. Penyederhanaan perizinan pengelolaan ruang laut													
14	5.6. Penyederhanaan perizinan pengelolaan ruang laut	Pembangunan sistem perizinan pemanfaatan ruang laut secara elektronik	Tersedianya sistem perizinan pemanfaatan ruang laut secara elektronik	Sistem perizinan pemanfaatan ruang laut secara elektronik	- (2021) 1 Sistem Perizinan (2020)	-	-	-	-	-	KKP	Kemenko Marves, Kemenko Ekon, dan Keminvest/ BKPM	APBN (AP5)
15	5.6. Penyederhanaan perizinan pengelolaan ruang laut	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Terkendalinya pemanfaatan ruang laut	Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah	7 Lokasi (2021) 7 Lokasi (2020)	14 Lokasi	40 Lokasi	46 Lokasi	46 Lokasi	46 Lokasi	KKP	KemenATR/BPN dan Pemda	APBN (AP1) dan/atau APBD

5.7. Penguatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
5.7. Penguatan pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil melalui manajemen terpadu dan berkelanjutan												
16	5.7. Penguatan pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil melalui manajemen terpadu dan berkelanjutan	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR melalui pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah Pengendalian Pemanfaatan Ruang kawasan dan sekitar Sungai, Danau, Embung, Waduk (SDEW) di Wilayah Sungai (lokasi)	2 DAS (2021) 3 DAS (2020)	2 DAS	2 DAS	2 DAS	2 DAS	KemenATR/ BPN	Kemenko Marves, KemenPUPR, KLHK, Kemendagri, BIG, dan Pemda	APBN (AP1) dan/atau APBD
17	5.7. Penguatan pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil	Pemetaan Geologi yang berkualitas dalam penelitian dan penyelidikan Air Tanah	Terselenggaranya Konservasi Air Tanah dan Penurunan Muka Tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	Jumlah Lokasi Konservasi Air Tanah dan Penurunan Muka Tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	-	KemenESDM	KemenPPN/ Bappenas, KemenPUPR, KKP, KLHK, KemenATR/ BPN, BNPB, BIG, BRIN, Kemenperin,	APBN (AP5), APBD dan/atau Sumber lain yang sah

melalui . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	melalui manajemen terpadu dan berkelanjutan		Berbasis Cekungan Air Tanah	(Kab/Kota)							Kementan, BRGM, Perguruan Tinggi, Pemda, dan Swasta	
18	5.7. Penguatan pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil melalui manajemen terpadu dan berkelanjutan	Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	Panjang sungai yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya di wilayah sungai kritis (Km)	13 Km (2021) 23,7 Km (2020)	15 Km	15 Km	18 Km	-	KemenPUPR	KLHK dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD
19	5.7. Penguatan pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir, laut,	Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai	Pengamanan Pesisir Perkotaan di Pantura Jawa	Panjang sungai yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas	14 Km (2021) 32,2 Km (2020)	10 Km	11 Km	4 Km	-	KemenPUPR	KLHK dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

dan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 193 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	dan pulau-pulau kecil melalui manajemen terpadu dan berkelanjutan			alirannya di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (Km)								
20	5.7. Penguatan pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil melalui manajemen terpadu dan berkelanjutan	Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	Jumlah sambungan rumah yang terlayani Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal (Sumbungan Rumah)	4.832 Sumbungan Rumah (2021) 4.832 Sumbungan Rumah (2020)	4.832 Sumbungan Rumah	4.832 Sumbungan Rumah	4.832 Sumbungan Rumah	-	KemenPUPR	KLHK dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD
21	5.7. Penguatan pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil melalui	Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	Jumlah sambungan rumah yang terlayani Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota/Regional (Sumbungan	628,4 Sumbungan Rumah	628,4 Sumbungan Rumah	628,4 Sumbungan Rumah	628,4 Sumbungan Rumah	-	KemenPUPR	KLHK dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

manajemen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 194 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	manajemen terpadu dan berkelanjutan	Kota/Regional		Rumah)								
22	5.7. Penguatan pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil melalui manajemen terpadu dan berkelanjutan	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	Jumlah TPA yang dibangun (unit)	- (2021) 3 Unit (2020)	1 Unit	2 Unit	1 Unit	-	KemenPUPR	KLHK dan Pemda	APBN (AP5)
23	5.7. Penguatan pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil melalui manajemen terpadu dan berkelanjutan	Penyusunan rencana pengelolaan terpadu kawasan pesisir utara jawa	Pengamanan Pesisir Perkotaan Pantura Jawa	Jumlah kawasan perkotaan pesisir utara jawa yang memiliki rencana pengelolaan pesisir terpadu (kawasan perkotaan)	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	-	KemenPUPR	KLHK dan Pemda	APBN (AP5)
24	5.7. Penguatan pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir, laut,	Pembangunan infrastruktur hijau untuk mendukung	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	Jumlah kolam retensi multifungsi yang	5 Unit (2021) 3 Unit (2020)	8 Unit	10 Unit	10 Unit	-	KemenPUPR	KLHK dan Pemda	APBN (AP5)

dan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 195 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	dan pulau-pulau kecil melalui manajemen terpadu dan berkelanjutan	ketahanan wilayah terhadap bencana banjir		dibangun atau ditingkatkan di wilayah sungai kritis (unit)								
25	5.7. Penguatan pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil melalui manajemen terpadu dan berkelanjutan	Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis mangrove Pengelolaan Ekosistem Mangrove	Terwujudnya peningkatan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan	Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis mangrove Tersedianya Peta Jalan Pengelolaan Mangrove Nasional	√	√	√	√	√	Kemenko Marves	KemenPPN/ Bappenas, KLHK, KKP, KemendesPDTT, BRGM, Kemendagri, KemenBUMN, Kemenkeu, BRIN, BIG, Pemda, dan Swasta	APBN (AP6), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

5.7. Penguatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
26	5.7. Penguatan pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil melalui manajemen terpadu dan berkelanjutan	Pemetaan potensi <i>land subsidence</i> kota-kota besar, kawasan strategis nasional dan kawasan industri	Tersedianya informasi kondisi 4 DAS dalam rangka Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	Jumlah informasi kondisi 4 DAS Prioritas: Citarum (Jawa Barat) Cisadane (Banten, Jawa Barat) Ciliwung (DKI Jakarta, Jawa Barat) Serayu (Jawa Tengah)	4 Unit (informasi)	4 Unit (informasi)	4 Unit (informasi)	4 Unit (informasi)	4 Unit (informasi)	BRIN	Kemenko Marves, KLHK, BIG, BNPP, dan Pemda	APBN (AP6) dan/atau APBD
5.9. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut												
27	5.9. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut	Pengembangan Pemantauan Radiasi Lingkungan Produk Dalam Negeri	Tersedianya Sistem Pemantau Radiasi Lingkungan Produk Dalam Negeri	Prototipe Deteksi Radiasi Akuatik (Kelautan) di Perairan Laut sebagai Sistem Peringatan Dini masuknya Kontaminan Radioaktif ke	1 Unit Prototipe (2021) 1 Unit Prototipe (2020)	1 Unit Prototipe	1 Unit Prototipe	1 Unit Prototipe	-	BRIN	Kemenko Marves, Bapeten, BRIN, dan Perguruan Tinggi	APBN (AP6) dan/atau Sumber lain yang sah

Perairan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 197 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
				Perairan Indonesia								
28	5.9. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut	Penyelenggaraan SPALD-T skala kota/regional	Meningkatnya rumah tangga yang terhubung dengan SPALD-T untuk penguatan sanitasi rumah tangga dalam upaya Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan <i>Stunting</i>	Jumlah sambungan rumah tangga yang terhubung SPALD-Terpusat skala kota	62.352 (2021) 62.352 (2020)	62.352	62.352	62.352	-	KemenPUPR	Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD
29	5.9. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut	Penyelenggaraan SPALD-T skala permukiman	Meningkatnya rumah tangga yang terhubung dengan SPALD-T untuk penguatan	Jumlah sambungan rumah tangga yang terhubung SPALD-Terpusat skala	284.145 (2021) 303.028 (2020)	284.145	284.145	284.145	-	KemenPUPR	Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

sanitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 198 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
			sanitasi rumah tangga dalam upaya Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan <i>Stunting</i>	permukiman								
30	5.9. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut	Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) skala kota (IPLT)	Terbangunnya IPLT untuk penguatan sanitasi lingkungan dalam upaya Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan <i>Stunting</i>	Jumlah IPLT terbangun (unit)	77 unit (2021) 24 unit (2020)	101 unit	152 unit	151 unit	-	KemenPUPR	Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD
31	5.9. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan	Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	Terfasilitasinya pelayanan air minum dan sanitasi untuk meningkatkan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik)	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan air minum	-	1 Kab/kota	1 Kab/kota	1 Kab/kota	-	KemenPUPR	Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

lingkungan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 199 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	lingkungan laut		Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	dan sanitasi (air limbah) yang terintegrasi								
32	5.9. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut	Penyelenggaraan SPALD-S skala individu	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik untuk mendukung sanitasi lingkungan dalam upaya Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan <i>Stunting</i>	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik sesuai standar (rumah tangga)	2.940.304 (2021) 2.940.304 (2020)	2.940.304	2.940.304	2.940.304	-	KemenPUPR	Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

5.9. Pencegahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 200 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
33	5.9. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut	Penyelenggaraan SPALD-T Skala Permukiman	Meningkatnya pelayanan IPAL kawasan permukiman untuk mendukung Pengamanan Pesisir Perkotaan Pantura Jawa	Jumlah sambungan rumah yang terlayani IPAL Komunal (Sumbungan Rumah)	4.442,8 Sumbungan Rumah (2021) 4.442,8 Sumbungan Rumah (2020)	4.442,8 Sumbungan Rumah	4.442,8 Sumbungan Rumah	4.442,8 Sumbungan Rumah	-	KemenPUPR	Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD
34	5.9. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut	Penyelenggaraan SPALD-T Skala Kota/Regional	Meningkatnya pelayanan IPAL kawasan kota/regional untuk mendukung Pengamanan Pesisir Perkotaan Pantura Jawa	Jumlah sambungan rumah yang terlayani IPAL Kota/Regional (Sumbungan Rumah)	2.056,24 Sumbungan Rumah (2021) 2.056,24 Sumbungan Rumah (2020)	2.056,24 Sumbungan Rumah	2.056,24 Sumbungan Rumah	2.056,24 Sumbungan Rumah	-	KemenPUPR	Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

5.9. Pencegahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 201 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
35	5.9. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut	Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	Terbangunnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk memperkuat pengelolaan persampahan skala kota dalam upaya Pengamanan Pesisir Perkotaan Pantura Jawa	Jumlah TPA yang dibangun (unit)	4 unit (2021) 4 unit (2020)	4 unit	4 unit	5 unit	-	KemenPUPR	Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD
36	5.9. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut	Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan	Terbangunnya Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, dan Recycle</i> (TPS3R) untuk memperkuat pengelolaan persampahan	Total kapasitas olahan dari TPS3R yang terbangun (ton/hari)	90,7 ton/hari (2021) 90,7 ton/hari (2020)	90,7 ton/hari	90,7 ton/hari	90,7 ton/hari	-	KemenPUPR	Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

skala . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 202 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
			skala kawasan dalam upaya Pengamanan Pesisir Perkotaan Pantura Jawa									
37	5.9. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut	Fasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (termasuk pengelolaan lumpur tinja)	Terfasilitasinya penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan ari limbah domestik untuk meningkatkan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (kab/kota)	87 kab/kota (2021) 87 kab/kota (2020)	87 kab/kota	88 kab/kota	88 kab/kota	-	KemenPUPR	Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD
38	5.9. Pencegahan,	Pendayagunaan pesisir dan	Kawasan pesisir dan	Jumlah Kawasan	8 kawasan	6 kawasan	12 kawasan	12 kawasan	12 kawasan	KKP	KLHK, BNPB,	APBN (AP6) dan/atau

penanggulangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 203 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut	pulau- pulau kecil	Pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)	(2021) 2 kawasan (2020)						dan BMKG	APBD
39	5.9. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut	Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil	Kawasan Mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	Luasan kawasan mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	400 ha (2021) 200 ha (2020)	400 ha	400 ha	400 ha	400 ha	KKP	KLHK, Pemda	APBN (AP6) dan/atau APBD
40	5.9. Pencegahan,	Pendayagunaan pesisir dan	Kawasan pesisir dan	Jumlah kawasan	6 kawasan (2021)	10 kawasan	5 kawasan	5 kawasan	5 kawasan	KKP	Pemda	APBN (AP6) dan/atau

penanggulangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut	pulau-pulau kecil	pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	pebisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran (kawasan)	2 kawasan (2020)							APBD
41	5.9. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut	Pembangunan UPI bernilai tambah menuju <i>Zero Waste</i>	Terbangunnya UPI bernilai tambah untuk mendukung Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas	Jumlah UPI bernilai tambah yang dibangun menuju <i>Zero Waste</i> (lokasi)	2 Lokasi (2021) 2 Lokasi (2020)	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	KKP	Pemda	APBN (AP1) dan/atau APBD
42	5.9. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak	Pemulihan fungsi ekosistem pesisir dan laut	Terlaksananya pemulihan Padang Lamun/ Terumbu	Jumlah lokasi pemulihan Padang Lamun/ Terumbu	5 Lokasi	6 Lokasi	8 Lokasi	10 Lokasi	-	KLHK	Pemda	APBN (AP6) dan/atau APBD

pencemaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 205 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	pencemaran dan kerusakan lingkungan laut		Karang sesuai Fungsinya	Karang yang dipulihkan fungsi ekosistemnya								
43	5.9. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut	Pemantauan Kualitas Air Laut	Terpantaunya kualitas air laut untuk mendukung Penguatan <i>National Security Operation Center-Security Operation Center (NSOC-SOC)</i> dan Pembentukan <i>Computer Security Incident Response Team (CSRIT)</i> , serta Destinasi Pariwisata Prioritas	Jumlah provinsi yang terpantau kualitas air lautnya (provinsi)	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	-	KLHK	Pemda	APBN (AP6) dan/atau APBD

5.9. Pencegahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 206 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
44	5.9. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut	Penanggulangan Pencemaran Tumpahan Minyak dan Kejadian Pencemaran Kerusakan Pesisir dan Laut	Tertanggulangnya pencemaran tumpahan minyak dan kejadian pencemaran kerusakan pesisir dan laut untuk mendukung Pembangunan Wilayah Batam Bintan	Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran tumpangan minyak dan kejadian pencemaran kerusakan pesisir dan laut	12 Lokasi (2021) 2 Lokasi (2020)	12 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	-	KLHK	Kemenko Marves, KKP, Bakamla, Kemenhub, dan Pemda	APBN (AP6) dan/atau APBD
45	5.9. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut	Pelaksanaan pengendalian pencemaran pesisir dan laut di kawasan pelabuhan	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 untuk mendukung pengendalian pencemaran pesisir dan laut di kawasan pelabuhan	Jumlah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut	25 Pelabuhan	30 Pelabuhan	40 Pelabuhan	50 Pelabuhan	-	KLHK	Kemenhub	APBN (AP6)

5.9. Pencegahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 207 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
46	5.9. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut	Pemantauan Sampah Laut dan Coastal Clean Up	Terpantaunya sampah laut untuk mendukung Penguatan NSOC- SOC dan Pembentukan CSIRT, serta Destinasi Pariwisata Prioritas	Jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan sampah laut	23 Lokasi	34 Lokasi	34 Lokasi	34 Lokasi	-	KLHK	Kemenko Marves, KKP, BRIN, dan Pemda	APBN (AP6) dan/atau APBD
47	5.9. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut	Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 mengenai penanganan sampah laut (<i>marine debris</i>)	Terselenggaranya koordinasi dalam rangka pelaksanaan penanganan sampah laut	Pengurangan sampah plastik di laut sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan tahun 2025	√	√	√	√	√	Kemenko Marves	KemenPPN/ Bappenas, KLHK, KKP, KemenPUPR, Kemenhub, Kemendagri, Kemendikbud-ristek, Kemenkeu, Kemenparekraf, Kemenperin, Kemenkominfo, Kemenkes,	APBN (AP6), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

Kemlu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 208 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
											Kemlu, BRIN, Bakamla, Pemda, dan Swasta	
5.10. Penanggulangan bencana kelautan												
48	5.10. Penanggulang-an bencana kelautan	Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, <i>breakwater</i> , dan bangunan pengamanan pantai lainnya di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	Terbangunnya tanggul laut, <i>breakwater</i> , dan bangunan pengamanan pantai lainnya mendukung Pengamanan Pesisir Perkotaan Pantura Jawa	Panjang tanggul laut, <i>breakwater</i> , dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (Km)	14,1 Km (2021) 12,8 Km (2020)	14,5 Km	15,3 Km	15,2 Km	-	KemenPUPR	KKP, Kemenhub, dan Pemda	APBN (AP5) dan/atau APBD

5.10. Penanggulangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 209 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
49	5.10. Penanggulangan bencana kelautan	Layanan Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami yang berkualitas	Meningkatnya Layanan Informasi Gempabumi dan peringatan dini Tsunami yang berkualitas	Jumlah lokasi yang memperoleh layanan informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami yang berkualitas (provinsi)	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	BMKG	Pemda, TNI, Polri, BNPB, dan Swasta	APBN (AP6) dan/atau APBD
50	5.10. Penanggulangan bencana kelautan	Pengembangan dan Penguatan Indonesia - Tsunami Early Warning System (Ina-TEWS)	Penguatan sistem peringatan dini bencana (PN 6)	Jumlah InaBuoy 13 Jumlah InaCBT 7 Jumlah InaCAT 3 Jumlah InaTOC 1	1. Pemasangan dan Operasional InaBuoy di 11 lokasi 4 Set InaBuoy (sebagai cadangan) 2. Penggelaran dan Operasional InaCBT di 2 lokasi; 2. Pemasangan InaBuoy di 2 lokasi 2. Operasional InaBuoy di 13 lokasi 3. Operasional 2 InaCBT Labuhan Bajo dan Rokatenda 4. Pra Penggelaran Selat Makassar.	1. Operasioal dan Perawatan InaBuoy di 13 lokasi 2. Operasional 2 InaCBT Labuhan Bajo dan Rokatenda 3. Penggelaran InaCBT Selat Makassar 4. Operasional	1. Operasional dan Perawatan InaBuoy di 13 lokasi 2. Operasional dan perawatan InaCBT di 3 lokasi 3. Operasional dan perawatan InaCAT di 3 lokasi	1. Operasional dan Perawatan InaBuoy di 13 lokasi 2. Operasional dan perawatan InaCBT di 4 lokasi 3. Operasional dan perawatan InaCAT di 3 lokasi	BRIN	KemenPPN/ Bappenas, KKP, Kemenhub, KLHK, BMKG, BIG, BNPB, Bakamla, Pushidros AL, Pemda, dan BUMN	APBN (AP6) dan/atau APBD	

Labuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 210 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
					Labuan Bajo dan Rokatenda. Peningkatan kapasitas operasional InaCAT di Perairan Utara Bali Revisi DED InaCBT Selat Makasar Operasional InaTOC	5. Operasional InaCAT di Perairan Palu 6. Operasional InaTOCFS <i>Advanced</i> CBT (Krui-Pelabuhan Ratu-Cilacap)	5. Pra Penggelaran InaCBT Banda NairaFS, DTS, dan DED InaCBT Sipora DTS dan Pra DED <i>Advanced</i> CBT (Krui-Pelabuhan Ratu-Cilacap)	4. Penggelaran InaCBT Banda Naira 5. Pra penggelaran InaCBT SiporaDED <i>Advanced</i> CBT (Krui-Pelabuhan Ratu-Cilacap)	4. Penggelaran InaCBT Sipora 5. Proposal Pendanaan Internasional DED <i>Advanced</i> CBT (Krui-Pelabuhan Ratu-Cilacap) - Bluebook Bappenas			

MATRIKS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 211 -

MATRIKS PILAR KKI KE-6: BUDAYA BAHARI

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN *
					2021	2022	2023	2024	2025			
6.1. Meningkatkan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan												
1	6.1. Meningkatkan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan	Layanan Informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN)	Meningkatnya Layanan Informasi Meteorologi Maritim yang berkualitas	Jumlah nelayan yang meningkat pemahamannya terhadap informasi cuaca maritim dan peringatan dini cuaca melalui sekolah lapang cuaca untuk nelayan/SLCN (orang)	3.800 orang (2021) 500 orang (2020)	3.800 orang	3.800 orang	3.800 orang	3.800 orang	BMKG	KKP dan Pemda	APBN (AP3) dan/atau APBD
2	6.1. Meningkatkan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur,	Penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran dan perbukuan	Meningkatnya pengetahuan tentang budaya bahari pada level Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan	Materi muatan lokal bahari (pengenalan lingkungan laut, pengenalan aktivitas budaya bahari) masuk dalam kurikulum, sistem	1 Dokumen (2021) 1 Dokumen (2020)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kemendikbud-ristek	Pemda	APBN (AP4) dan/atau APBD

jenis ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 212 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN *
					2021	2022	2023	2024	2025			
	jenis, dan jenjang pendidikan		Menengah, Nonformal, dan Informal	pembelajaran dan buku untuk semua tingkat pendidikan mulai dari usia dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Nonformal, dan Informal								
3	6.1. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan	Peningkatan program studi di Perguruan Tinggi yang mampu mendukung Pengembangan Industri Perikanan	Program studi Perguruan Tinggi yang terinventarisasi dan mampu mendukung pengembangan industri strategis perikanan	Jumlah program studi (prodi) baru di Perguruan Tinggi berbasis kelautan dan perikanan	385 prodi (2021) 382 prodi (2020)	388 prodi	390 prodi	392 prodi	394 prodi	Kemendikbud-ristek	KKP dan Perguruan Tinggi	APBN (AP3) dan Sumber Lain yang sah
4	6.1. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran	Sekolah Pelayaran dan Perikanan yang	SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat	Terbentuknya Pusat Keunggulan (Center Of	3 SMK (2021) 3 SMK (2020)	3 SMK	3 SMK	3 SMK	3 SMK	Kemendikbud-ristek	KKP, Kemenhub, Kemnaker, dan Perguruan	APBN (AP3) dan Sumber Lain yang sah

masyarakat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 213 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN *
					2021	2022	2023	2024	2025			
	masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan	direvitalisasi	Keunggulan (<i>Center Of Excellence</i>) Prioritas Sektor Kemaritiman	<i>Excellence</i>) Prioritas Sektor Kemaritiman di SMK							Tinggi	
6.2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi nilai budaya dan sistem sosial kelautan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional												
5	6.2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi nilai budaya dan sistem sosial kelautan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional	Pengembangan Ruang Kreatif dan Sarana Kreatif di destinasi pariwisata prioritas dan lokasi <i>Cultural Heritage Regeneration</i>	Berkembangnya ruang kreatif dan sarana kreatif untuk mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	Jumlah lokasi pengembangan ruang kreatif dan sarana kreatif (Lokasi)	2 Desain (2021) 1 Lokasi (2020)	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	Kemendikbud	Pemda	APBN (AP1) dan/atau APBD

6.3. Membangkitkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 214 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN *
					2021	2022	2023	2024	2025			
6.3. Membangkitkan pemahaman wawasan dan budaya bahari												
6	6.3. Membangkitkan pemahaman wawasan dan budaya bahari	Pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Meningkatnya pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	5.000 (2021) 5.000 (2020)	5.000	5.000	5.000	5.000	ANRI	Pemda	APBN (AP4) dan/atau APBD
7	6.3. Membangkitkan pemahaman wawasan dan budaya bahari	Arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Meningkatnya Sistem dan Jaringan Informasi Sistem Kearsipan	Jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	25 (2021) 25 (2020)	25	25	25	25	ANRI	Seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemda	APBN (AP4) dan/atau APBD
8	6.3. Membangkitkan pemahaman wawasan dan budaya bahari	Fasilitasi penerapan pariwisata berkelanjutan	Meningkatkan kualitas destinasi wisata bahari dengan penerapan standar	Lokasi destinasi pariwisata bahari	3 Lokasi (2021) 3 Lokasi (2020)	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	Kemenparekraf	Kemenko Marves, KLHK, KKP, Kemendagri, Badan Otorita Pariwisata,	APBN (AP1) dan/atau APBD

pariwisata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 215 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN *
					2021	2022	2023	2024	2025			
			pariwisata berkelanjutan melalui pengelolaan sampah yang dihasilkan dari aktivitas wisata								dan Pemda	
9	6.3. Membangkitkan pemahaman wawasan dan budaya bahari	Pengembangan segmen pasar personal wisata bahari	Meningkatnya pengembangan pariwisata segmen pasar personal	Jumlah promosi wisata bahari	3 kegiatan (2021) 4 kegiatan (2020)	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	Kemendagri	Kemendagri	APBN (AP1)
10	6.3. Membangkitkan pemahaman wawasan dan budaya bahari	Penyusunan peta jalan pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan	Tersedianya basis data dan informasi terkait peta jalan dan cakupan wilayah rencana pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan	Data dan informasi cakupan wilayah rencana pengembangan pariwisata bahari dalam rangka penyusunan peta jalan pengembangan	-	1 Dokumen	-	-	-	Kemendagri	Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri, KLHK, Perguruan Tinggi, dan Swasta	APBN (AP1) dan/atau Sumber lain yang sah

pariwisata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 216 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN *
					2021	2022	2023	2024	2025			
				pariwisata bahari yang berkelanjutan								
11	6.3. Membangkitkan pemahaman wawasan dan budaya bahari	Pembuatan Profil dan Pelaksanaan Promosi Investasi Pariwisata di Destinasi Prioritas	Tersedianya profil dan terlaksananya promosi investasi pariwisata untuk mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	Jumlah Profil dan Promosi Investasi Pariwisata di Destinasi Prioritas (Destinasi)	2 Destinasi (2021) 2 Destinasi (2020)	2 Destinasi	2 Destinasi	2 Destinasi	2 Destinasi	Kemenparekraf	-	APBN (AP1)
6.4. Melakukan harmonisasi dan pengembangan unsur kearifan lokal ke dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang lestari												
12	6.4. Melakukan harmonisasi dan pengembangan unsur kearifan lokal ke dalam sistem	Pendayagunaan pulau-pulau kecil	Fasilitasi pengakuan, perlindungan, dan penguatan Masyarakat Hukum Adat	Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-	5 komunitas (2021) 3 komunitas (2020)	4 komunitas	11 komunitas	11 komunitas	11 komunitas	KKP	Kemenko Marves, Kemenko Ekon Kemendagri, Kemendikbud- ristek, Kemendes, Kemensos, KemenATR/	APBN (AP4), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

pengelolaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 217 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN *
					2021	2022	2023	2024	2025			
	pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang lestari			pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif) (komunitas)							BPN, Kemenkumham, dan Pemda	

MATRIKS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 218 -

MATRIKS PILAR KKI KE-7: DIPLOMASI MARITIM

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral												
1	7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral	Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjian	Menguatnya kepemimpinan Indonesia pada organisasi dan pertemuan internasional sektor kelautan dan perikanan	Persentase dokumen kerja sama internasional sektor kelautan dan perikanan	92% (2021) 91% (2020)	93%	94%	95%	95%	KKP	Kemenko Marves, Kemlu, dan Kemenhub	APBN (AP7)
2	7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat	Implementasi terhadap tindak lanjut diterbitkannya PermenpanRB Nomor 35 Tahun 2019 tentang penugasan PNS pada instansi pemerintah dan di luar	Tersusunnya regulasi teknis tata cara penetapan penugasan PNS pada instansi	Jumlah peraturan BKN tentang tata cara penetapan penugasan PNS pada instansi pemerintah	-	-	1 Peraturan Kepala	-	-	BKN	Kemenko Marves, Kemlu, Kemenkumham, dan KemenPANRB	APBN (AP7)

bilateral . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 219 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	bilateral, regional, dan multilateral	instansi pemerintah (termasuk organisasi internasional di bidang kemaritiman)	pemerintah dan luar instansi pemerintah (termasuk organisasi internasional di bidang kemaritiman)	dan di luar instansi pemerintah yang diterbitkan								
3	7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral	Implementasi peraturan BKN tentang tata cara penetapan penugasan PNS pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah (termasuk organisasi internasional di bidang	Terselenggaranya integrasi data ASN dalam rangka pemantauan dan pelaksanaan pembinaan karir bagi PNS yang telah selesai melaksanakan penugasan pada instansi pemerintah dan luar	Persentase data data ASN yang telah selesai melaksanakan penugasan pada instansi pemerintah dan luar instansi pemerintah yang telah terintegrasi	-	-	50%	50%	-	BKN	Kemenko Marves, Kemlu, dan KemenPANRB	APBN (AP7)

kemaritiman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 220 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
		kemaritiman)	instansi pemerintah (termasuk organisasi internasional di bidang kemaritiman)									
4	7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral	Implementasi peraturan BKN tentang tata cara penetapan penugasan PNS pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah (termasuk organisasi internasional di bidang kemaritiman)	Tersusunnya surat keputusan petunjuk teknis penugasan kepada PNS pada instansi pemerintah dan luar instansi pemerintah (termasuk organisasi internasional) dari kementerian/ lembaga	Surat keputusan petunjuk teknis penugasan kepada PNS pada instansi pemerintah dan luar instansi pemerintah (termasuk organisasi internasional) dari kementerian/ lembaga	√	√	√	-	-	BKN	Kemenko Marves, Kemlu, dan KemenPANRB	APBN (AP7)

lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 221 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
			lembaga terkait yang menugaskan	terkait yang menugaskan yang diterbitkan								
5	7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral	Penggalangan dukungan dalam rangka pemilihan anggota Dewan Kategori C IMO	Indonesia menjadi anggota Dewan Kategori C <i>International Maritime Organization (IMO)</i>	Terpilihnya Indonesia menjadi anggota Dewan Kategori C <i>International Maritime Organization (IMO)</i>	√ (untuk periode 2022-2023)	-	√ (untuk periode 2024-2027)	-	-	Kemenuh	Kemenu Marves dan Kemlu	APBN (AP7)
6	7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat	Partisipasi Aktif Indonesia dalam sidang <i>State Parties on the Law of the Sea (SPLOS)</i>	Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjian	Keikutsertaan Indonesia dalam sidang <i>State Parties on the Law of the Sea (SPLOS)</i>	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kemlu	Kemenu Marves	APBN (AP7)

bilateral . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 222 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	bilateral, regional, dan multilateral											
7	7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral	Partisipasi Aktif Indonesia dalam sidang <i>International Seabed Authority (ISA)</i>	Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjian	Keikutsertaan Indonesia dalam sidang <i>International Seabed Authority (ISA)</i>	2 Kegiatan (2021) 1 Kegiatan (2020)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kemlu	Kemenko Marves, KemenESDM, KKP, Kemhan, TNI, BRIN, dan BIG	APBN (AP7)
8	7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral,	Partisipasi Aktif Indonesia dalam sidang <i>Indian Ocean Rim Association (IORA)</i>	Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjian	Keikutsertaan dan atau Kegiatan yang dilaksanakan Indonesia dalam kerangka <i>Indian Ocean Rim</i>	1 Kegiatan (2021) 3 Kegiatan (2020)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kemlu	Kemenko Marves, Kemenhub, KKP, Kemhan, TNI, dan Polri	APBN (AP7)

regional . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 223 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	regional, dan multilateral			<i>Association (IORA)</i>								
9	7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral	Partisipasi Aktif Indonesia dalam sidang ASEAN Maritime Forum	Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjian	Keikutsertaan dan atau Kegiatan yang dilaksanakan Indonesia dalam ASEAN Maritime Forum	1 Kegiatan (2021) 1 Kegiatan (2020)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kemlu	Kemenko Marves, Kemenhub, KKP, Kemhan, TNI, dan Polri	APBN (AP7)
10	7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral,	Partisipasi Aktif Indonesia dalam ASEAN <i>Outlook on Indo-Pacific (AOIOP)</i>	Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjian	Keikutsertaan dan atau Kegiatan yang dilaksanakan Indonesia dalam kerangka <i>ASEAN Outlook on Indo-Pacific</i>	- (2021) 1 Kegiatan (2020)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	Kemlu	Kemenko Marves	APBN (AP7)

regional . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 224 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	regional, dan multilateral			(AOIOP)								
11	7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral	Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjian internasional	Terwujudnya Peran dan partisipasi aktif Indonesia dalam pengelolaan berkelanjutan terumbu karang, perikanan dan ketahanan pangan di kawasan segitiga karang (<i>Coral Triangle area</i>)	42 dokumen pedoman/ rekomendasi/ kebijakan regional dan nasional dalam pengelolaan berkelanjutan terumbu karang, perikanan dan ketahanan pangan di kawasan segitiga karang (<i>Coral Triangle area</i>) (Kumulatif)	21 Dokumen	28 Dokumen	35 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	KKP	Kemenko Marves, Kemlu, KLHK, Kemendagri, dan Polri	APBN (AP7)

7.1. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 225 -

NO.	PROGRAM	KEGLATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
12	7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral	Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjian internasional	Menguatnya kerja sama bilateral dengan negara mitra	Persentase dokumen kerja sama bilateral yang diimplementasikan dalam kerangka kerja sama	92% (2021) 91% (2020)	93%	94%	95%	95%	KKP	Kemenko Marves, Kemlu, Kemendag, dan Kemenperin	APBN (AP7)
13	7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral	Penyelenggaraan dan dukungan percepatan pembentukan <i>Archipelagic and Island State Forum</i> sebagai organisasi internasional (<i>treaty based organization</i>)	Meningkatnya kepemimpinan Indonesia di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral	Percepatan dan dukungan terbentuknya AIS Forum sebagai organisasi internasional (<i>treaty based organization</i>)	√	√	√	√	√	Kemenko Marves	Kemlu, KKP, KLHK, Kemenhub, Kemenparekraf, dan Swasta	APBN (AP7) dan/atau Sumber lain yang sah

7.1. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 226 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
14	7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral	Partisipasi Aktif Indonesia dalam Forum antar negara ditingkat regional tentang keamanan dan keselamatan laut	Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjian internasional	Keikutsertaan dalam Forum antar negara ditingkat regional tentang keamanan dan keselamatan di laut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kemenko Marves	Kemenko Polhukam, Kemlu, Kemenhub, Kemenhan, KKP, Bakamla, Basarnas, TNI, dan Polri	APBN (AP7)
15	7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral	Partisipasi Aktif Indonesia dalam Forum antar negara di tingkat global tentang keamanan dan keselamatan laut	Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjian internasional	Keikutsertaan Indonesia dalam Forum antar negara di tingkat global tentang keamanan dan keselamatan laut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kemenko Marves	Kemenko Polhukam, Kemlu, Kemenhub, Kemenhan, KKP, Bakamla, Basarnas, TNI, dan Polri	APBN (AP7)

7.1. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 227 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
16	7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral	Partisipasi Aktif Indonesia dalam Pertemuan <i>Southeast Asia Maritime Law Enforcement Initiative's</i> (SEAMLEI)	Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjian internasional	Keikutsertaan Indonesia dalam Pertemuan <i>Southeast Asia Maritime Law Enforcement Initiative's</i> (SEAMLEI)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kemenko Marves	Kemenko Polhukam, Kemlu, Kemenhub, Kemenkumham, Kemenhan, KKP, Bakamla, Basarnas, Kejaksaan, TNI, dan Polri	APBN (AP7)
17	7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral	Peran dan partisipasi aktif Indonesia dalam perlindungan nelayan Indonesia dan Malaysia	Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjian internasional	Tersusunnya MoU <i>the Common Guidelines on Concerning Treatment of Fishermen</i> ; Pelaksanaan <i>Evaluasi MoU tsb melalui Kegiatan Review Meeting on MoU the Common Guidelines</i>	1 dokumen (2012); 1 Kegiatan (2019)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kemenko Marves	Kemenko Polhukam, Kemlu, Kemenhub, Kemenkumham, Kemenhan, KKP, Bakamla, Basarnas, Kejaksaan, TNI, dan Polri	APBN (AP7)

7.1. Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 228 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
18	7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerjasama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral	Peran dan partisipasi aktif Indonesia dalam kerjasama bilateral dan multilateral keamanan dan keselamatan laut	Optimalisasi diplomasi maritim melalui berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral dan multilateral	Terlaksananya kegiatan diplomasi maritim melalui kerjasama bilateral dan multilateral keamanan dan keselamatan laut	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kemenko Marves	Kemenko Polhukam, Kemlu, Kemenhub, Kemenkumham, Kemenhan, KKP, Bakamla, Basarnas, Kejaksaan, TNI dan Polri	APBN (AP7)
19	7.1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerjasama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral	Terlibat dalam kegiatan forum pertemuan Kepala Staf AL ASEAN dan forum strategis kawasan lainnya seperti IONS dan WPNS	Terlaksananya dukungan terhadap kebijakan negara terhadap sentralitas ASEAN melalui peran dan partisipasi aktif TNI AL dalam kegiatan kerja sama pertahanan	1. Rata-rata jumlah tanggapan/rekomen dari konsep/inisiatif yang diterima dalam pembahasan di forum ASEAN 2. 3.	1. 2 2. 50% 3. 1:1	1. 2 2. 100% 3. 1:1	1. 2 2. - 3. 1:1	1. 2 2. - 3. 1:1	1. 2 2. - 3. 1:1	Kemhan	Kemlu dan TNI	APBN (AP7)

dan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 229 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
			dan maritim kerangka ASEAN atau kerja sama multilateral lainnya di kawasan dalam rangka mewujudkan kesan positif politik LN Indonesia yang bebas aktif.	2. Persentase kemajuan penyiapan TNI AL menjadi <i>Chairman</i> dalam ANCM 3. Perbandingan kehadiran pemimpin dan aset TNI AL dalam forum IONS dan WPNS								
7.2. Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan												
20	7.2. Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian	Partisipasi aktif Indonesia pada forum <i>Tripartite Technical Experts Group (TTEG)</i> di Selat	Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjian tingkat regional dalam	Keikutsertaan Indonesia pada forum <i>Tripartite Technical Experts Group (TTEG)</i> di Selat	√	√	√	√	√	Kemenhub	Kemenko Marves, Kemlu, dan KLHK	APBN (AP1)

dan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 230 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	dan keamanan dunia di bidang kelautan	Malaka dan Selat Singapura	rangka mendukung keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan	Malaka dan Selat Singapura								
21	7.2. Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan	Penyelenggaraan diplomasi TNI Angkatan Laut, terjaganya hubungan luar negeri, dan terlaksananya kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.	Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjian tingkat bilateral, regional, multilateral	1. Persentase kegiatan diplomasi yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut. 2. Jumlah pengesahan dokumen perjanjian kerja sama bilateral (MoU, ToR, IA, dll.) dengan Angkatan Laut negara ASEAN.	1. 100% 2. 6 Dokumen 3. 14 Dokumen	1. 100% 2. 7 Dokumen 3. 16 Dokumen	1. 100% 2. 7 Dokumen 3. 18 Dokumen	1. 100% 2. 8 Dokumen 3. 21 Dokumen	1. 100 % 2. 8 Dokumen 3. 21 Dokumen	Kemhan	Kemenko Polhukam, Kemlu, dan TNI,	APBN (AP7)

3. Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 231 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
				3. Jumlah pengesahan dokumen perjanjian kerja sama (MoU, ToR, IA, dll.) dengan Angkatan Laut Non-ASEAN								
22	7.2. Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan	Latihan bersama dengan negara-negara lain baik bilateral maupun multilateral sebagai peserta "maupun sebagai <i>host</i> ."	Meningkatnya peran serta aktif TNI AL dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian dunia.	1. Jumlah partisipasi dalam latihan bersama sebagai peserta. 2. Jumlah partisipasi dalam latihan bersama sebagai <i>host</i> .	1. 10 Kegiatan 2. 17 Kegiatan	1. 12 Kegiatan 2. 13 Kegiatan	1. 12 Kegiatan 2. 14 Kegiatan	1. 13 Kegiatan 2. 12 Kegiatan	1. 10 Kegiatan 2. 15 Kegiatan	Kemhan	Kemlu dan TNI	APBN (AP7)

7.2. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 232 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
23	7.2 Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan	Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjian	Terselenggaranya Diplomasi Maritim Indonesia serta Meningkatnya peran Indonesia dengan negara mitra di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional dan multilateral	1. Jumlah Pengesahan dokumen perjanjian kerja sama bilateral Indonesia (MoU, IA, LoA, dll) tentang keamanan dan keselamatan laut 2. Persentase Jumlah kegiatan diplomasi maritim yang dilaksanakan oleh Indonesia	1. 4 Dokumen 2. 100%	1. 4 Dokumen 2. 100%	1. 4 Dokumen 2. 100%	1. 4 Dokumen 2. 100%	1. 4 Dokumen 2. 100%	Kemenko Marves	Kemenko Polhukam, Kemlu, Kemenhub, Kemenkumham, Kemenhan, KKP, Basarnas, Bakamla, Kejaksaan, TNI, dan Polri	APBN (AP7)

7.2. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 233 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
24	7.2. Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dunia di bidang kelautan	Berpartisipasi pada Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum di Kawasan baik sebagai peserta maupun sebagai Penyelenggara dalam kegiatan <i>Maritime Security Desktop Exercise</i> (MSDE) sejak tahun 2009	Meningkatnya pemahaman hukum laut antar aparat penegak hukum di laut dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian dunia.	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan kegiatannya tiap tahun	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kemenko Marves	Kemenko Polhukam, Kemlu, Kemenhub, Kemenkumham, Kemenhan, KKP, Kemenkeu, KLHK, Bakamla, Basarnas, Kejaksaan, TNI, dan Polri	APBN (AP7)

7.2. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 234 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
25	7.2. Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan	Berpartisipasi pada Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum di Kawasan baik sebagai peserta maupun sebagai Penyelenggara dalam kegiatan <i>Capacity Building for HACGAM</i> sejak tahun 2017	Meningkatnya pemahaman hukum laut antar aparat penegak hukum di laut dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian dunia.	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan kegiatannya tiap tahun	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kemenko Marves	Kemenko Polhukam, KKP, Kemenkumham, Kemenkeu, KLHK, Kemlu, Kemenhub, Bakamla, Basarnas, Kejaksaan, TNI, dan Polri	APBN (AP7)

7.2. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 235 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
26	7.2. Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan	Pelaksanaan <i>Port Visit</i> oleh KRI dengan melaksanakan <i>naval diplomacy</i> , pameran bendera, kunjungan kepada pihak otoritas sipil dan militer pada negara tujuan, serta melaksanakan latihan terbatas bersama pihak AL setempat	Terwujudnya komitmen TNI AL dalam melaksanakan kerjasama keamanan maritim di wilayah perbatasan dengan negara tetangga dan perluasan pengaruh Indonesia sesuai prioritas kebijakan LN Pemerintah	Jumlah Patkor/Pamtas yang dilaksanakan. Jumlah kegiatan <i>Goodwill Port Visit</i> per tahun termasuk ke negara-negara pulau yang membentang di Samudera Pasifik	53 Kegiatan	54 Kegiatan	55 Kegiatan	55 Kegiatan	55 Kegiatan	Kemhan	TNI, Kemlu, Kemendikbud-ristek, dan Kemenparekraf.	APBN (AP7)

7.2. Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 236 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
27	7.2. Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan	Partisipasi Aktif Indonesia dalam sidang ASEAN <i>Regional Forum (ARF) Intersessional Meeting on Maritime Security</i>	Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjian	Keikutsertaan Indonesia dalam ASEAN <i>Regional Forum (ARF) Inter- Sessional Meeting on Maritime Security</i>	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kemlu	Kemenko Marves, Kemhan, Kemenkeu, TNI, dan Polri	APBN (AP7)

7.3. Kepemimpinan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 237 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
7.3. Kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang kelautan												
28	7.3. Kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang kelautan	Penyusunan dokumen instrument internasional <i>Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction</i>	Optimalisasi diplomasi terkait dengan perjanjian	Dokumen instrumen internasional <i>Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ)</i>	√	√	√	√	√	Kemenko Marves	Kemlu, KemenESDM, KLHK, KKP, dan BRIN	APBN (AP6)
29	7.3. Kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang	Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	Penguatan RPOA IUU untuk mendukung pelaksanaan perikanan yang berkelanjutan termasuk pemberantasan	Penambahan 2 negara anggota RPOA IUU (Kumulatif)	-	1 Negara	-	2 Negara		KKP	Kemlu, KLHK, BRIN, dan Polri	APBN (AP7)

kelautan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 238 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
	kelautan		IUUF di kawasan regional									
30	7.3. Kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang kelautan	Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	Penguatan RPOA IUU untuk mendukung pelaksanaan perikanan yang berkelanjutan termasuk pemberantasan IUUF di kawasan regional	Pengesahan dokumen RPOA IUU (Kumulatif)	3 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	KKP	Kemenko Marves, Kemlu, Kemhan, Bakamla, TNI, dan Polri	APBN (AP7)

7.3. Kepemimpinan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 239 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
31	7.3. Kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang kelautan	Pengelolaan sumber daya ikan	Optimalisasi pemanfaatan kuota tangkapan (<i>bigeye tuna</i> , <i>southern bluefin tuna</i>) yang ditetapkan oleh <i>Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)</i>	Rata-rata persentase pemanfaatan kuota tangkapan yang ditetapkan oleh <i>Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)</i>	90%	100%	100%	100%	100%	KKP	KLHK, Kemlu, dan BRIN	APBN (AP7)
32	7.3. Kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang kelautan	Penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan	Keberlanjutan pembangunan sektor perikanan di Asia Tenggara yang berkesinambungan	Pengesahan 5 dokumen pedoman/rekomendasi/kebijakan bersama ASEAN-SEAFDEC untuk mendukung	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	KKP	Kemlu, KLHK, dan BRIN	APBN (AP7)

pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 240 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
				pembangunan perikanan yang berkelanjutan di kawasan (Kumulatif)								
7.4. Percepatan perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga												
33	7.4. Percepatan perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga	Perundingan Perbatasan Maritim dengan Negara Tetangga	Optimalisasi diplomasi terkait dengan perjanjian politik, keamanan kewilayahan, dan kelautan	Perundingan Batas Maritim RI dengan: Malaysia, Vietnam, Singapura, Thailand, Filipina, Palau, Timor Leste, Australia, dan India	Laporan Perkembangan	Laporan Perkembangan	Laporan Perkembangan	Laporan Perkembangan	Laporan Perkembangan	Kemlu	Kemenko Marves, BIG, dan TNI	APBN (AP7)

7.5. Percepatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 241 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
7.5. Percepatan submisi penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan hukum internasional												
34	7.5. Percepatan submisi penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan hukum internasional	Optimalisasi diplomasi terkait dengan perjanjian politik, keamanan kewilayahan, dan kelautan	Survei landas kontinen di luar 200 mil laut	[Wilayah] Terpetakannya landas kontinen di luar 200 mil laut	-	1 Landas Kontinen	1 Landas Kontinen	1 Landas Kontinen	-	BIG	Kemenko Marves, KemenESDM, KKP, Kemlu, BRIN, dan TNI	APBN (AP7)
35	7.5. Percepatan submisi penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan hukum internasional	Penyusunan dokumen submisi perluasan landas kontinen	Tersusunnya dokumen submisi perluasan landas kontinen dan dokumen paparan Indonesia dihadapan komisi landas kontinen	Dokumen Submisi Landas Kontinen	Penyampaian laporan dokumen Submisi (Barat Sumatera, Penyusunan Dokumen paparan Pemerintah Indonesia di hadapan Komisi Batas Landas Kontinen PBB	-	1 Dokumen (Selatan Jawa dan Nusa Tenggara)	Penyusunan 1 Dokumen paparan Indonesia dihadapan komisi landas kontinen	-	BIG	Kemenko Marves, KemenESDM, KKP, Kemlu, BRIN, dan TNI	APBN (AP7)

7.5. Percepatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 242 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
36	7.5. Percepatan submisi penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan hukum internasional	Submisi Perluasan Landas Kontinen Indonesia	Diusulkannya perluasan landas kontinen Indonesia disertai dengan dokumen pendukungnya	Diterimanya Dokumen Submisi Perluasan Landas Kontinen oleh PBB (CLCS)	-	Submisi Segmen Utara Papua	Submisi Segmen Barat Daya Sumatera	Submisi Segmen Selatan Jawa - Nusa Tenggara	-	Kemlu	Kemenko Marves dan BIG	APBN (AP7)
7.6. Peningkatan penempatan warga negara Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional bidang kelautan												
37	7.6. Peningkatan penempatan warga negara Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional bidang kelautan	Partisipasi Aktif Pushidrosal dalam forum organisasi Hidrografi Regional dan Internasional	Meningkatnya peran serta dan keterwakilan Pushidrosal dalam forum organisasi Hidrografi regional dan internasional	Jumlah keikutsertaan Pushidrosal dalam forum Hidrografi internasional	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	Kemhan	Kemenko Marves, Kemlu, dan TNI,	APBN (AP7)

7.7. Pembakuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 243 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER PEMBIAYAAN*
					2021	2022	2023	2024	2025			
7.7. Pembakuan nama pulau												
38	7.7. Pembakuan nama pulau	Survei Toponimi dan Penelaahan nama rupabumi wilayah laut	Terselenggaranya nama rupabumi wilayah laut	{Jumlah} Nama rupabumi wilayah laut	181 Titik	100 Titik	105 Titik	115 Titik	100 Titik	BIG	Kemenko Marves, Kemendagri, KKP, BRIN, TNI, dan Pemda	APBN (AP7) dan/atau APBD
39	7.7. Pembakuan nama pulau	Pembakuan unsur rupa bumi	Verifikasi dan supervisi pembakuan unsur rupa bumi	Daerah yang membakukan unsur rupa bumi	40 Daerah	40 Daerah	40 Daerah	40 Daerah	-	Kemendagri	Kemendagri, KKP, dan Pemda	APBN (AP1), APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

Daftar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 244 -

Daftar Singkatan/Akronim Kementerian/Lembaga

No.	Singkatan/Akronim	Keterangan
1.	Kemenko Marves	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2.	Kemenko Ekon	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3.	Kemenko Polhukam	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
4.	Kemensetneg	Kementerian Sekretariat Negara
5.	Kemenkumham	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
6.	KemenATR/BPN	Kementarian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
7.	KemenBUMN	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
8.	Kemendag	Kementerian Perdagangan
9.	Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
10.	KemendesPDTT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
11.	Kemendikbudristek	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
12.	KemenESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
13.	Kemenhub	Kementerian Perhubungan
14.	Kemenkes	Kementerian Kesehatan
15.	Kemenkeu	Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

16. Kemenkominfo . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 245 -

No.	Singkatan/Akronim	Keterangan
16.	Kemenkominfo	Kementerian Komunikasi dan Informatika
17.	KemenkopUKM	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
18.	KemenPANRB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
19.	Kemenparekraf	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
20.	Kemenperin	Kementerian Perindustrian
21.	KemenPUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
22.	Kemensos	Kementerian Sosial
23.	Kementan	Kementarian Pertanian
24.	Kemhan	Kementerian Pertahanan
25.	Keminvest/BKPM	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
26.	Kemlu	Kementerian Luar Negeri
27.	KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
28.	KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
29.	Setkab	Sekretariat Kabinet
30.	ANRI	Arsip Nasional Republik Indonesia
31.	Bakamla	Badan Keamanan Laut

32. Bapeten . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 246 -

No.	Singkatan/Akronim	Keterangan
32.	Bapeten	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
33.	Basarnas	Badan SAR Nasional Pencarian dan Pertolongan
34.	BIG	Badan Informasi Geospasial
35.	BKN	Badan Kepegawaian Negara
36.	BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
37.	BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
38.	BNPP	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
39.	BP2MI	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
40.	BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
41.	BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
42.	BSN	Badan Standarisasi Nasional
43.	Kejaksaan	Kejaksaan Republik Indonesia
44.	LAN	Lembaga Administrasi Nasional
45.	Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
46.	TNI	Tentara Nasional Indonesia
47.	BUMN	Badan Usaha Milik Negara

48. Pemda . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 247 -

No.	Singkatan/Akronim	Keterangan
48.	Pemda	Pemerintah Daerah
49.	Swasta	Pihak nonpemerintah

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

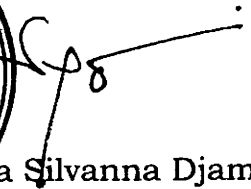
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,




Silvana Djaman